

GENEOLOGI PEMIKIRAN POLITIK TAN MALAKA

ditinjau dari perspektif Islam

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu Ushuluddin

Oleh :

EARWIS

NIM : 44 11 4 007

**Program Studi
FILSAFAT POLITIK ISLAM**



**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2015**

ABSTRAK

Nama :Farwis
Nim :44.11.4.007
Jurusan :Pemikiran Politik Islam
Judul Skripsi :**Geonologi pemikiran politik Tan Malaka ditinjau dari perspektif Islam**

Geonologi pemikiran politik Tan Malaka lebih mengarah kepada Islam, meskipun pemikirannya banyak yang diambil dari Barat, hal ini dapat dilihat dari tempat lahir Tan Malaka sendiri yaitu di Minangkabau yang ke Islamanya sangat kental, Tan Malaka mendukung aliansi Islam sebagai perjuangan untuk merdeka. Islam merupakan spirit perlawanan atas kolonialisme dan imperealisme sehingga jihad atau memerangi kolonialisme wajib hukumnya.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan buku sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan judul skripsi yaitu “Geonologi pemikiran politik Tan Malaka ditinjau dari perspektif Islam”

Pemikiran politik Tan Malaka lebih mengarah kepada MADILOG (Materilaisme- Dialektika-Logika) yang diadopsi dari dunia Barat. Dalam revolusi, Tan Malaka memiliki beberapa revolusi yang dapat dijadikan sebagai perbaikan bagi Indonesia seperti revolusi sosial, revolusi ekonomi, revolusi politik dan revolusi pendidikan.

Sementara dalam etika politik, dasar-dasar moralitas Tan Malaka berbentuk pada perpaduan unsur-unsur budaya dan agama yang berakumulasi pada masyarakat yang menghasilkan paradigma baru sebagai tujuan yaitu kemerdekaan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah mengajarkan manusia menuju jalan kebaikan dan kemaslahatan.

Penulis menyadari bahwa proses kegiatan penulis, penyusunan, serta perbaikan materi skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Katimin, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Husna Siregar, M. Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan tulus dan ikhlas, sehingga tulisan ini dapat terselesaikan.

Kemudian yang istimewa saya haturkan sembah sujud tak terhingga kepada Ayah Sofyan dan Ibu Tercinta Sabedah yang telah memberikan curahan kasih sayang, perhatian dukungan, dan pengorbanan atas segalanya demi keberhasilan penulis dalam penyelesaian studi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, untuk itu sepatasnyalah penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak, di antaranya

1. Ibu Dr. Dahlia Lubis, M.Ag, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Bapak Dr. Sofyan Saha, M.A Wakil Dekan I, Bapak Adenan, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Drs. Kamaluddin, M.A Wakil Dekan III, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan pendidikan di Fakultas Ushuluddin Jurusan Pemikiran Politik Islam.

2. Drs. Maraimbang Daulay, M.A selaku Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam, serta Dra. Elly Warnisyah, M.A selaku sekjur Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin UIN Sumatera Utara.
3. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.
4. Untuk Muhammad Nasir dan Anoni ritonga selaku Sahabat yang selalu ada dalam setiap langkahku, yang selalu memberikan rasa persahabatan yang tiada habisnya, serta rasa terima kasih saya atas saran dan motivasinya dalam penulisan skripsi ini.
5. Untuk satu nama yang selalu tertulis di dalam hati Ku, semoga Allah memberikan kemudahan dalam menjalani hidup ini.
6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN-SU beserta seluruh pihak yang telah banyak membantu memberikan data dan informasi selama penulis melakukan penelitian.
7. Untuk teman yang selalu ada dalam penulisan skripsi ini Ashri Ramadhani, Jasmani dan Muhammad Busri Rambe, Fandi Ahmad, Zulfadli Nasuion, Siti Fatimah, Fitria Ningsih Pasaribu serta teman-teman satu angkatan dengan penulis di Jurusan Pemikiran Politik Islam, Tafsir Hadist, Aqidah Filsafat dan Perbandingan Agama yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis.
8. Serta ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah mengadu nasibnya dan mencari ilmu pengetahuan serta pengalamannya selama di Medan, mereka adalah sahabat saya satu perjuangan Organisasi diantaranya Muhammad Nasir, Antoni Ritonga, Muhammad Jamil, Hibban Panerangan Siregar, Fazlur Rahman, Fahri, Safaruddin, Tuti Kurniati, Heriyanti, Cici, Evi, Rida, Fhadlan Kamali Batu Bara, Yulisa Irmayani Lubis, Helmi, Rudiansyah, Habibu rohman, Ozi Armansyah, Winansyah, Julida Ritonga, dinawati Hrp, dan yang lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu,

yang sangat berperan memberi masukan kepada saya dalam soal keilmu pengetahuan yang sangat berkembang pesat dan membantu saya dalam penyelesaian skripsi saya ini.

Akhirnya, penulis ingin mengatakan segala bentuk kesalahan dan kelemahan di dalam skripsi ini sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Penulis berdoa, semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapat pahala dan amal disisi Allah Swt serta senantiasa mendapat perlindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas kehidupan, Amin

Medan, 01 November 2015

Penulis

Farwis

Nim. 44114007

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II POLITIK ISLAM DI INDONESIA

A. Pengertian Politik Islam	16
B. Sejarah Politik Islam Di Indonesia	20
1. Pra Kemerdekaan	26
2. Pasca Kemerdekaan Sampai ke Masa Reformasi	31

BAB III BIOGRAFI TAN MALAKA

A. Sejarah Tan Malaka.....	49
B. Karya-Karya Tan Malaka.....	89

BAB IV FILSAFAT POLITIK TAN MALAKA

A. MADILOG <i>vis a vis</i> Logika Mistika.....	96
B. Tan Malaka dan Revolusi	100

1. Revolusi Sosial	101
2. Revolusi Ekonomi	103
3. Revolusi Politik	106
4. Revolusi Pendidikan.....	110
C. Agama dan Budaya Sumber Etika Politik.....	113

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....	119
2. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Topik tentang Tan Malaka sangat menarik di telinga para pembaca dewasa ini, meskipun sering kali diiringi dengan satu perdebatan panas tentang kepahlawanannya. Biasanya pahlawan yang kontroversi ini disematkan makna komunis sehingga komunis Tan Malaka seolah memberi image yang jelek di Indonesia. Namun tak dapat dipungkiri komunis Indonesia di tahun awal berdirinya sampai Indonesia merdeka memberi coretan hitam dalam tubuhnya diantaranya peristiwa-peristiwa tersebut G 30 S PKI yang didalangi langsung oleh Sekjen PKI yaitu D.N Aidit dan pelaksananya adalah Letkol Untung.¹

Kehidupan masyarakat Minangkabau yang religius banyak mempengaruhi cara fikir Islam Tan Malakah sebagai tokoh kontroversi. Isi dan keyakinan politiknya masih sangat kental dengan nuansa keIslaman,² walaupun Tan Malaka menganut komunisme. Namun Tan Malaka mendukung aliansi Islam sebagai perjuangan untuk merdeka, sebagai kesimpulan Hamka tentang Tan Malaka bahwa fakta-fakta sejarah menunjuk Tan Malakah sebagai tokoh reforesi Islam Minangkabau,³ sehingga Tan

¹ . Tim Media Persindo. *Kumpulan Pernyataan Bung Karno Tentang Gerakan 30 September (Benarkah Gerakan 30 September di Dalangi Bung Karno?)*. (Yogyakarta :Media Persindo, 2006). Hal vii

² . Tan Malaka. *Islam Dan Tinjauan Madilig*. (Jakarta :Widjaja 1951).

³ . Hamka Dalam Ahmad Suhelmi. *Dari Kanan Islam hingga Kiri Islam Biografi Dan Pemikiran Politik*. (Jakarta : Darul Falah 2001), hal. 173

Malaka sering tidak sepaham dengan kawan-kawan seperjuangan lainnya. Bagi Tan Malaka, Islam merupakan spirit perlawanan atas kolonialisme dan imperialisme⁴ sehingga jihad atau memerangi kolonialisme wajib hukumnya.

Kehadiran Tan Malaka dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia masih mengundang kontroversi. Tan Malaka di satu sisi dianggap sebagai pejuang sejati Indonesia, di sisi lain tidak lebih seorang komunis (PKI) yang bercita-cita mendirikan negara komunis Indonesia.

Tan Malaka sebagai tokoh incognito di masa Indonesia menghadapi kemerdekaan Tahun 1945, Tan Malaka yang disinyalir sebagai salah satu dalang penculikan Bung Karno dan Hatta, yang dilaksanakan pemuda sukarni, Nitimihardjo, Elkana Tobing, Adam Malik, Chairul Shaleh dan beberapa kaum muda lainnya mengutip dalam buku “ Detik-detik Proklamasi” yang ditulis Adam Malik, dalam buku tersebut diceritakan penculikan yang dilaksanakan dengan salah satu gagasan atau himbuan dari Tan Malaka secara langsung. Tulisan dalam buku tersebut menjelaskan bahwa pemuda dan pelajar aktivis yang mempersiapkan proklamasi dari kawasan Menteng sampai dengan Rengas Donklok, hampir sebagian besar adalah pengikut setia Tan Malaka. Tindakan proklamasi Tan Malaka ditunjukkan pada awal tahun 1950 dengan bertemu Achmad Soebardjo sadar bahwa tamu yang memberikan wejangan tersebut adalah Tan Malaka. Tindakan Tan Malaka tidak berani muncul secara terang-terangan tersebut itu disebabkan kehati-hatiannya

⁴ . Ihsanudin, Tan Malaka Dan Revolusi Proletar. (Yogyakarta : Risist Book 2010), h. xv

mengingat dia adalah DPO dari polisi-polisi kolonial termasuk kenpetani yang saat itu masih berkuasa.⁵

Tan Malaka yang mengikrarkan dari sebagai seorang marxis.Pristiwa yang membawanya diawali dari belajar di Belanda pada tahun 1991 dalam pengalamannya melihat pola kehidupan sosial antara kolonialisme dengan buruh pabrik⁶ sehingga membawa Tan Malaka atas dirinya sebagai komunis dan materialis sekaligus bertuhan mengakibatkan dirinyaditakuti polisi kolonial.Mengidiskasikan bahwa dirinya adalah komunis atau disebut PKI bertuhan.Kontroversi yang menarik dari kePKI an Tan Malaka adalah sebuah ideologi Tan Malaka melahirkan dua gagasan aktivitas pergerakan kemerdekaan bercokol pada percampuran ideologi agama dan Komunis Marxisme-Lenimisme. Kontroversi diatas ditegaskan dalam sebuah kutipan yang membagi kemunculan aktivis pergerakan kemerdekaan pada liam tipe ideologi. *Pertama*, Islam Komunis. Mereka berasas pada ajaran Tan Malaka yang menghubungkan ajaran tentang kesamaan dan kebersamaan manusia dalam Islam dan komunis. Masuk dalam kelompok pertama ini adalah pemimpin PKI Sumatera Barat tahun 1948 Haji Datuak Batuah dan mantan ketua umum partai Murba Djamaluddin Tamim. *Kedua*, kalangan yang berideologi Islam nasionalis.Kelompok ini diwakili organisasi PERMI, PSSI, Muhammadiyah dan Masyumi.Tokoh-tokohnya adalah M. Sjafei, A.R Sutan Mansyur, Rasuna Said dan Hamka, Haji Rasuli.*Ketiga*, sosialis

⁵ . Malik, Adam. Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945. (Jakarta : Widjaya 1975), h. 8

⁶ . Ahmad Suhelmi. *Dari Kanan Islam hingga Kiri Islam Biografi Dan Pemikiran Politik*. (Jakarta : Darul Falah 2001), hal. 159

democrat yang berjumlah sedikit tapi menonjol. Mereka mengikuti pimpinan, dan Muhammad Hatta di Batavia, seperti M. Rasjid. *Keempat*, Nasionalis kiri. Tipe ini baru muncul setelah kegagalan pemberontakan PKI tahun 1926 di Silungkang. Mereka masuk dalam Gyu Gun (Militer Jepang). Tokoh-tokohnya chatib Sulaiman, Dahlan Djambek, dan Ahmad Husein. Kelima, kalangan komunis yang berasal dari gerakan kiri Tan Malaka dan dipengaruhi Marxisme-leninisme. Masuk kedalam tipe ini adalah ketua PKI Sumatera Timur Natar Zainuddin dan Pimpinan PKI Sumatera Barat Bachtarudin.⁷

Dari penjelasan corak ideologi di Indonesia ini penulis ingin melihat sejauh mana ideologi komuis di Indonesi, dalam pengalaman Tan Malaka yang ditulis dalam karyanya diantaranya yang berjumlah kurang lebih 26 buah, *Matu Mona, Spionnage-Dienst (Patjar Merah Indonesia). Medan (1938), Emnast. Tan Malaka di Medan. Medan (1940), Tiga Kili Patjar Merah Datang Membela (1940), Patjar Merah Kembali Ke Tanah Air (1940), Menuju Refublik Indonesia (1924), Dari Pendjara Ke Pendjara, Auto Biografi, Madilog (1948), Gerpolek (1948), Parlement atau Soviet (1920), SI Semarang dan Onderwidj (1921), Dasar Pendidikan (1921), Islam Dalam Tinjauan Madilog (1948), Semangat Muda (1925), Masa Aksi (1926), Pandangan Hidup (1948), Ku Handel Di Kaliurang (1948), Muslihat (1945), Pari International (1927), Rencana Ekonomi Berjuang (1945), Aslia Bergabung (1943), Pari Dan Nasionalisten (1927), Pari Dan PKI (1927), Politik (1945), Manifesto Bangkok*

⁷ . Taufik Adi Susilo, *Tan Malaka Biografi Singkat 1897-1949*” (Yogyakarta : Ar-Ruzz Mewdia 2008), hal. 14

(1927), *Proklamasi 17-8-43 Isi Dan Pelaksanaannya (1945)*, yang diselesaikannya selama blesir ke berbagai belahan dunia, sehingga Tan Malaka mempunyai indikasi memasukkan ideologi komunis ke Indonesia tetapi pada kenyataannya Tan Malaka harus menghadapi Indonesia dengan nasionalitasnya, olehnya indekasi yang kuat dalam hipotesis tentang Tan Malaka ini yang mengawali latar belakang kemunculan pemikiran tentang aktivitas pergerakan di Indonesia. Dari kemunculan dua aliran pemikiran Tan Malaka perlu dibeda secara luas untuk meluruskan Islam versus Komunis.

Indekasi *pertama* tentang kecurigaan penulis terhadap kekalahan komunis pada perang dunia II dan kekalahan Islam di perang dunia I antara Islam dan Komunis telah kalah pada interior kapitalis yang mengusung politik kolonialisme dan satu hal yang dihadapi Tan Malaka adalah kenasionalitasan yang ada di Indonesia untuk menghadapi politik kolonialisme Belanda olehnya Tan Malaka bergabung dengan SI 1921, sehingga memberi inspirasi penulis untuk membahas tentang wacana kebenaran yang masih kabur dalam pemahaman Islam didalam Komunis ataukah Komunis di dalam Islam.

Indikasi kedua Tan Malaka sebagai anak rana Minang, Islam bagi Tan Malaka adalah adat istiadat atau budaya. Mengutip para antropologi yang berbicara tentang fakta-fakta yang mempengaruhi serta yang menentukan tingkah laku manusia diantaranya, faktor dari dalam diri manusia dan faktor dari luar diri manusia, salah

satunya adalah kebudayaan.⁸ Dari hal ini dapat ditarik sebuah pernyataan apakah betul ideologi Islam-Komunis Tan Malaka tersirat dari faktor dalam Tan Malaka sebagai sebuah kebutuhan dan faktor luar dari Tan Malaka yaitu budaya tradisional Minangkabau dan pengalaman belajar Tan Malaka.

Dari dua indikasi ini kegelisahan penulismencoba untuk membedah pola pikir Tan Malaka, akan tetapi kiranya tak mungkin penulis bedah satu persatu karya pemikiran Tan Malaka, penulis mencari sumber dari berbagai karya Tan Malaka serta dapatlah salah satu buku yang cocok untuk kegelisahan akademik penulis dan hipotesis awal menyatakan bahwa kerangka pemikiran politik Tan Malaka terdapat pada buku atau karyanya yang berjumlah kurang lebih 25 buah. Tetapi ada buku yang sangat menarik untuk membaca pemikiran Tan Malaka yaitu *Madilog* dimana pemikiran Tan Malaka menjelaskan tentang struktur gerak pemikiran yang terbagi atas tiga gagasan besar yaitu materialisme, dialektika dan logika.⁹ Buku ini melahirkan berbagai pemikiran yang diaplikasikan secara aktif praktis, pemikiran ini membawa Tan Malaka bergerak dalam mendirikan berbagai partai, aktif dalam aksi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, menjadi guru dan lain-lain. Masih dari buku ini juga kegiatan politik yang fasip dan praktis dengan mengarang buku lain selain *Madilog* yang memberi sumbangan besar pada kemerdekaan Indonesia seperti *Aksi Masa, Gerpolek, Dari penjara Ke Penjara*, dan lain-lain.

⁸ . Arifin Budiman, *Manusia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkah Lakunya Dalam Teori-Teori Antropologi Sosial*. (Jakarta : Erlangga 1986), h. 36

⁹ . Taufik Adi Susilo, *Tan Malaka Biografi Singkat 1897-1949*” (Yogyakarta : Ar-Ruzz Mewdia 2008), hal. 72-86

B. Rumusan Masalah

Masalah utama dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep politik Tan Malaka. Masalah utama akan dirinci kedalam sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Dalam bidang apa saja yang ada dalam pemikiran politik Tan Malaka?
2. Signifikansi (kepentingan) pemikiran politik sekarang di Indonesia?
 - Tan Ma di kaitkan dengan system politik di indonesia

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terbagi atas dua macam secara akademisi, dan kegunaan. *Pertama*, bertujuan untuk menemukan karakter atau corak Islam kiri dalam pemikiran politik Indonesia seperti penemuan Islam kiri di Timur Tengah sebagai pembandingnya untuk tujuan akademis. *Kedua*, tujuannya memberi sumbangan kegunaan dalam dua signifikansi aspek kegunaan yaitu :

1. Aspek keilmuan yang bersifat teoritis.
 - a. Pengungkapan karakteristik konsep metodologi yang ditawarkan Tan Malaka akan memberikan suatu nuansa baru dalam kajian dan wawasan filsafat politik terutama filsafat politik Islam. Sementara ini, kajian politik Islam terjebak dalam ranah politik stagnasi yaitu pengakuan makna negara Islam sebagai kiblat politik Islam dengan nuansa politik yang muncul di negara Arab.

- b. Mengungkapkan argumentasi filsafati dari gerakan tevolusioner Tan Malaka.
2. Aspek praktis yang bersifat fungsional.
- a. Menginventarisir pemiiran politi Tan Malaka.
 - b. Mengkritisi kekuatan dan kelemahan pemikiran politik Tan Malaka.

D. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, ada beberapa penulis atau individu yang telah mengkaji dan meneliti terhadap pemikiran Tan Malaka. Dari sejumlah tulisan yang ada itu, penulis belum mendapatkan karya yang membahas secara khusus tentang aspek kolaborasi antara teori politik Tan Malaka dalam Madilog dan Teori politik islam secara konferhensif dan mendalam.

Karya besar yang muncul adalah karya Herlen Jervis yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia “Tan Malaka, pejuang revolusioner atau manusia murtad?” karya ini hanya bercorak pada gerakan praktis yang dilakukan Tan Malaka.¹⁰ Karya ini juga tidak menunjukkan corak Tan Malaka dilahirkan dalam dua lingkungan yang berbeda, indikasi bahwa Tan Malaka hidup dimasa komunis dan kapitalisme secara otomatis tidak menjadi bahasan penting sehingga penulisan ini bergerak kearah indikasi pemikiran yang mempengaruhi arah pemikiran Tan Malaka dari kekalahan Islam dan komunis dari kapitalis.

¹⁰ . Herlen Jervis. “*Tan Malaka, pejuang revolusioner atau manusia murtad?*” Ahli Bahas Wasid Suarto (Jakarta :Yayasan Masa, 1987)

Karya lain adalah Zulhasril Nasir, dalam karyanya yang berjudul “ Tan Malaka dan gerakan kiri Minang Kabau” karya ini menjelaskan hubungan revolusioner Tan Malaka dengan demokrasi Minang Kabau.¹¹ Karya ini sedikit mirip dengan penulisan ini akan tetapi bidikan ini lebih lanjut adalah menjelaskan tentang perbedaan ideologi Tan Malaka dengan tokoh pergerakan Minangkabau lainnya. Berarti karya ini tidak mencoba menunjukkan karakter latar belakang politik Islam Tan Malaka tapi menunjukkan secara budaya dan adat saja dan penulisan ini akan dibidik dalam pola politik Islam ala Tan Malaka.

Jadi sejauh penglihatan penulis, sampai saat ini sudah banyak yang meneliti tentang Tan Malaka sehingga membahas tentang Tan Malaka dengan pandangan politik Islam menjadi sesuatu yang sangat menarik dan memunculkan keunikan-keunikan baru, sehingga karya Tan Malaka sebagai bahan analisis sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam pemikiran politik Islam ala Tan Malaka yang berkembang di Indonesia saat itu.

E. Kerangka Teoritik

Berhubung kajian ini termasuk dalam wilayah politik, maka kajian ini tidak salah kalau dikaitkan dengan Fiqih Syasah (*Fiqih Syar' iyah*), dalam hal ini Abdurrahman Taj yang dikutip oleh Suyuti Pulungan mengatakan *Fiqih Syar' iyah* adalah hukum-hukum mengatur kepentingan negara dengan mengorganisir umat yang

¹¹ . Nasir, Zulhasril, “ *Tan Malaka dan gerakan kiri Minang Kabau*”(Yogyakarta : Ombak Pres 2007)

sejalan dengan jiwa sayariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafshili dan juz'i dalam al-Qur'an dan Sunnah.¹²

Dari definisi diatas, Asyafri Jaya Bakti mengambil asumsi bila umat Islam berpolitik, maka batu pijakannya adalah Syariah (*maqasyid syaria'ah*) maka langkahnya tidak menyalahi aturan yang digarisi oleh islam. Berbicara masalah Maqasidu Syari'ah yang dibicarakan adalah kemaslahatan.¹³ Sehingga menurut Abdul Wahab Khalab yang dikutip oleh Asyafri Jaya Bakti dalam kaitan ini menegaskan tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan sehingga tak satupun yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an maupun As-Sunnah mengandung kemaslahatan.¹⁴

Dengan demikian dikarenakan yang diteliti adalah Geneologi pemikiran politik, telaah terhadap konsep pemikiran politik, maka kajian ini termasuk kedalam Syasah Syar'iyah khususnya masalah dustrudiyah (tatanegara).

Berkaitan dengan hal ini muslim dalam memahami hubungan Islam dengan ketatanegaraan, terbagi atas tiga aliran. Pertama, berpendirian bahwa Islam bukan

¹² . Abdurrahman Taj, *Al-Syasah Al-Janayah Fi As-Syariah (Mishl Maktabah Dar Al-Arab* 1965), h. 10 Baca J Sututi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintah Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1996), h. 13

¹³ . Asrafi Jaya Bakti, *Konsep Maqasidu Syari'ah Menurut Asyatibi*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), h.64

¹⁴ . Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih (Mesir Dar Al-Arabi* 1968), h. 32 Baca Asrafi Jaya Bakti, *Konsep Maqasidu Syari'ah Menurut Asyatibi*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), h.60 Assyatibi, *Ushul Fiqih (Mesir Dar Al-Fikir Al-Arabi* 1955), h. 336

semata-mata agama dalam pengertian Barat.¹⁵Yakni hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan.Sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara.Kedua, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan kenegaraan.¹⁶Ketiga, aliran ini menolak dua pendapat diatas, aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat nilai etika bagi kehidupan bernegara.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peran penting dalam mencapai tujuan suatu penelitian.Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji sejarah pemikiran yang membidik pada ekspresi valuefree dalam saluran-saluran pola pemikir. Olehnya proses penelitian ini menggunakan metode.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka artinya penelitian ini difokuskan pada kajian pustaka.Suatu penelitian yang disumberkan dan difokuskan untuk

¹⁵ . Dr. M Diauddin Raiz. *Teori Politik Islam* (Jakarta Gema Issani 2001) h. 5

¹⁶ . H. Sirajjuddin. *Politik Ketatanegaraan Islam : Studi Pemikiran Hasyimi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2007), h. 20-21

¹⁷ . TH Sumartana. *Agama Dan Negara Perspektif Islam Katolik, Budha, Hindu, Konghucu, Protestan.* (Yogyakarta : Institut Dian/intervidei 2007), h.11

menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka berupa buku-buku karangan Tan Malaka.¹⁸

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian ini adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari buku-buku yang diamati dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Penelitian kualitatif dilakukan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami makna interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya metode deskriptif-analitis untuk mendeskriptifkan keberadaan makna yang tersirat dalam penelitian yang akan di analisis sehingga menjabarkan bagaimana kerangka filsafat politik Tan Malaka.²⁰

3. Teknis Pengumpulan Data

Data dalam penulisan ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi untuk mendapat data yang relevan, maka karya Tan Malaka dijadikan sumber primer atau rujukan pokok. Dan sebanyak-banyaknya judul tambahan tentang Tan Malaka

¹⁸ . Antor Baker Dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius 1990). H. 30

¹⁹ . lexi Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2007), h. 3

²⁰ . Winamo Surahmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Dan Teknik* (Bandung: Tarsito 1998), h.140

sebagai pemahaman yang lebih luas dan lebih berkembang, maka buku-buku atau informasi dari manapun yang terkait akan menjadi rujukan tambahan atau disebut *sekunder reference*.²¹

4. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini mengandung dua dasar filosofis yang berpengaruh pada penelitian, dua hal tersebut itu diantaranya, arkeologi pemikiran atau sejarah pemikiran yang berbasis teks dan antropologi kebudayaan.

Pertama, arkeologi sejarah dengan menggunakan pendekatan sejarah untuk meneliti aspek kehidupan manusia berupa aspek sosial, politik dan kebudayaan, sebagai asas dari pendekatan pemikiran berbasis artefak baik berupa tulisan atau benda.²²

Kedua, Antropologi kebudayaan, menyelidiki seluruh cara hidup manusia dengan akal dan struktur fisiknya yang unik untuk merubah lingkungannya dengan pengalaman dan pengajaran yang menjadi landasan hidup dari kebudayaan itu.²³

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh

²¹ . Ibid, h. 22

²² . Uka Tjandrasasmita. *Arkeologi Islam Nusantara* (Jakarta: Gramedia 2009), h. 217

²³ . Harsojo. *Pengantar Antropologi* (Bandung: Bina Cipta 1967), h. 19

data sebagai usaha untuk memberikan bantuan kepada hipotesis. Dari definisi tersebut Lexi Moleong menjabarkan bahwa proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uran dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.²⁴ Analisis data dalam penelitian kualitatif ini akan digunakan dua langkah verstehen dan induktif. Pertama, analisis verstehen adalah suatu metode penelitian dan objek nilai-nilai kebudayaan manusia, pemikiran dan makna gejala sosial yang bersifat ganda.²⁵

Kedua, Analisis induktif diterapkan manakala penelitian akan melakukan suatu proses penyimpulan setelah melakukan pengumpulan data. Analisis ini digunakan setelah data-data telah terkumpul dan dilakukan analisis, yaitu melalui sintesis dan penyimpulan dari umum ke khusus.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam kajian ini diuraikan menjadi beberapa bab serta sub bab untuk memudahkan dalam penulisan dan mudah untuk dipahami secara runtut. Adapun kerangka penulisan yang tersistematika sebagai berikut :

²⁴ . Lexy Moleang. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 103

²⁵ . Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma 2005), h. 71

²⁶ . Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma 2010), h. 186

Bab *pertama* pendahuluan, meliputi latar belakang yang merupakan deskripsi singkat dari kegelisahan akademik, rumusan masalah adalah pernyataan singkat dari kegelisahan akademik, tujuan penelitian adalah apa yang akan disumbangkan dalam penelitian ini baik bersifat akademik ataupun non akademik, tinjauan pustaka atau yang biasa disebut telaah pustaka ini digunakan untuk melihat penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya untuk menentukan relevan atau tidaknya sebuah penelitian, kerangka konseptual adalah kerangka teori-teori untuk menemukan teori baru, metode penelitian adalah cara bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan, sistematika rancangan konten dalam penelitian.

Bab *kedua* pembahasan, paradigma Islam kiri dalam wacana yang disajikan pasar dewasa ini, dan sekaligus membahas filsafat politik sebagai transpormasi memahami politik dari sisi ideologi baik secara Komunis, Kapitalis dan Islam.

Bab *Ketiga*, konsep Tan Malaka dalam berpolitik praktis lewat konsep yang ditawarkan pada public dengan karya terkenalnya Madilog untuk menumbuhkan ideologi dan ideologi ini memunculkan karakter gabungan dari dua ideologi yaitu Islam Komunis.

Bab *keempat*, menterjemahkan kerangka politik Tan Malaka yang ditulis dalam berbagai tulisannya sehingga semua gerak yang dilaksanakan Tan Malaka menjadi pikiran yang bersumber tentang ideologi Tan Malaka sebagai salah satu ideologi yang turut serta dalam praktek pemikiran politiknya dengan contoh masuknya ideologi komunisnya pada Islam Tan Malaka sehingga Tan Malaka keluar dari PKI dan membuat partai baru diantaranya adalah PARI, MURBA dan Persatuan Perjuangan.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir sebagai bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

POLIIK SLAM DI INDOESIA

A. Pengertian Politik Islam

Politik dan agama adalah sesuatu yang terpisah. Dan, sesungguhnya pembentukan pemerintahan dan kenegaraan adalah atas dasar manfaat-manfaat amaliah, bukan atas dasar sesuatu yang lain. Jadi, pembentukan negara modern didasarkan pada kepentingan-kepentingan praktis, bukan atas dasar agama. Pemerintahan yang berlaku pada masa Rasulullah dan khalifah bukanlah diturunkan Allah dari langit. Wahyu Allah hanya mengarahkan Rasul dan kaum muslimin untuk menjamin kemaslahatan umum, tanpa merenggut kebebasan mereka untuk memikirkan usaha-usaha menegakkan kebenaran, kebajikan, dan keadilan. Alquran sendiri tidak mengatur urusan politik secara khusus, tetapi hanya memerintahkan untuk menegakkan keadilan, kebajikan, membantu kaum lemah, dan melarang perbuatan yang tidak senonoh, tercela, serta durhaka. Alquran hanya meletakkan garis besar pada kaum muslimin, kemudian memberikan kebebasan untuk memikirkan hal-hal yang diinginkan dengan ketentuan tidak sampai melanggar batas-batas yang telah ditetapkan. Islam pada dasarnya adalah Siyasatullah fil Ardh. Maksudnya, dengan Islam inilah Allah mengatur semesta alam, yang diperuntukan kepada manusia. Islam itu secara substantif bersifat politis. Konteks pemberian amanah kepada manusia yang dimaksud di atas adalah Istikhlaf sebagai

konsep politik. Istikhlaf berarti "menjadikan khalifah untuk mewakili dan melaksanakan tugas yang diwakilkan kepadanya."

Untuk lebih memahaminya, perlu kita ingat kembali bahwa Allah memberikan manusia dua amanah :

1. Ubudiyah, yaitu untuk beribadah, penghambaan kepada Allah.
2. Amanah Kekhalifahan, hal ini lebih dekat kepada otoritas untuk mengendalikan kehidupan (di atas bumi).

Allah SWT berfirman, "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, ..." (QS. An Nur: 55)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي
شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

Dengan demikian, Islam secara substantif adalah siyasah, yaitu menghendaki agar ummat menjalankan kepemimpinan politik. Salah satu tujuan Islam adalah bagaimana agar bisa menerapkan kehidupan secara Islami dan agar sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi. Untuk itu perlu dilakukan suatu tindakan untuk merubah situasi saat yang masih jauh dari harapan ini agar mencapai tujuan di atas. Ada dua pendekatan dalam agenda perubahan tersebut (secara berurut):

1. Pendekatan secara kultural. Tersirat dalam firman Allah SWT pada Surat

Al Jumua' ayat 2, "Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata."

2. Pendekatan secara struktural. Pendekatan inilah yang lebih bersifat siyasi.

Jadi, ketika telah terbentuk masyarakat yang Islami secara kultural, maka dibutuhkanlah pemerintahan yang Islami. Contohnya dalam peristiwa Piagam Madinah. Ketika itu masyarakat Madinah sudah terkondisikan sebagai masyarakat yang Islami secara kultural. Kedua pendekatan di atas tidak dapat dipilah-pisahkan satu sama lain. Kedua hal di atas hanyalah terkait pada tahapan perubahan saja. Jadi, sebenarnya tidak ada istilah Islam kultural, dan Islam Politik. Islam itu adalah menyeluruh.

Kemudian Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *sasayasus-siyasah*. Yang berarti (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya) dan secara bahasa adalah cara pemerintahan Islam mengurus urusan rakyatnya, serta urusan negara, umat dan rakyatnya terkait dengan negara, umat dan bangsa lain. Urusan tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan: politik, sosial, ekonomi, pendidikan, keamanan, dll, yang mana pada masa Rasulullah SAW makna siyasah (politik) tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaannya. Lalu, kata

tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia; dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus (*siyasiyun*). Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa ulil amri mengurus (*yasûsu*) rakyatnya saat mengurus urusan rakyat, mengaturnya, dan menjaganya. Begitu pula dalam perkataan orang Arab dikatakan : yang artinya ‘Bagaimana mungkin kondisi rakyat akan baik bila pemimpinnya rusak seperti ngengat/rayap yang menghancurkan kayu. Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan (ri’ayah), perbaikan (ishlah), pelurusan (taqwim), pemberian arah petunjuk (irsyad), dan pendidikan (ta`dib).

Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya : *"Adalah Bani Israil, mereka diurus urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah"* (HR. Bukhari dan Muslim). Teranglah bahwa politik atau siyasah itu makna awalnya adalah mengurus urusan masyarakat. Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh kafir dari mereka. Untuk itu perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurus urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya, menasihati pemimpin yang mendurhakai rakyatnya, serta memeranginya pada saat terjadi kekufuran yang nyata (kufran bawahan) seperti ditegaskan dalam banyak hadits terkenal. Ini adalah perintah Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Berkaitan dengan persoalan ini Nabi Muhammad SAW bersabda :

"Siapa saja yang bangun pagi dengan gapaiannya bukan Allah maka ia bukanlah (hamba) Allah, dan siapa saja yang bangun pagi namun tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka ia bukan dari golongan mereka."
(HR. Al Hakim)

a. Pilar-pilar dasar dalam pemerintahan Politik Islam antara lain adalah :

1. Kedaulatan di Tangan Syara' (hukum Islam)
2. Kekuasaan di Tangan Umat
3. Wajib Membai'at Satu Khalifah

Struktur Pemerintahan dan Administrasi dalam sistem Khalifah Politik Islam :

1. Khalifah
2. Mu'awin Tafwidh/Mentri tapi tidak berhak membuat UU (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan)

Mu'awin Tanfidz (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi) Wali/Kepala Daerah.

3. Amir Jihad – Mabes Angkatan Bersenjata
4. Departemen Keamanan Dalam Negeri
5. Departemen Luar Negeri
6. Departemen Perindustrian
7. Departemen Kehakiman
8. Departemen Penerangan
9. Kemaslahatan Publik
10. Baitul Mal (rumah penyimpanan harta) Majelis Ummah/Dewan Perwakilan Rakyat

B. Sejarah Politik Islam Di Indonesia

Bagaikan suatu perjalanan sentimental, membicarakan Islam dan politik di Indonesia melibatkan kekhawatiran dan harapan lama yang mencekam. Daerah ini penuh dengan ranjau kepekaan dan kerawanan, sehingga pekerjaan harus dilakukan dengan kehati-hatian sekucupnya. Tapi berhati-hati tidaklah berarti membiarkan diri terhambat dan kehilangan tenaga untuk melangkah, sebab jelas pembicaraan harus dilakukan juga, mengingat berbagai alasan dan keperluan. Karena itu, untuk memulai kajian ini, kita bisa mengungkapkan hal-hal yang terjadi pada masa Orde Baru. Apakah yang didapati dalam Orde Baru? Ada beberapa hal yang mungkin diingkari mengenai Orde Baru, yaitu stabilitas sosial politik dan pembangunan ekonomi.²⁷ Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Presiden Soeharto memberikan optimisme politik yang besar kepada Natsir dan para mantan aktivis Masyumi. Optimisme itulah yang memotivasi mereka untuk merehabilitasi Masyumi, partai yang dibubarkan Soekarno 1960 akibat keterlibatan mereka dalam gerakan PRRI (*Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia*). Optimisme itu kandas ditengah jalan. Sebab ternyata pemerintah Oede Baru tidak merestui rehabilitas partai Islam itu. Karena seperti ditulis Wertheim, pemerintahan Orde Baru Soeharto lebih khawatir dan takut terhadap Islam dibandingkan dengan Soekarno.²⁸ Natsir semakin menyadari bahwa kebijakan-kebijakan awal politik Orde Baru memojokkan kalangan Islam

²⁷Dr. Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam*, Jakarta, cetakan kedua, PARAMADINA 2009, hal. 3

²⁸Drs. Ahmad Suhelmi, MA. *Dari Kanan Islam Hingga Kiri Islam*, Jakarta Timur, cetakan pertama, DARUL FALAH 2001, hal. 48

disatu sisi dan menempatkan kelompok kecil elite terdidik non-Muslim dalam posisi strategis dalam Negara. Bahkan ia melihat adanya usaha sistematis dan terarah untuk mengeliminasi umat Islam secara sosial, politik dan kebudayaan melalui fusi partai-partai Islam awal 1970-an, intervensi pemerintah yang besar dalam persoalan-persoalan internal dalam partai-partai Islam, perumusan rencana undang-undang perkawinan, dimasukkannya aliran kepercayaan dalam GBHN, pelarangan libur bagi pelajar dibulan suci Ramadhan dan lain-lain. Natsir juga mengamati strategi pembangunan ekonomi Orde Baru, yang sekalipun diakuinya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ternyata telah memperlebar kesenjangan sosial ekonomi antara orang kaya dan miskin. Yang kaya makin kaya dan miskin makin menderita. Mereka yang tergolong miskin itu sebagian besar adalah kaum Muslimin, sedangkan yang kaya adalah penduduk non-pribumi.²⁹

Setelah Orde Lama hancur, kepemimpinan Indonesia berada ditangan Orde Baru. Tumbangnya Orde Lama yang umat Islam ikut berperan besar didalam menumbangkannya, memberikan harapan-harapan baru kepada kaum Muslimin. Namun kekecewaan muncul di masa tersebut. Umat Islam merasa, meskipun musuh bebuyutannya, komunis, telah tumbang kenyataan berkembang tidak seperti yang diharapkan. Rehabilitasi Masyumi, partai Islam berpengaruh yang dibubarkan Soekarno, tidak diperkenankan. Bahkan, tokoh-tokohnya juga tidak diizinkan aktif dalam partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang didirikan kemudian.

²⁹Drs. Ahmad Suhelmi, MA. *Dari Kanan Islam Hingga Kiri Islam*, Jakarta Timur, cetakan pertama, DARUL FALAH 2001, hal. 49

Orde Baru memang sejak semula mencanangkan pembaruan sistem politik. Pada tanggal 26 November 1966, dengan sebuah amanat dari presiden disampaikan kepada DPRGR: RUU kepartaian, RUU pemilu dan RUU susunan MPR, DPR dan DPRD. Yang kedua dan ketiga ditetapkan 22 November 1969. sedang yang pertama terhenti. Pada 9 Maret 1970, fraksi-fraksi parpol di DPR dikelompokkan. Tiga tahun kemudian, parpol difusikan ke dalam PPP dan PDI (5 Februari 1973). Pada 14 Agustus 1975 RUU kepartaian disahkan. Penataan kehidupan kepartaian berikutnya adalah penetapan asas tunggal, Pancasila untuk semua parpol, Golkar, dan organisasi lainnya, tidak ada asas cirri, tidak ada ideologi Islam, dan oleh karena itu tidak ada partai Islam. Asas tunggal merupakan awal dari era baru peran Islam dalam kehidupan berbangsa ini. Peran politik (formal) Islam tidak ada lagi, tetapi sebagai agama yang mengaku tidak memisahkan diri dari persoalan politik, tentu peran itu akan terus berlangsung mungkin dengan pendekatan yang berbeda.³⁰

Meskipun umat Islam merupakan 87 persen penduduk Indonesia, ide Negara Islam secara terus menerus dan konsisten ditolak. Bahkan, partai-partai Islam, kecuali di awal pergerakan nasional, mulai dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan, selalu mengalami kekalahan. Malah dengan pembaharuan politik bangsa sekarang ini, partai-partai (berideologi) Islam pun lenyap.

Menjelang Pancasila diputuskan Sidang Umum MPR 1983 sebagai satu-satunya asas kekuatan politik itu, banyak kalangan yang melontarkan suara-suara

³⁰Dr. Badri Yatim, MA. Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008. hal. 270

kontra. Suara-suara itu makin tajam tatkala Pancasila pada akhirnya, bukan saja diputuskan sebagai satu-satunya asas bagi kekuatan-kekuatan politik, tetapi juga terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi keagamaan di Indonesia. Adalah sangat wajar kalau suara kontra itu banyak yang berasal dari umat Islam. Bukan saja karena latar belakang sejarah yang pernah dilaluinya, tetapi karena pada saat gagasan itu dilontarkan, sub-sub ideologi yang pernah ada di Indonesia sudah “terkena” gagasan itu. Hanya partai persatuan pembangunan (PPP), fusi dari empat partai Islam Parmusi, NU, PSII, dan Perti, yang masih mempunyai ideologi atau asas ciri, yaitu Islam.

Dengan pengasastunggalan, sebagian umat Islam menganggap bahwa penyalur aspirasi politik Islam hilang. Terdapat kekhawatiran di kalangan sebagian mereka terhadap ancaman sekularisasi politik dan kehidupan sosial di Indonesia. Kekhawatiran itu muncul dari perasaan keagamaan mereka. Ada anggapan bahwa dengan asas tunggal bagi kekuatan politik dan organisasi kemasyarakatan, identitas keislaman mereka akan semakin memudar. Amal usaha organisasi-organisasi keagamaan Islam pun dirasakan sia-sia.³¹ Untuk merumuskan situasi baru itu sekaligus memasyarakatkan kebijaksanaan tersebut, beberapa kalangan yang sejak semula tidak melihat kemungkinan lain, menyelenggarakan forum-forum yang berkenaan dengan aspirasi politik Islam. Dengan menyelenggarakan kebijaksanaan dan forum-forum tersebut dimaksudkan sebagai upaya modernisasi politik bangsa itu,

³¹Dr. Badri Yatim, MA. Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008. hal. 271

umat Islam diuntungkan karena dapat melepaskan diri dari ikatan primodialismenya, pindah dari dunianya yang sempit ke dunia yang lebih luas. Banyak pemikir Islam yang beranggapan, dengan ditariknya Islam dari level politik, perjuangan kultural dalam pengertian luas menjadi sangat relevan, bahkan mungkin dianggap justru lebih efektif.³²

Apa yang dimaksudkan dengan kebangkitan kembali Islam akhir-akhir ini bisa jadi merupakan hasil kerja dari organisasi-organisasi Islam yang ada. misalkan sejak dekade 1970-an, banyak bermunculan apa yang disebut intelektual muda Muslim yang meskipun sering kontroversial, melontarkan ide-ide segar untuk masa depan umat. Kebanyakan mereka adalah intelektual Muslim yang berpendidikan “umum”. Yang terakhir ini sangat mungkin adalah buah dari kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi mahasiswa Islam seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI, 1947) yang sangat dominan diperguruan tinggi umum, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan lain-lain.

Setelah berlakunya asas tunggal, umat Islam dengan segala keberaniannya telah melepaskan suatu wadah politik. Dengan lapang dada, mereka menerima Pancasila dan berharap dapat mengisinya dengan nilai-nilai agama. Mereka ingin agar pihak-pihak lain yang selama ini memandang curiga terhadap “Islam”, dapat mempercayai ulama-ulama dan tokoh-tokoh Islam lainnya.³³

³²Dr. Badri Yatim, MA. Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008. hal. 272

³³Dr. Badri Yatim, MA. Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008. hal. 275

1. Politik Pra Kemerdekaan

a. Masa penjajahan Belanda

Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 dengan tujuan berdagang dan mencari rempah – rempah. Kemudian, pada tahun 1602 ketika orang Belanda yang datang semakin banyak Pemerintah Belanda mendirikan perusahaan perdagangan yang diberi nama VOC.³⁴

Pada tahun 1755 VOC berhasil menjadi pemegang hegemoni politik pulau Jawa dengan perjanjian Giyanti yang menyebabkan raja kehilangan kekuasaan politiknya. Di tambah lagi dengan ikut campurnya pemerintah kolonial terhadap kehidupan keraton yang menyebabkan peran ulama sebagai penasihat keraton semakin tersingkir. Eksploitasi dan perampasan tanah dan sistem tanam paksa yang menyengsarakan rakyat terus di galakkan oleh pemerintah kolonial sehingga semakin membuat rakyat semakin ketakutan dan mencari sosok pemimpin non formal (ulama) ketika peran para raja sudah dinggap tidak bisa mengayomi dan melindungi mereka.³⁵

Akhirnya para ulama mendidik dan merekrut para santri dan masyarakat untuk dijadikan prajurit sukarela yang memiliki moral dan semangat berjihad untuk membela agama, bangsa dan negara. Mereka melakukan perlawanan dan pergolakan ,

³⁴Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara* (Jakarta : Gema Insani Pers, 1996), h. 126

³⁵Musyrifah Sunanto, *Sejarah peradaban Islam Indonesia* (Jakarta : P.T. Raja Grafindo, 2005), h.29

setidaknya ada empat kali peperangan besar yang melibatkan para Ulama dan santri seperti perang Cirebon (1802-1806), perang Diponegoro (1825-1830), perang Padri (1821-1838) dan perang Aceh (1873-1908) yang merupakan perang santri terlama sehingga Belanda menghadapi peperangan tersebut sampai akhir kekuasaannya, dimana para ulama tidak pernah absen melancarkan gerilya sampai tahun 1942.³⁶

Kemudian seiring perjalanan waktu para ulama menyadari bahwa perjuangan mereka tidak akan berhasil kalau melanjutkan cara-cara tradisional. Oleh karena itu perlu diadakan perubahan-perubahan yang walaupun berasal dari pengaruh kolonial sendiri, yaitu berjuang melalui organisasi-organisasi, baik bidang sosial pendidikan ataupun di bidang pergerakan politik.³⁷

Diantara organisasi pergerakan sosial yang berdiri untuk kepentingan ummat adalah:

-Pada tanggal 16 Oktober 1905 H.Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI)

-Pada tahun 1905 berdiri Jamiatul Khairiyah

-Pada tahun 1911 SDI berubah menjadi SI

-Pada tanggal 18 November 1912 K.H. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, dasar gerakan ini adalah Alquran dan Sunnah, anti taqlidisme, dan bid'ah dalam agama.

-Syekh Ahmad Syurkati mendirikan gerakan Al Irsyad

³⁶Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah* (Bandung: Mizan, 1995), h.240

³⁷Musyrifah Sunanto, *op.cit.*, h.33

-A.Hasan dan K.H. Zamzam mendirikan Persatuan Islam 17 september 1923 di Bandung

-Pada tanggal 31 Januari 1926 K.H.Hasyim Asy'ari mendirikan NU yang menitikberatkan pada kemurnian mazhab.

-Di Sumatera Barat berdiri PERTI pada tahun 1928

-Pada tanggal 30 November 1930 berdirilah Al Washliyah di Medan.

Organisasi Pergerakan Politik :

-Sarekat Islam menjadi Partai Sarekat Islam pada tahun 1923

-Permi (persatuan Muslimin Indonesia) didirikan sesudah Thawalib Sumatera

-Partai Arab Indonesia di bawah pimpinan AR. Baswedan didirikan untuk memperjuangkan tanah air bangsa Indonesia.

-Pada tahun 1937 terbentuklah MIAI yang di pimpin oleh K.H Mas Mansur dan K.H. Ahmad Dahlan.

b. Masa penjajahan Jepang

Tahun 1938-1945 terjadi Perang Dunia II antara Jerman, Italy, dan Jepang berhadapan dengan sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, Rusia, ditambah Amerika. Front Pasifik meletus tanggal 8 Desember 1941 ketika Amerika membuka front baru menghadapi Jepang yang menjatuhkan bom di Pearl Harbour, sebuah pangkalan militer Amerika. Hindia-Belanda (Nusantara) dibawah jajahan Belanda melalui pidato Ratu Wilhelmina mengumumkan perang kepada Jepang. Dengan demikian, tak heran kalau Hindia-Belanda menjadi salah sasaran Jepang. Satu persatu

wilayah Hindia-Belanda menyerah tanpa syarat. Pecahnya perang pasifik (1942-1945) mengakibatkan Belanda menyerah pada bulan Maret 1942 tanpa perlawanan berarti. Sampai tahun terakhir penjajahan Belanda, timbul kekecewaan mendalam dikalangan Islam karna semua tuntutan mereka ditolak oleh pemerintah kolonial. Belanda lebih banyak berunding dengan kelompok nasional sekular, yang dianggap wakil tunggal Indonesia.

Pada awal kedatangan Jepang, timbul simpati dan harapan baru bangsa Indonesia. Apalagi dalam siaran radio tokyo diumumkan bahwa tujuan perang pasifik adalah mengusir orang-orang kulit putih dari bumi Asia. Sebelumnya, Jepang banyak melakukan aktifitas internasional untuk menarik simpati bangsa-bangsa yang beragama Islam dan meniupkan slogan anti Barat.

Kebijakan pemerintah Jepang setelah mengambil alih kekuasaan Belanda adalah melarang semua kegiatan organisasi-organisasi politik yang ada dan berupaya membangun organisasi semi militer dengan menjalin kerjasama dengan golongan nasional sekuler maupun golongan Islam. Sebagai penjajah, Jepang jauh lebih kejam daripada Belanda, Jepang merampas semua harta milik rakyat untuk kepentingan perang, sehingga rakyat mati kelaparan. Tujuan mereka adalah menggagal masa untuk mendukung rezim pendudukan. Pada awalnya Jepang berminat membentuk sebuah perhimpunan organisasi politik melalui "Gerakan Tiga A", dibawah pimpinan Syamsuddin, bekas pimpinan Parindra, diharapkan dengan pembentukan organisasi ini, rakyat Indonesia akan membantu mereka dalam perang pasifik dan menyukseskan

propaganda “kemakmuran Asia Timur Raya”. Karena gagal mendapat dukungan rakyat, “Gerakan Tiga A” dibubarkan³⁸, sementara itu, MIAI tetap dipertahankan dan menjadi organisasi independen tanpa terikat pada organisasi lainnya.

Selanjutnya, sebagai ganti “Gerakan Tiga A”, Jepang membentuk Putera (pusat tenaga rakyat) dalam rangka menggalang massa, Ada hal yang menarik dari pembentukan Putera, hasil yang terpenting adalah meningkatnya kesadaran rakyat Indonesia, terutama keinginan mereka untuk mencapai kemerdekaan. Jepang menerapkan politik mendekati golongan Islam tetapi tidak terhadap kelompok nasional sekular, Jepang mendorong dan memberi prioritas kepada kalangan Islam untuk mendirikan organisasi dan menagakai kembali organisasi-organisasi Islam yang belum dibekukan, tetapi tidak membolehkannya bagi organisasi-organisasi nasional sebelum perang, Pada awal pendudukannya, Jepang membentuk kantor Departemen Agama yang disebut Shumubu yang dibentuk pada Maret 1942, ketua pertama seorang Jepang bernama Horie (1942) dan pada tanggal 1 Oktober 1943 Hosein Djajadiningrat diangkat menjadi kepala Shumuba, tanggal 1 Agustus 1944 digantikan oleh K.H. Hasyim Asy’ari tetapi tugasnya dilaksanakan oleh putranya K.H Wahid Hasyim.

Bertambahnya kekuasaan politik Islam dalam struktur pemerintahan ini meberikan pengalaman berharga. pemerintah Jepang membubarkan MIAI pada bulan Oktober 1943, karena dinilai anti Jepang dan tidak disukai Jepang karna tidak bisa

³⁸Abdul Azis Tabha, *Islam dan Negara*, (Bandung:Gema Insani Perss,1996),hal.144-147

dikendalikan, lalu Jepang membentuk organisasi federatif baru, Masyumi (Majelis Syura Muslim Indonesia) pada tanggal 24 Oktober 1943 menggantikan MIAI, dalam Masyumi semua organisasi Muslim tergabung, basis organisasi adalah semua organisasi yang tergabung di MIAI, Muhammadiyah, NU, dan Persis. Ketua pertamanya adalah K.H Hasyim Asy'ari dari NU dengan wakilnya K.H Wahab Hasbullah. Wondoamisino dari PSII bekas ketua MIAI. Masyumi dibentuk untuk mendukung pemerintah pendudukan Jepang, namun beberapa pemimpinnya berusaha melencengkan tujuan tersebut, dan upaya ini berhasil, tokoh-tokoh Masyumi tetap memegang peran politik penting meskipun Jepang telah bertekuk lutut kepada sekutu. Pemimpin Masyumi menjalin hubungan yang erat dengan Shumbu pemimpin kelompok Islam, selama 9 bulan pertama tahun 1944, golongan nasionalis sekular mengalami kemerosotan sehingga tidak mampu menyaingi Masyumi.

Menjelang proklamasi terutama setelah BPUPKI dibentuk, Jepang memberikan porsi yang lebih besar kepada golongan nasionalis sekular daripada golongan Islam, Jepang nampaknya lebih mempersiapkan golongan nasionalis sekular untuk memegang kendali politik Indonesia setelah kemerdekaan.

2. Masa Kemerdekaan Sampai Ke Masa Reformasi

Pada masa kemerdekaan, Umat Islam malah hampir tidak memiliki negara karena kebanyakan bangsa muslim ketika itu berada dibawah penjajahan bangsa-bangsa barat seperti Inggris, Portugis, Spanyol dan Belanda. Akan tetapi keinginan untuk mendirikan sebuah negeri sendiri tetap ada, karena itu didalam sejarah, umat

Islam melakukan perlawanan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa-bangsa barat. Demikian pula perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dalam menentang kolonialisme Belanda. Kehadiran bangsa-bangsa Asing di wilayah Indonesia menimbulkan dampak besar bagi kekuatan Islam yang diwakili oleh kerajaan-kerajaan Islam nusantara menghadapi kekuatan asing (barat) tidak dapat dihindarkan. Dari berbagai konfrontasi itu secara keseluruhan kerajaan-kerajaan Islam nusantara dapat dikalahkan sehingga secara sistematis mengalami deligitimasi politik yang berakhir dengan dijajahnya sebagian besar wilayah Nusantara

Jadi Sistem politik yang berkembang pada masa itu adalah sistem politik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam sebagai sebuah keyakinan akan kebenaran yang hakiki dan pemberi legitimasi dalam perjuangannya.

Berdasarkan hal tersebut maka tidak mengherankan apabila politik Belanda pada masa itu selalu diwarnai oleh kecurigaan, kewaspadaan dan ketakutan terhadap segala sesuatu yang berbau Islam, sehingga melakukan kebijakan yang sangat membatasi ruang gerak umat Islam. Pendekatan yang Islamophobia ini mengalami perubahan ketika Snouk Hurgronje menjadi penasihat kerajaan Belanda dengan membuat rekomendasi sebagai dasar kebijakan pemerintah Hindia Belanda yakni melakukan stabilitas keamanan dan menarik hati rakyat Indonesia dengan mendirikan sekolah-sekolah modern. Menurut pemerintah Belanda, Produk lembaga pendidikan ini adalah menciptakan pegawai negeri dengan tugas membantu Belanda dalam

mensosialisasikan nilai-nilai Barat. Hal ini menurut Hurgronye sebagai langkah yang paling efektif mengurangi dan pada akhirnya menghilangkan pengaruh Islam Indonesia. Akan tetapi kebijakan ini menjadi boomerang karena lembaga pendidikan tersebut melahirkan tokoh-tokoh yang memegang peranan penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda ini pula muncul berbagai organisasi Islam yang sangat berpengaruh seperti Sarekat Islam (SI), Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), Persatuan Islam (Persis), Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU).³⁹

Berbeda dengan Belanda yang menerapkan politik netral agama, menjelang perang Dunia II, Jepang menarik umat Islam di Indonesia dengan slogan anti Barat yang diharapkan dapat memberikan dukungan politik terhadap Jepang dalam perang Dunia II. Menurut Harry J. Benda perbedaan pola kebijakan Belanda dan Jepang terhadap umat Islam disebabkan oleh:

Pertama, yang menjadi sandaran politik kolonial Belanda kaum priyayi, sedangkan Jepang adalah golongan Islam dan nasionalis sekuler

Kedua, yang menjadi juru bicara pergerakan Nasional Belanda adalah pemimpin nasionalis sekuler sedangkan Jepang adalah Islam ketiga, Pemerintah Belanda cenderung tidak pernah memberikan kesempatan kepada golongan Islam sedangkan pemerintah Pendudukan Jepang justru sebaliknya. Akomodasi politik Islam pada masa Pendudukan Jepang didasarkan pada pertimbangan bahwa para

³⁹Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta:PT.Pustaka LP3ES Indonesia,1982),hlm.126.

ulama dan pemimpin Islam yang lain tidak saja dipandang Jepang sebagai pemimpin formal, tapi juga sebagai tokoh- tokoh masyarakat mayoritas Islam yang sangat berpengaruh.⁴⁰

Hal ini merupakan sebuah bentuk pengakuan terhadap peran pemimpin informal dibandingkan dengan pemimpin formal karena jumlahnya sangat besar dan mampu menggerakkan para pengikutnya dalam waktu singkat guna menghadapi perang dunia II. Salah satu bentuk perhatian Jepang terhadap golongan Islam ini adalah pemberian prioritas untuk mendirikan organisasi-organisasi Islam, yakni pada tanggal 10 september 1943 Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah di sahkan kembali mejadi organisasi Islam yang diakui oleh pemerintah pendudukan Jepang, disusul dengan perserikatan umat Islam dan Persatuan Umat Islam. Bahkan sebagai pengganti MIAI yang dibubarkan pada tahun 1943 yang dinilai anti Jepang,

Pemerintah Jepang mengizinkan pendirian organisasi gabungan dengan nama Masyumi (majelis Syuro Muslimin Indonesia), Masyumi dibentuk dalam Mukhtamar Islam Indonesia di gedung Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, Yogyakarta, tanggal 7-8 November 1945. Dalam Mukhtamar tersebut diputuskan bahwa Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam di Indonesia. Ketua Majelis Syura adalah Hasyim Asy'ari dan salah seorang wakil ketuanya adalah putranya, Wahid Hasyim, dengan pendukung utama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama [10] Janji kemerdekaan dalam waktu dekat yang diucapkan oleh perdana menteri Kuniaki Koiso didepan

⁴⁰Deliar, Noer *Partai – Partai Islam di Pentas Nasional*. (Jakarta : Grafiti Pers 1987) Hlm.77

parlemen Jepang pada tanggal 7 September 1944 diambil oleh Jepang karena semakin terdesak dalam perang Pasifik.

a. Kondisi Sosial Politik Negara Pada Masa Kemerdekaan.

Pasca pengakuan kedaulatan, bangsa Indonesia mengalami permasalahan ekonomi yang sangat kompleks. Misalnya inflasi tinggi, rusaknya infrastruktur, hutang negara meningkat, defisit anggaran, rendahnya investasi, dan lain sebagainya.

Langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah ekonomi pasca pengakuan kedaulatan, antara lain kebijakan pemotongan uang, konsep ekonomi nasional, program gerakan benteng, kebijakan Indonesianisasi, dan lain-lain.

Di bidang politik, sesuai dengan isi UUDS 1950, maka Indonesia menerapkan Demokrasi Liberal dengan sistem kabinet parlementer. Akibatnya muncul banyak partai politik. Di sisi lain sistem pemerintahan tidak stabil karena sering terjadi pergantian kabinet. Beberapa kabinet yang memerintah pada masa Demokrasi Liberal antara lain Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanudin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda.

Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dua tahap, yaitu 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Pemilu ini ternyata tidak mampu menciptakan stabilitas politik.

Konstituante yang diharapkan mampu menghasilkan UUD ternyata gagal, sehingga tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden

yang membubarkan Konstituante, menyatakan kembali ke UUD 1945, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Keluarnya Dekrit Presiden menjadi tonggak lahirnya Demokrasi Terpimpin.

Pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi beberapa penyimpangan terhadap Pancasila, dan UUD 1945 termasuk kebijakan politik luar negeri. Pembubaran DPR hasil pemilu, pengangkatan presiden seumur hidup, terbentuknya poros Jakarta-Peking, konfrontasi dengan Malaysia, sampai keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB merupakan sejumlah contoh dari penyimpangan tersebut.

b. Politik Islam dalam Pembentukan Negara pada Masa Kemerdekaan

Sebagai realisasinya maka dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 9 April 1944. Dalam pembahasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka terdapat dua golongan yang saling bertentangan yakni golongan Islam dan nasionalis Sekuler. Salah satu kepentingan umat Islam ketika itu adalah menjadikan Islam sebagai dasar negara. Tuntutan ini menimbulkan reaksi dari kelompok nasionalis sekuler, sosialis, dan nasrani yang pada masa itu merupakan mayoritas dalam BPUPKI. Kelompok tersebut mengajukan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk mengatasi permasalahan ini dibentuklah "Panitia Sembilan". Panitia ini terdiri atas lima orang dari golongan nasionalis sekuler dan empat orang dari golongan Islam. Berdasarkan keputusan dari "Panitia Sembilan" pada tanggal 22 Juni 1945 dicapai kesepakatan menambah tujuh kata dalam sila pertama Pancasila menjadi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan

syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Konsep ini kemudian disebut Piagam Jakarta. Piagam ini adalah sebuah kompromi politis ideologis antara golongan yang beraspirasi Islam dan kelompok nasionalis yang sebagian besar juga beragama Islam, akan tetapi menolak ide negara berdasarkan Islam.

Meskipun demikian UUD 1945 yang disyahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan ternyata menghapuskan tujuh kata dalam piagam Jakarta diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menetapkan pencasila sebagai dasar Negara. Umat Islam terpaksa mengalah dengan tuntutan kelompok pendukung Pancasila. Perubahan ini dipandang oleh sebagian orang sebagai kekalahan politik wakil-wakil umat Islam⁴¹, Pada era pasca kemerdekaan harapan untuk semakin berperan dalam politik tetap ada. Sarana perjuangan politik yang paling utama di era ini adalah melalui partai Masyumi, yang mewadahi dua kelompok besar, yaitu kelompok tradisional dan kelompok modernis. Di era Demokrasi Liberal (1945-1959) peran partai Masyumi cukup menggembirakan. Tetapi partai ini pecah menjadi dua setelah Nahdlatul Ulama (NU) yang pada awalnya merupakan sebuah organisasi keagamaan keluar dari masyumi dan membentuk partai baru pada tahun 1952. Pemilu pertama tahun 1955 yang dilaksanakan selama dua kali. Pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR sedang yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Pemilu tahun 55 ini telah menghasilkan empat partai besar pemenang pemilu yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI.

⁴¹Harry, J. Benda. *Bulan Sabit dan matahari terbit, Islam di Indonesia pada masa pendudukan Jepang*. (Jakarta : Pustaka Jaya, 1980). Hlm 88

Setelah pemilu tahun 1955 selesai, terjadi perkembangan politik yang cukup menarik. Pertentangan antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis sekuler mulai terlihat dalam majelis konstituante yang membahas tentang rancangan UUD perihal dasar negara yang akan digunakan. Pada saat itu ada tiga rancangan dasar negara yaitu Islam, Pancasila dan Sosial-ekonomi. Rancangan tentang sosial-ekonomi yang diajukan oleh partai buruh dan Murba hanya didukung oleh sebagian kecil anggota Majelis Konstituante sehingga akhirnya perdebatan didominasi antara golongan Islam dan Nasionalis sekuler yang mengajukan Pancasila sebagai dasar negara. Perdebatan tentang dasar negara ini berakhir setelah Bung Karno membubarkan Majelis Konstituante dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan menyerukan kembali pada UUD 1945 dengan tetap berdasarkan Pancasila⁴². Suasana di atas setidaknya menggambarkan dinamika pemikiran politik pasca kemerdekaan berkenaan dengan upaya untuk merumuskan kembali hubungan antara agama (Islam) dan Negara yang dapat diterima secara luas oleh bangsa Indonesia. Dalam beberapa peristiwa politik tampak bahwa upaya untuk membangun hubungan formalistik dan Legalistik antara Islam dan sistem politik negara selalu berujung pada kebuntuan dan pertentangan ideologis antara dua kelompok pemikiran politik di kalangan aktivis politik muslim yakni kelompok Islam dan kelompok nasionalis sekuler. Kelompok pertama menuntut dijadikannya Islam sebagai dasar negara sedangkan kelompok

⁴²Ma'rif Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3S, 1987), hal.108-109.

kedua menolak hubungan agama dan negara yang bersifat formalistik dan legalistik seperti yang dituntut oleh kelompok Islam.

Berdasarkan pengalaman sejarah umat Islam tersebut sejumlah tokoh dan ilmuwan muslim telah berusaha untuk merumuskan konsep-konsep dasar mengenai negara Islam Dalam perdebatan mengenai dasar negara tersebut. Menurut Mohammad Natsir Islam bukan semata-mata religi, yaitu agama dalam pengertian ruhaniah saja. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan antara sesama manusia. Islam merupakan pedoman dan falsafah hidup yang tidak mengenal pemisahan agama dan politik.

c. Peranan Islam dalam Konstituante

Pemimpin-pemimpin Islam Indonesia dari semua golongan menjelang Proklamasi telah berusaha agar pelaksanaan syariah diakui secara konstitusional dengan dicapainya suatu kesepakatan antara wakil-wakil Islam dengan para pemimpin Nasionalis yang netral agama melalui Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945. Piagam ini hanya berumur selama 57 hari, yakni sampai dengan tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai gantinya maka sila pertama Pancasila yang semula Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada saat itu juga Presiden Soekarno memberikan janji kepada umat Islam untuk menjadikan UUD 1945 bersifat sementara. Janji Presiden Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut sejalan

dengan janjinya terdahulu dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 ketika dia mengusulkan prinsip permusyawaratan sebagai salah satu sila dasar negara .

Pada tanggal 27 Januari 1953 Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan yang mengagetkan di Amuntai, Kalimantan Selatan, sebagaimana yang dikutip oleh H. Endang saifuddin Anshori ketika dia berkata: negara yang kita susun dan yang kita ingini ialah negara nasional yang melliputi seluruh Indonesia. Kalau kita dirikan negara berdasarkan Islam, maka banyak daerah-daerah yang penduduk-penduduknya tidak beragama Islam akan melepaskan diri, misalnya maluku, Bali, Flores, Timor, Kai dan juga Irian barat yang belum masuk wilayah Indonesia tidak akan mau ikut dalam Republik. (Anshari,1997 : 67) Pidato Soekarno ini mengandung banyak reaksi dan protes dari berbagai kelompok Islam diantaranya adalah dari Gerakan Pemuda Islam.

Usaha-usaha yang ditempuh untuk memperjelas apa yang menjadi pemikiran Soekarno tersebut secara detail dapat dilihat dalam diskusi yang dilakukan oleh A. Dahlan Ranuwiharjo, ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam yang menulis surat kepada Soekarno untuk meminta penjelasan tentang hubungan antara negara nasional dan negara Islam, dan antara Pancasila dan Ideologi Islam.⁴³

d. Politik Masa Orde Lama

Sejak masa demokrasi Terpimpin,Indonesia mengalami masa yang disebut Orde Lama,sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bahwa pada tanggal 10

⁴³Soekarno,Bung Karno,*Negara Nasional dan Cita-cita Islam* (Jakarta: Seridokumentar,2003),hal 103

Oktober 1956 ketika sidang Majelis Konstituante dibuka di Bandung, Soekarno menyatakan bahwa Demokrasi Parleментар perlu diganti Demokrasi Terpimpin. Walaupun mendapat tantangan dari kelompok Islam yang di pimpin oleh ketua Masyumi waktu itu (Muhammad Natsir)⁴⁴, juga dari PSII, serta Wakil Presiden Muhammad Hatta yang menyatakan ketidaksetujuannya. Situasi politik sejak saat itu semakin kacau, terutama masyarakat diluar Jawa. Simpati kepada Hatta cenderung menjadi sikap anti kepada pemerintah pusat Jakarta. Kekecewaan juga berkembang di daerah akibat tidak adanya perhatian pusat pada pembangunan daerah penghasil devisa. Tanggal 15 Februari 1958, pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dibentuk,

Majelis Konstituante hasil pemilu 1955 mulai bersidang di Bandung 10 November 1956 dengan tugas merumuskan UUD. Seperti diketahui, UUD 1945 yang menjadi landasan proklamasi telah diganti Konstitusi RIS tahun 1950, UUD masih bersifat sementara. Karena tidak ada rancangan UU yang rapi, maka muncul perdebatan. Namun demikian, selama dua tahun masalah yang menyangkut bentuk negara, sistem parlementer, kekuasaan kepala negara, dapat rampung, tetapi menyangkut dasar negara terjadi perdebatan yang sangat sulit, kesepakatan sulit dicapai mengenai dasar negara apakah didasarkan kepada pancasila atau dasar islam .

Perdebatan muncul lagi pada BPUPKI yang akan merumuskan rancangan UUD sebagai persiapan menghadapi Indonesia merdeka. Dalam majelis konstituante

⁴⁴Deliar Noer, *Partai-partai Islam di Pentas Nasional 1945 - 1965*, (Jakarta:PT.Pustaka Grafiti,1987), hal. 354.

1955, mencoba untuk menyalurkan aspirasi secara demokratis untuk membentuk suatu negara. Apakah negara ini Republik Islam Indonesia atau cukup Republik Indonesia saja, tuntutan dalam Majelis Konstituante dengan sebab sebagai berikut:

- Islam adalah sebuah konsep yang utuh yang tidak membedakan negara dan masyarakat
- Islam telah tampil dalam sejarah Indonesia dalam proses terbentuknya negara dan bangsa sejak zaman sultan beserta ulama-ulama melawan kolonial.
- Kenyataannya bahwa secara kuantitatif masyarakat Indonesia adalah Islam.

Ketiga faktor ini memberikan suatu realitas dan legalitas tuntutan umat Islam itu menjadi sangat wajar, akan tetapi ketika struktur itu diajukan untuk memperoleh konfirmasi politik keadaannya menjadi lain, hasil pemilu tiga partai Islam (Masyumi, NU, dan Perti) hanya memiliki 44%, kelompok Pancasila 56%. Kondisi ini juga tidak akan berhasil mencapai kuorum karena menurut peraturan untuk menetapkan UUD harus menerima sekurang-kurangnya mencapai $\frac{3}{4}$ atau 67%. Oleh karena itu muncul usulan kembali ke UUD 1945.

Dalam Demokrasi Terpimpin, Soekarno membuat slogan-slogan politik, Pancasila menjadi Trisila, diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Dalam Demokrasi Terpimpin, Soekarno bertindak layaknya sebagai sultan-sultan dalam sejarah lama, seluruh kehendaknya mesti dituruti, Masyumi melakukan oposisi, sehingga keadaan Masyumi semakin kacau ketika Presiden Soekarno mengeluarkan PenPres No.7 tahun 1959 mengenai hak hidup partai yang terlibat

pemberontakan. Pada Agustus 1960 Presiden mengeluarkan PenPers No.200 tahun 1960 yang mendesak pimpinan Masyumi untuk membubarkan partainya. Tanggal 13 September pemimpin pusat Masyumi menyatakan pembubaran partai, dengan pembubaran Masyumi sebagai partai yang berciri khas Islam merupakan titik awal proses transformasi sosial politik Indonesia ke arah negara dan birokrasi, dimana kepemimpinan dan kutub-kutub kekuatan politik tidak lagi bersandar pada kekuatan Islam, dengan demikian, terjadi perubahan politik ulama, dari politik praktisi ke arah pembinaan umat melalui pendidikan, selain itu melalui dakwah lewat organisasi sosial dan sekolah-sekolah seperti yang dilakukan oleh M. Natsir, Farid Prawiranegara serta pemimpin Masyumi lainnya. Berpindahannya sistem demokrasi Parlemen ke demokrasi Terpimpin berarti berpindahnya kekuasaan dari parlemen ketangan satu orang, yaitu Soekarno. Perubahan itu sesuai dengan tradisi budaya Indonesia, terutama Jawa, yang semua kekuasaan, politik, ekonomi, terpusat ditangan seorang raja.

Pada Demokrasi Terpimpin, Masyumi dan PSII dibubarkan. Akan tetapi masih ada wakil umat Islam di parlemen yaitu: NU, meskipun NU mengikui kehendak Soekarno, tetapi NU dapat menandingi PKI, Kalau PKI membuat Lekra, NU membuat lembaga seni budaya muslim (Lesbumi), dalam perburuhan, PKI punya Sobsi, NU punya Serikat Buruh Muslim Indonesia (Serbumusi). Sejumlah organisasi khusus, organisasi pelajar dan mahasiswa seperti IPNU, PMII, juga untuk mengimbangi kekuatan PKI, NU, PSII, dan Perti mendirikan organisasi seperti HMI, PII, Pemuda Muhammadiyah, serta IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah).

Tahun 1964, PKI melancarkan melancarkan aksi mereka merebut tanah perkebunan, tanah wakaf, melakukan penggerebakan, dan penganiayaan. Tahun 1965, terjadi pemberontakan antara orang-orang PKI, dan Islam antara komunis dengan kaum santri, sehingga menimbulkan kekacauan dimana-mana.

Dalam kondisi ekonomi dan politik tidak menentu, tersia kabar bahwa Soekarno sakit, D.N.Aidit telah menyusun suatu rencana melakukan tindakan kekerasan, sasarannya adalah para pemimpin angkatan darat dengan desas desus bahwa dikalangan angkatan darat telah dibentuk Dewan Jendral yang akan melakukan kudeta terhadap Soekarno, Pada tanggal 30 September malam, dibawah koando Syam, ketua biro khusus CC PKI, Kolonel untung dan pasukannya melakukan penculikan pembunuhan sejumlah Jenderal Angkatan Darat di Jakarta, peristiwa ini terkenal dengan G30S PKI.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 diadakan pertemuan antara HMI, Pemuda Muhammadiyah, PII, dan PMRI. Dalam pertemuan ini disepakati untuk mengadakan kerja sama menghadapi kemungkinan perebutan kekuasaan yang terjadi akibat G30S PKI. Muhammadiyah mendorong umat Islam untuk melakukan jihad melawan PKI.⁴⁵ G30S PKI adalah suatu pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, terjadinya peristiwa G30S PKI merupakan titik klimaks dari pertentangan ideologi yang sangat tajam di zaman Demokrasi Terpimpin., Tahun 1966, aksipemuda, mahasiswa dan

⁴⁵Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,), hal.67-75

pelajar bersama ABRI berhasil menurunkan Soekarno dan membubarkan PKI serta melarang seua ajaran komunis di Indonesia.

e. Politik Islam Masa Orde Baru

Sejak terjadinya G30S PKI tahun 1965, kedudukan Soekarno semakin kritis yang mengakibatkan ia harus mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) untuk menugaskan Soeharto mengambil segala tindakan guna menyelamatkan negara, yakni membubarkan PKI dan menangkap semua menteri yang terlibat. Pada Bulan Juni 1966 MPRS mengadakan sidang umum ke IV yang menetapkan SUPERSEMAR sah di mata hukum dan mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Hal ini mengakibatkan konsensus nasional dimana semua kelompok partai mesti berpegang kepada Pancasila dan UUD 1945.

Di Kalangan Umat Islam , kemenangan terhadap G30S PKI dianggap sebagai kesempatan untuk merehabilitasi Masyumi sehingga bisa memperjuangkan Islam melalui jalan politik. Akan tetapi Orde Baru menolak. Sebagai gantinya, tanggal 20 Februari 1968, Surat keputusan presiden No 70/68 mengesahkan partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Kemudian muncul penyederhanaan partai yang di kelompokkan menjadi beberapa kelompok seperti :

-Kelompok Nasionalis (PNI, IPKI, Murba) menjadi Partai Demokrasi Indonesia(PDI)

-Kelompok Spiritual (NU , PMI (Parmusi) PSII ,Perti, Parkindo dan Khatolik di lebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) .Belakangan karena Parkindo dan Katolik berbeda agama maka mereka berafiliasi dengan nasionalis.

-Golongan Karya.

Pada masa orde baru, umat Islam berhasil menggalang persatuan, sehingga pada pemilu tahun 1971 perolehan kursi partai mendapat 94 kursi. Dan pemilu tahun 1977 PPP meraih 99 kursi namun dikarenakan menghadapi pembagian kursi di DPR/MPR dan sikap politik yang berbeda sehingga menimbulkan ketegangan.Akibatnya, pada pemilu 1982 perolehan kursia PPP menurun dan pembagian kursi NU merasa dirugikan.Akibatnya, dalam mukhtamar ke-24 tahun 1984 NU keluar dari PPP dan kembali ke organisasi sosial.Sehingga pada pemilu tahun 1987 PPP mengalami ke merosotan yang luar biasa.

Menjelang di berlakukannya asas tunggal, semula umat islam banyak yang cemas karena UU no 8/ 1985 mewajibkan semua ormas mencantumkan asas tunggal yang berarti dilarang mencantumkan asas lain sebagai ciri khas atau identitas sendiri. Akibatnya, partai Islam PPP harus bengahapus asas islamnya dan menjadi partai nasionalis tanpa ciri islam. Sementara sikap NU sejak dini bisa menerima pancasila sebagai asas tunggal.Sedangkan dalam muhammadiyah lebih berhati-hati dalam menerima asas tunggal tersebut.

Sesudah asas tunggal diterima oleh umat islam, umat islam mulai berjuang untuk mengatasi berbagai macam masalah, seperti:

1. Monopoli pengelolaan perjalanan haji.
2. Pelaksanaan hukum islam (RUU perkawinan).
3. Masalah antara umat dengan pemerintah yang semakin berkembang, sehingga memunculkan MUI pada tahun 1975.
4. Masalah ekonomi pemerintah membuat Bazis (badan amil zakat infaq shodaqoh) kemudian dibentuk juga koperasi-koperasi umat dan bank perkreditan rakyat, seperti NU mendirikan bank Nusuma dan Muhammadiyah mendirikan bank Matahari. Selanjutnya berdiri lah bank islam pertama tanpa bunga, yakni bank Muamalat Namun, Soeharto adalah seorang yang dikatakan melanjutkan politik Snouck Hurgronje yang berpendapat bahwa umat islam harus diberi fasilitas, sehingga umat tersebut berkembang dalam bidang sosial keagamaan saja tetapi dibidang politik tidak di beri kesempatan. Soeharto dalam pemerintahannya semakin jauh kearah kekerasan. Partai politik pemerintah, Golkar merekayasa pemilu tahun 1971 dan meraih 63 suara. Golkar menarik pendukung dari mantan komunis, PNI, masyumi dan NU sehingga menyebabkan Golkar semakin kokoh mendominasi kekuatan politik. Kemudian Soeharto dengan kekuatan ABRI nya merekayasa segala macam cara sehingga dapat berkuasa selama 32 tahun. Akibatnya KKN merajalela, hutang negara dalam jumlah besar, dan hancurnya etika nasional. Sehingga negeri dan bangsa ini mengalami kebangkrutan dan kebobrokan moral.

Pada 19 mei 1998 terjadi unjuk rasa besar-besaran oleh mahasiswa yang menduduki gedung DPR/ MPR dan menginginkan agar Soeharto turun dari

jabatannya. Akhirnya pada 21 Mei 1998 Soeharto resmi mengundurkan diri dan digantikan oleh BJ Habibie yang menjadi wakil presiden pada masa itu.⁴⁶

f. Politik Islam Masa Reformasi

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan korup membawa harapan munculnya pemerintahan pasca orde baru yang demokratis. Hal itu tercermin dari kebebasan mendirikan partai politik. Tercatat ada 48 partai baru yang mengikuti pemilu 1999. Termasuk di dalamnya partai Islam. Keadaan ini juga mempengaruhi ulama untuk kembali aktif di dunia politik dengan terjun langsung untuk memenangkan partai tertentu sesuai dengan posisinya. Seperti kampanye pemilu 1999 ada beberapa Ulama NU yang membela partai PKB.

Selain Ulama-Ulama NU, ulama yang berasal dari Muhammadiyah dan generasi muda Masyumi yang turut andil dalam pembentukan partai. Mereka ada yang bergabung dengan PAN dan PBB. Pendukung PAN lebih banyak berasal dari Muhammadiyah, sedangkan PBB ingin membangkitkan kembali perjuangan Masyumi. Para mahasiswa dan halqah kampus turut mendirikan partai Islam, yaitu Partai Keadilan (belakangan PKS) yang menarik sebagian ulama yang merupakan alumnus Timur Tengah.

Belakangan, dua partai, PKB dan PAN menyatakan diri sebagai partai yang berasaskan Pancasila dan bersifat nasionalis, tetapi basisnya adalah massa Islam.

Kehadiran ulama dalam politik seharusnya berdampak positif, dalam pengertian memberikan sumbangan bagi terciptanya bangunan struktur politik yang

⁴⁶Musyrifah Sunanto, op.cit., hlm. 76-88

bermoral, karena ulama adalah simbol moral. Namun ketika Ulama sudah terpolarisasi sedemikian rupa, sehingga sering antara seorang ulama dengan ulama lain saling berhadapan dan membela partainya masing masing. Kondisi ini akan menimbulkan perpecahan dan dampaknya membingungkan rakyat, sehingga akan memperlemah kekuatan umat Islam sendiri yang akhirnya sering di manfaatkan oleh golongan partai lain.⁴⁷

⁴⁷Ibid.,hlm.89-91

BAB III

BIOGRAFI TAN MALAKA

A. SEJARAH SINGKAT TAN MALAKA

Tan Malaka, dilahirkan dengan nama Sutan Ibrahim pada tahun 1897⁴⁸ di Nagari Padan Gadang, Suliki, Luhak Lima Puluh Koto, Sumatra Barat. Sebagaimana yang ditulis dalam banyak literatur, kebudayaan Minangkabau sangat kental dengan nuansa Islami. Hal ini dibuktikan dengan semboyan adat minang yaitu; “*adat basandi syara’, syara basandi kitabullah*”. (adat bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan kitabullah). Tidak terkecuali Tan Malaka, dia lahir dari keluarga muslim yang taat. Tan Malaka menggambarkan keadaan keluarganya dengan menulis:

“sumber yang saya peroleh untuk pasal ini (agama Islam) adalah sumber hidup. Seperti sudah saya lintaskan dahulu, saya lahir dalam keluarga Islam yang taat. Ketika sejarah Islam di Indonesia bisa dikatakan masih pagi, diantara keluarga tadi sudah lahir seorang alim ulama, yang sampai sekarang dianggap keramat. Ibu-Bapak saya keduanya taat, takut pada Allah, dan menjalankan sabda Nabi. Saya saksikan Ibu saya sakit, menentang malaikat maut sambil menyebut juz Yasin berkali-kali dan sebagian besar isi AlQur’an diluar kepala. Dikabarkan orang, Bapak saya didapati pingsan dengan setengah badannya dalam air. Dia mau menjawat air

⁴⁸ Mengenai kelahiran Tan Malaka, Poeze mencatat beragam data mengenai tahun kelahirannya: 1893, 1894, 1895, 2 Juni 1896, 2 Juni 1897, 1899, berdasarkan daftar penduduk Bussum 1919, Tan Malaka menulis hari kelahirannya 14 Oktober 1894, tetapi berdasarkan fakta pada tahun 1903 Tan Malaka mengikuti pendidikan di sekolah rendah maka Poeze berasumsi kurang lebih usia Tan Malaka ketika itu 6 tahun, maka lebih tepat jika dikatakan tahun kelahiran Tan Malaka adalah tahun 1897. lihat Harry Poeze, *Tan Malaka...I, op.cit.*, hlm. 12

sembahyang, sedang menjalankan tarikat. Setelah sadar, dia mengatakan dia berjumpa dengan saya yang pada waktu itu di negeri Belanda. Masih kecil sekali saya sudah bisa tafsirkan AL-Qur'an dan dijadikan guru muda. Ibu menceritakan soal Adam dan Hawa dan Nabi Yusuf. Tidak jarang dia kisahkan pemuda piatu Muhammad bin Abdullah, yang entah karena apa, mata saya terus basah mendengarnya.”⁴⁹

Keterangan mengenai masa kecil Tan Malaka dituturkan oleh Kamardi Rais dt. P Simulie⁵⁰ yang didapat dari wawancara dengan pak Said sebagai berikut: “Otaknya cerdas, pandai mengaji, dan *kaji perukunan* (rukun sembahyang) dapat dihapal dengan cepat oleh Tan Malaka, begitu juga *sifat dua puluh* dan lain-lain. Saya mengaku kalah dengan Tan Malaka...di sekolah pun Tan Malaka murid yang pandai...kemudian kami kehilangan Tan Malaka karena ayahnya yang Tuan Pakuih (maksudnya tuan Pakhuismesteer atau kepala gudang kopi di Koto VII Tanjung Ampalau, dekat Kumanis) memindahkan Tan Malaka untuk bersekolah disana. Beberapa tahun kemudian dia pindah lagi ke Sariak Alahan Tigo tersebut.”⁵¹

Tan Malaka hanya memiliki seorang adik laki-laki, Komaruddin, usianya kurang lebih 5 sampai 6 tahun dibawah Tan Malaka.⁵² Dalam tradisi Minangkabau, yang menganut paham matriaktat, anak perempuan adalah harapan keluarga sebagai penerus sejarah keluarga. Dalam satu keluarga jika tidak memiliki keturunan

⁴⁹ Tan Malaka, *Madilog...op.cit.*, hlm. 381-382

⁵⁰ Ketua Umum Pucuk Pimpinan LKAAM dan mantan ketua PWI Sumatra Barat.

⁵¹ Pak Said adalah teman kecil Tan Malaka, teman samagedang (besar). orang kampung biasa memanggilnya “*Pak Saik*”. Lihat Kamardi Rais dt. P Simulie, *Mencari dan Menemukan Kembali Tan Malaka...op.cit.*, hlm. 54

⁵² Harry A. Poeze, *TanMalaka...I, op.cit.*, hlm. 12

perempuan berarti garis keturunan keluarga terputus. Tan Malaka mengetahui benar kondisi adat nya, sehingga dalam autobiografi nya Tan Malaka menulis : “Ibu Minangkabau biasanya merasa ditimpa kemalangan, kalau tidak mempunyai anak perempuan. Di Minangkabau, adat asli yang mewarisi rumah, sawah, ladang, ternak, dan harta pusaka yang lainnya adalah anak perempuan. Sunyilah rumah di Minangkabau, kalau tak ada anak gadis, calon ratu di rumah pekarangan serta sawah ladangnya. Kesedihan Ibu yang terpendam dalam sanubarinya ialah tak mempunyai anak perempuan itu. Kami berdua anak laki-laki tak memenuhi peraturan “matriarchaat”. Peraturan berpusat pada kewanitaan. Ibu selalu merasa sunyi dari wanita lain di Minangkabau. Kalau ditinggal anak laki-laki pun yang sebenarnya perkara bisa buat orang di Minangkabau yang terkenal sebagai orang perantau.”⁵³

Kebudayaan dan falsafah Minangkabau yang kental dengan nuansa Islam sangat nampak dalam pribadi Tan Malaka, pemikiran-pemikirannya kelak dapat dilihat dalam frame antropologis. Sebuah penelitian dengan pendekatan ini ditulis oleh Rudolf Mrazek dengan judul *Tan Malaka, A Political Personality's Structure of Experience*, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Semesta Tan Malaka*. Mrazek, mencoba mengeksplorasi sejarah hidup dan segala pemikiran Tan Malaka dengan asumsi, mengikuti Clifford Geertz, kebudayaan sebagai “akumulasi totalitas”. Pendidikan formal yang ditempuh Tan Malaka bermula

⁵³ Tan Malaka, *Dari Penjara Ke Penjara I*, Teplok Press, Jakarta, 2000, hlm. 143. lihat juga Poeze, *Ibid*, hlm. 12-13

dari kampungnya sendiri, Suliki, Padan Gadang, Sumatra Barat,⁵⁴ kemudian dia melanjutkan pendidikan sekolah kelas duasekitar tahun 1903 hingga 1908. karena keinginan Tan Malaka terhadap pendidikan maka usai mengenyam pendidikan di sekolah kelas dua Tan Malaka melanjutkan pendidikannya di sekolah guru *Kwekschool Ford De Kock*⁵⁵. Di sekolah ini kecerdasan dan kepiawaian Tan Malaka dalam berbagai pelajaran sangat nampak sehingga para guru-guru sangat bersimpatik padanya. Seorang guru Belanda, Horensma,⁵⁶ yang ketika itu menjabat sebagai guru bantusangat terkesan pada Tan Malaka, ditambah lagi keluarga Horensma tidak memiliki keturunan, sehingga Horensma dan istrinya menganggap Tan Malaka sebagai anaknya sendiri.

Pada sekolah guru Tan Malaka termasuk murid yang periang, dia banyak disukai oleh teman-temannya. Hampir semua kegiatan sekolah dia ikuti terutama kegiatan ekstra seperti sepak bola dan musik. Tan Malaka bergabung dalam orkes sekolah guru dan dalam orkes eropa di Fort De Kock yang keduanya dibawah bimbingan Horensma langsung. Dalam kesibukannya mengenyam pendidikan di sekolah guru inilah tepatnya pada bulan Juni tahun 1921 Tan Malaka harus kembali ke kampung

⁵⁴ Safrizal Rambe, *Pemikiran...op.cit.*, hlm. 20

⁵⁵ Sekolah –sekolah pendidikan rendah ketika itu tidak begitu banyak, hanya ada dua sekolah, sekolah pemerintah kelas satu dan kelas dua. Sekolah kelas satu diperuntukkan bagi anakanak kaum priayi dan dipersiapkan untuk sekolah lanjutan. Sedangkan sekolah kelas dua hanya memberi pendidikan yang *rudemmenter* saja. Harry Poeze, *Tan Malaka...I, op.cit.*, hlm. 13

⁵⁶ Sekolah Guru Negeri untuk Guru-Guru Pribumi (*Kwekschool Ford De Kock*) yang berada di Bukittinggi merupakan satu-satunya lembaga untuk pendidikan lanjutan bagi orang Indonesia di Sumatra. Didirikan pada 1856. sekarang sekolah ini menjadi SMA 2 Bukittinggi. lihat Poeze, *Ibid*, hlm. 17, lihat juga Safrizal Rambe, *Ibid*, hlm. 21, lihat juga Hasan Nasbi, *Filosofi...op.cit.*, hlm. 42.

halamannya untuk diangkat menjadi kepala suku (penghulu) disana dengan gelar “Datuk Tan Malaka”⁵⁷.

Setelah acara pemberian gelar adat berlangsung Tan Malaka kembali melanjutkan pendidikannya di sekolah guru *kweekschool* hingga selesai. Pada akhir tahun 1913 Horensma mengusulkan kepada Tan Malaka dan keluarganya agar Tan Malaka dapat melanjutkan sekolah ke negeri Belanda. Dan usul itu diterima baik oleh keluarga Tan Malaka. Pada tanggal 1 Desember tahun 1913, bersamaan dengan keluarga Horensma, Tan Malaka tercatat dalam daftar penduduk Amsterdam.⁵⁸ Tetapi karena adanya berbagai pertimbangan mengenai penerimaan Tan Malaka di sekolah Belanda maka penerimaan Tan Malaka baru tercatat sebagai murid di sekolah *Rijks Kweekschool* Haarlem pada 10 Januari 1914.⁵⁹

Mengenai pengalamannya di sekolah *Rijks Kweekschool* ini Tan Malaka menceritakan:

“adapun para murid *Rijks Kweekschool* Haarlem itu mendapat ongkos belajar dari Pemerintah Belanda seperti para murid *Kweekschool* Bukittinggi juga. Persamaan

⁵⁷Biasanya pemberian gelar *penghulu* disertai dengan pertunangan yang telah diatur oleh orang tua. Tetapi Tan Malaka menolak untuk dipertuangkan dengan alasan dia ingin melanjutkan pendidikan di negeri Belanda. Lihat Poeze, *Ibid*, hlm. 23. “Tan Malako” sebenarnya adalah gelar *sako* adat atau gelar seorang penghulu dalam persukuan Koto, Nagari, Padan Gadang. Ada tiga priode Datuk Tan Malako sebelum sampai ke Ibrahim. Datuk Tan Malako yang pertama itulah yang “malaco” Nagari, Padan Gadang pada penghujung abad 18, sekitar 1789. Datuk Tan Malaok yang pertama ini datang dari Kamang, Luhak Agam. Bersama dua kemenakannya membuka Negeri Padan Gadang. Lihat Kamardi Rais dt. P Simulie, *Mencari dan Menemukan Kembali Tan Malaka...op.cit.*, hlm. 55

⁵⁸Menurut data yang diperoleh Poeze, Tan Malaka dan Horensma tinggal dengan keluarga Van Bilderbeek sejak 15-12-1913 sampai 2-2-1914. *Ibid*, hlm. 25

⁵⁹*bid*, hlm. 28 lihat juga Safrizal Rambe, *Pemikiran...op.cit.*, hlm. 21

lain dia antara dua Kweekschool itu jarang sekali dapat dicari. Riijs Kweekschool di Haarlem mendidik muridnya menjadi guru untuk anak Belanda, dalam bahasa Belanda, pada hakekatnya buat anak Belanda. Kweekschool Bukittinggi melatih guru buat anak Indonesia, terutama dalam bahasa Indonesia, untuk Hindia Belanda...pada waktu permulaan di Riijs Kweekschool Haarlem, dengan sedih sekali saya saksikan, bahwa pelajaran yang sudah saya terima di Kweekschool Bukittinggi sama sekali tidak sambung menyambung dengan apa yang diberikan di Riijs Kweekschool itu. Betul, umpamanya sama-sama diajarkan ilmu-ilmu tumbuh-tumbuhan, akan tetapi tumbuh-tumbuhan yang mesti diperiksa dan diajarkan di negri Belanda tiadalah sama dengan di Indonesia. begitu juga kiranya dengan ilmu bumi, ilmu mendidik (pedagogie), ilmu menggambar, ilmu ukur (meetkunde) dan lain-lain. Ada pula ilmu yang sama sekali mesti dipelajari dari permulaan seperti sejarah Belanda, sejarah dunia, Aljabar, ilmu ukur ruang (stereometrie), trigonometrie, dan ilmu kodrat (mechanica). Sebaliknya ada pula pengetahuan yang sudah saya pelajari di Bukittinggi tetapi tiada diajarkan atau cuma sedikit sekali diajarkan di Haarlem, ialah ilmu pisah dan ilmu pertanian. Yang terakhir dan terpenting buat guru Belanda, tentulah bahasa Belanda. Sepintar-pintar orang Indonesia dalam mempelajari bahasa asing, maka pemuda Belanda berumur 14-20 tahun, tentulah lebih paham bahasa ibu dan masyarakatnya daripada orang Indonesia yang Cuma beberapa jam sehari menerima pelajaran bahasa Belanda di kelasnya selama 6 tahun. Tetapi tiada berarti

bahwa dalam hal ilmu saraf (grammar) saya akan kalah saja oleh murid kelas tertinggipun.”⁶⁰

Pengalamannya selama berada di negeri Belanda turut membentuk pandangan hidup dan haluan politiknya kelak. Banyak kejadian yang Tan Malaka alami selama di negeri Belanda, pecahnya perang dunia pertama tahun 1914 dan kerasnya kehidupan yang dia rasakan terutama ketika jatuh sakit menderita radang paru pada juli 1915 membuat Tan Malaka tidak dapat mengikuti kegiatan sekolah selama satu bulan penuh.

“Dimana jasmani menderita karena kekurangan, dimana rohani terpaksa dalam kungkungan lahir maupun batin, dimana akhirnya semua jalan menuju perubahan dan perbaikan sama sekali buntu, maka disanalah hati terbuka, ditarik oleh persamaan kodrat persamaan nasib dan ditolak oleh kodrat pertentangan-pertentangan, kodrat positif dan kodrat negatif. Penolakan thesis dan anti thesis di dalam diriku adalah bayangan dari gelora kedua kodrat itu, dalam arti sempit dan arti luasnya; dalam keadaan rumah yang aku diami dan keadaan Eropa di masa itu, yakni dalam rumah orang melarat dimana Eropa dan dunia seluruhnya berada dalam kancah perang dunia pertama (1914-1918)”⁶¹.

Dengan berbagai pertimbangan Tan Malaka pindah dari asrama sekolah ke pemonndokan. Tetapi pemonndokan yang pertama itu tidak sesuai dengannya terutama

⁶⁰ Tan Malaka, *Dari Penjara Ke Penjara I...*, *op.cit.*, hlm. 31-32

⁶¹ Tan Malaka, *Ibid*, hlm. 36

dalam hal makanan. Dengan bantuan temannya Tan Malaka mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik dengan bayaran yang sama di Jacobijnstraat 7-rood.⁶²

“Dalam rumah sewaan seorang keluarga buruh, sebuah kamar kecil di jalan kecil, kebetulan pula bernama Jacobbijnstraat, saya mendiami kamar loteng yang sempit gelap. Kamar disampingnya didiami oleh seorang pengungsi Belgia, Herman, seorang pemuda bekerja pada suatu pabrik jam di kota Haarlem. Orang muda ini meninggalkan negerinya sesudah belgia diserbu Jerman. Nyonya rumah adalah seorang perempuan buruh, jujur, sederhana dan dalam segala-gala penuh rasa kemanusiaan, dimasa kemanusiaan itu tak ada di dunia bagi dirinya sendiri....Nyonya Van Der Mij hidup dengan menyewakan kamar kepada kami dan mendapat sedikit bantuan dari anaknya yang sudah dewasa dan bekerja sebagai juru tulis rendahan di salah satu kantor di Amsterdam....Nyonya Van Der Mij setiap dan harus membayar ongkos suaminya di rumah sakit. Tak perlu diuraikan lebih lanjut kemelaratan perempuan ini.Hanya perlu dinyatakan bahwa kesabaran wanita buruh sederhana ini bukan kepalang.”⁶³

Selama tinggal di pondokan inilah Tan Malaka mulai berkenalan dengan buku-buku filsafat karya pemikir Jerman, Nietzsche, dan buku-buku tentang revolusi

⁶²Kamar ini disewa oleh Tan Malaka dari 27-4-1915 sampai 11-7-1916 pada Nyonya G. Van Der Ley – Van Herwerden. Menurut data yang diperoleh Poeze dari rekening koran yang dibuat oleh NIOS biaya yang harus Tan Malaka bayar untuk sewa kamar itu 10f lebih mahal dari yang sebelumnya. Harry Poeze, *Tan Malaka...I, op.cit.*, hlm. 41

⁶³*Ibid*, hlm. 36-37

Perancis dan Amerika.⁶⁴Tan Malaka juga sangat bersimpati dengan pergerakan yang dilakukan kaum buruh komunis Rusia yang terjadi pada bulan oktober 1917, dan mulai berkenalan dengan buku-buku yang berkaitan dengan Revolusi Rusia, seperti *Het Kapital* karya Marx, Engels, dan Kautsky.⁶⁵

Pada tahun 1916 kesehatan Tan Malaka kembali mengalami gangguan, sedangkan pada bulan april tahun itu dia harus menempuh ujian akhir. Dengan segala kekuatan yang dimilikinya Tan Malaka masih dapat mengikuti ujian akhir dengan hasil yang cukup memuaskan. Selama sakit Tan Malaka dirawat oleh dr. P. Jansen, menurutnya setelah menempuh ujian akhir Tan Malaka sebaiknya kembali ke Hindia Belanda. Tetapi atas desakan Fabius⁶⁶Tan Malaka akhirnya pindah ke Bussum pada bulan Juni 1916. Di sini Tan Malaka mendapatkan tempat yang tepat untuk memulihkan kesehatannya, dia katakan dalam autobiografinya suasana di tempat barunya ini: “dapat mengeringkan air di pinggir paru-parunya dan mengembalikan kesehatan seperti kurang lebih di Indonesia.”⁶⁷

⁶⁴ Hasan Nasbi, *Filosofi...op.cit.*, hlm. 47, lihat juga Poeze, *Ibid*, hlm. 70, Tan Malaka sesekali memuji Nietzsche dengan mengatakan: “kalau pernah saya ditarik oleh bahasa, maka bahasa Nietzsche lah yang mengambil bagian amat besar. ‘Die Umwertung aller Werten’, pembatalan nilainya segala nilai.” Tan Malaka, *Dari Penjara...I,op.cit.*, hlm. 39

⁶⁵ Poeze, *Tan Malaka...op.cit.*, hlm. 71

⁶⁶Arnoldus Nicolaas Jacobus Fabius adalah seorang tokoh sastra yang terkenal pada masanya.Diantar buku yang pernah dia tulis adalah tentang sejarah Naarden dan Bussum, juga buku-buku mengenai biografi Willem III dan Johan Maurits Van Nassau.Buku-buku lain yang Fabius tulis mengenai roman tebal dan sandiwara gembira.Lihat dalam catatan kaki Poeze, *Ibid*, hlm. 40. Fabius juga pernah menjabat Jenderal Mayor pertahanan Amsterdam bagian Artileri. Tan Malaka, *Dari Penjara Ke Penjara I...op.cit.*, hlm. 43

⁶⁷*Ibid*, hlm. 43

Dalam keadaan fisik yang tidak memungkinkan bagi Tan Malaka untuk melakukan aktifitas mempersiapkan ujian guru kepala, Tan Malaka juga harus memikirkan hutangnya yang semakin banyak. Dalam surat Fabius kepada Horensma tercatat hutang Tan Malaka sebesar f 3. 903,42.⁶⁸ pada tanggal 28 Juni 1918 Tan Malaka menempuh ujian tulis untuk akte kepala dan hasilnya cukup memuaskan, tetapi untuk ujian lisan tanggal 6 dan 7 September Tan Malaka gagal karena penyakitnya kambuh lagi. Tidak hanya sekali Tan Malaka mengalami kegagalan dalam ujiannya, tetapi sampai tiga kali hingga akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Hindia.⁶⁹ Perlu dicatat disini bahwa ketika berada di Busmu Tan Malaka sempat menyatakan keinginannya untuk belajar di Akademi Militer Kerajaan di Breda kepada Fabius.⁷⁰ Meskipun Fabius tidak menyetujuinya tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat Tan Malaka untuk mengetahui banyak mengenai kemiliteran, banyak buku mengenai pelajaran militer dia baca. Pengetahuannya mengenai strategi peperangan terlihat sekali dalam buku yang ditulis tahun 1948, *GERPOLEK* (GERilya-POLitik-EKonomi), dan karya ini dipuji oleh seorang Jenderal Besar A.H. Nasution: “ Tan Malaka juga harus tercatat sebagai tokoh ilmu militer Indonesia untuk selama-lamanya..”⁷¹

⁶⁸Surat NIOS (Fabius) kepada Horensma 17-3-1919. Harry Poeze, *Tan Malaka...I, op.cit.*, hlm. 74

⁶⁹ Hassan Nasbi, *Filosofi...op.cit.*, hlm. 47. dicatat oleh Poeze bahwa Tan Malaka setelah ujian melakukan pembicaraan dengan fabius, Tan Malaka mengemukakan isi hatinya dengan mengatakan, bergelut di dunia perguruan sebenarnya tidak sejalan dengan jiwanya. *Ibid*, hlm. 69

⁷⁰*Ibid*, hlm. 71

⁷¹Lihat dalam kata pengantar buku Madilog oleh Wasit Suwanto...*op.cit*, hlm. xx

Ditengah kesibukannya mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian guru kepala Tan Malaka juga sering mengunjungi kegiatan-kegiatan rapat “Indie Weerbaar” (Pertahanan Untuk Hindia) yang diadakan oleh Himpunan Hindia. Pada tahun 1919 sebelum kembali ke Hindia nampaknya Tan Malaka mulai sadar politik, terlihat dalam ceramah dan tulisan-tulisannya dalam terbitan himpunan “Hou en Trouw”. Terlebih pada tanggal 10 Mei 1919 di Amsterdam diadakan percakapan terbuka antara Suwardi dan Sneevliet⁷² mengenai “Kecenderungan Nasionalis dan Sosialis dalam Pergerakan Hindia”,⁷³ dan ini tentunya sangat mempengaruhi pikiran – pikiran politik Tan Malaka. Pada tahun 1918 Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) dan Dr. Goenawan Mangoen Koesoemo ingin kembali ke Hindia, mereka meminta Tan Malaka untuk mewakili partainya di Nederland.⁷⁴ Meskipun agak sedikit berat akhirnya Tan Malaka menerima juga tawaran tersebut, dan pada tanggal 3-6 September 1919 Tan Malaka mewakili Himpunan Hindia (*Indische Vereeniging*) pada kongres pemuda dan pelajar ke-3 di Deventer. Dalam kongres yang dihadiri oleh oleh tujuh puluh anggota tersebut Tan Malaka memberikan semacam *praeadvies* (nasihat) tentang “*Wat wil ,kan en mag Netherland thans van Indonesie*

⁷²Henk Sneevliet datang ke Hindia pada tahun 1913, bersama Ir. Adolf Baars mendirikan organisasi sosialis pertama di Hindia tahun 1914, Perhimpunan Sosial Demokrat Hindia (Indische Sociaal Democratische Vereeniging [ISDV]). Perhimpunan ini semula hanyalah kumpulan orang-orang Eropa, tetapi dalam perkembangan selanjutnya bekerjasama dengan orang-orang pribumi untuk lepas dari kolonialisme. *Ibid*, hlm. 165

⁷³*Ibid*, hlm. 77

⁷⁴ Safrizal Rambe, *Pemikiran...op.cit.*, hlm. 23

Verwachten?” (apakah yang ingin, dapat dan boleh diharapkan Negeri Belanda sekarang dari Indonesia?)⁷⁵

Ditengah keadaan dililit hutang ditambah lagi adanya pesan dari keluarga menyarankan untuk segera kembali ke Hindia, Tan Malaka sekembalinya dari memberikan ceramah di depan “Hou en Trouw” di Amsterdam, di jalan menuju pemondokannya dia ditemui oleh C.W.Janssen, direktur Senembah Maatschappij Deli, dan memberikan tawaran bekerja sama untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kuli perkebunan, sebagai mitra kerjanya Tan Malaka akan didampingi oleh orang Belanda, De Way (pernah menjadi murid Tan Malaka dalam bahasa melayu). Semula Tan Malaka merasa bimbang dengan tawaran kerja tersebut tetapi setelah dia pikirkan lebih matang dan dengan persetujuan tuan Fabius, Tan Malaka menerimanya.⁷⁶

Tan Malaka tiba di Indonesia tahun 1919 dan langsung mendaftarkan diri menjadi guru di perkebunan Senembah May, Deli Serdang, Sumatra Timur. Tidak begitu lama Tan Malaka tinggal disini, dalam aotubiografinya dia menuturkan dari bulan Desember 1919 sampai Juni 1921.Selama berada di Deli Tan Malaka melihat langsung kekejaman kaum kapitalis terhadap kaum miskin. Pemerasan tenaga dan pikiran para buruh untuk kepentingan kaum bermodal menjadikan Tan Malaka berangsur – angsur semakin sadar akan keyakinannya selama ini mengenai gagasan – gagasan revolusi kaum pekerja.

⁷⁵ Safrizal Rambe, *Ibid*, hlm. 23. lihat juga Poeze, Tan Malaka...*op.cit.*, hlm. 79

⁷⁶*Ibid*, hlm. 83

Para kuli kontrak bekerja lebih dari dua belas jam sehari dengan gaji f20f30 sebulan, sedangkan gaji Hopmandor f60, itupun setelah bekerja selama 15-20 tahun. Sementara para tuan-tuan tanah bisa mencapai penghasilan f200.000 per tahunnya belum lagi ditambah bunga modal dan keuntungan hasil kebun.⁷⁷

Tan Malaka mengatakan : “ adakah tempat buat saya dalam masyarakat Deli seperti yang coba saya gambarkan diatas? Buat saya yang berpaham radikal, ditengah-tengah masyarakat yang mengandung pertentangan maha tajam.”⁷⁸Tan Malaka sangat menyadari kondisi “penindasan” terhadap bangsanya ini, tetapi Tan Malaka sengaja tetap tinggal untuk sementara waktu demi memahami lebih jauh keadaan masyarakat di Deli dan menabung guna melunasi hutang-hutangnya.

“akhirnya saya berharap lekas lepas dari hutang yang terasa berat, sambil mendapatkan pengalaman yang berharga dalam pergaulan dengan bangsa sendiri yang paling terhisap, tertindas dan terhina, sambil menyelam minum air.”⁷⁹

Karena keadaan semakin tidak memungkinkan awal tahun 1921 Tan Malaka mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai guru. Dari Deli Tan Malaka langsung bertolak ke Jawa, kota yang dituju adalah Semarang. Tan Malaka banyak mendengar kabar tentang perjuangan kaum merah revolusioner yang berpusat di Semarang, sehingga Tan Malaka langsung menuju ke Semarang untuk bergabung dengan

⁷⁷ Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara I...op.cit.*, hlm. 73

⁷⁸*Ibid*, hlm. 78

⁷⁹*Ibid*, hlm. 79

pergerakan – pergerakan yang ada.⁸⁰ Ketika itu di Semarang terdapat markas Vereeniging van Spoor den Tram Personeel (VSTP), Sarekat Sekerja Kereta Api, yang diketuai Semaun (1899-1971).⁸¹ Disini Tan Malaka juga banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh penggerak yang lebih senior. Di Yogya Tan Malaka bertemu dan bermalam di rumah Sutopo (mantan pimpinan surat kabar Budi Utomo) yang hendak mendirikan sekolah dan bermaksud menjadikan Tan Malaka sebagai ketuanya. Melalui perantara Sutopo inilah Tan Malaka dapat berkenalan dengan Semaun, Darsono dan Cokroaminoto.⁸²

Setibanya di kediaman Semaun di kampung Suburan, Pekalongan, Tan Malaka jatuh sakit dan harus mendapatkan perawatan selama satu bulan di rumah sakit. Kira-kira tanggal 10 April Tan Malaka keluar dari rumah sakit dan langsung bekerja pada sebuah sekolah swasta. Karena semakin hari Tan Malaka semakin menunjukkan kemajuan dalam memberikan pengajaran dan minat masyarakat semakin besar maka Semaun segera mengadakan rapat istimewa anggota Sarekat Islam Semarang untuk mendirikan sekolah rakyat, usul tersebut diterima dengan baik dan pencatatan calon murid dimulai pada hari itu juga.⁸³

⁸⁰Sebenarnya niat awal Tan Malaka pergi ke Jawa untuk mendirikan perguruan yang cocok dengan jiwa dan kondisi masyarakat Hindia ketika itu, dan niat itu akhirnya terlaksana dengan baik. Lihat Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara I*, *Ibid*, hlm. 105

⁸¹ Semaun (1899-1971) selain menjadi ketua ISDV dia juga menjadi ketua PKI dan pengurus pusat Central Sarekat Islam (CSI) 1921, dan menjabat sebagai ketua Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB) sejak tahun 1919. lihat Poeze, *TanMalaka...op.cit.*, hlm. 167

⁸² Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara I...op.cit.*, hlm. 106

⁸³*Ibid*, hlm 109

Sekolah rakyat yang didirikan, biasa juga disebut sekolah Tan Malaka, segera mendapat tempat dihati rakyat, disamping bayaran yang murah sekolah tersebut sesuai dengan keadaan jiwa rakyat jelata yang sedang tertindas. Sehingga dimana-mana didirikan sekolah dengan model Tan Malaka⁸⁴. Bersamaan dengan kemajuan sekolah rakyat tersebut, dalam wilayah politik sedang berkecamuk perbedaan pendapat dalam Sarekat Islam antara kelompok (Central Sarekat Islam) CSI, yang diketuai Abdul Muis dan H. Agus Salim dengan PKI.⁸⁵ Dalam istilah Tan Malaka (Sarekat Islam melawan “Kesemarangan”/ Islamisme melawan Komunisme)⁸⁶.

Oleh Busro, seorang tokoh Sarekat Islam Semarang, Tan Malaka dinasehati agar tidak ikut campur dalam urusan politik. Tetapi karena dalam tubuh Sarekat Islam kekurangan tenaga dalam semua lapangan maka akhirnya Tan Malaka diminta mengikuti rapat Sarekat Islam di Surabaya. Dalam rapat Tan Malaka diingatkan oleh Semaun agar tidak menyinggung persoalan yang berkaitan dengan Komunisme. Dalam kesempatan berpidato di depan peserta rapat Tan Malaka mengajukan usulan agar Sarekat Islam dan PKI tidak membesarkan masalah-masalah yang menimbulkan perpecahan bangsa, hasilnya cukup signifikan, pidato Tan Malaka yang kurang lebih

⁸⁴ Permintaan pendirian sekolah datang dari Yogyakarta, Salatiga, Kaliwungu dan Bandung, sedangkan suplai buku-buku perpustakaan akan didatangkan dari Palembang dan Sangahai. Lihat Poeze, *Ibid*, hlm. 178. lihat juga Safrizal Rambe, *Pemikiran...op.cit.*, hlm. 25

⁸⁵ Abdul Muis dan H. Agus Salim adalah dua tokoh yang berasal dari Minangkabau seperti Tan Malaka, mereka berdua menghendaki adanya disiplin partai yang bertujuan untuk memurnikan SI sebagai organisasi bernuansa Islam, dengan demikian PKI tidak memiliki tempat di tubuh SI. Lihat dalam catatan kaki Hasan Nasbi, *Filosofi...op.cit.*, hlm. 50

⁸⁶ Istilah “Kesemarangan” merujuk pada komunisme, karena pada saat itu kota Semarang adalah pusat pergerakan kaum komunis yang diketuai Semaun. Lihat Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara I...op.cit.*, hlm. 114

hanya 15 menit itu menyebabkan beberapa pemimpin Sarekat Islam berkenan hadir dalam rapat PKI di Semarang.

“ Disini saya (Tan Malaka) sudah menginjak tanah lincir yang dinamai politik. Sekali kaki menginjak tidak mudah ditarik kembali.” Karena kepiawaian Tan Malaka dalam agitasi, teori dan mengkoordinir massa tawaran jabatan kepada dirinya mulai berdatangan. Tan Malaka diutus oleh Semaun pergi ke Cepu untuk melihat keadaan di sana, dan kembalinya dari Cepu Tan Malaka diberi mandat menjadi wakil ketua Serikat Buruh Pelikan (Tambang) Indonesia. Ketika Darsono dan Semaun berada di Moskow, dalam kongres PKI tanggal 24 Desember 1921 Tan Malaka menggantikan posisi Semaun sebagai ketua PKI. Dalam rapat lanjutan keesokan pagi harinya pidato yang disampaikan Tan Malaka masih mengenai pentingnya persatuan, disamping sedikit masalah pendidikan. Pidato itu disambut hangat oleh Sarekat Islam dan PKI, hanya saja Abdul Muis datang terlambat sehingga sempat mengacaukan suasana dengan mengungkit masalah lama. H. Agus Salim bahkan tidak hadir dalam rapat tersebut.⁸⁷

Beberapa hari setelah rapat PKI tersebut Tan Malaka diminta membantu Revolusionair Vakcentrale, yang mengikat VSTP, buruh pegadaian untuk merundingkan masalah pemogokan kaum buruh. Pada bulan Januari 1922 pemogokan buruh dilaksanakan, akibatnya Tan Malaka ditangkap dan di buang ke Kupang (Timor) tanggal 2 maret 1922 dan pada bulan yang sama dia di eksterminir ke

⁸⁷ Harry A. Poeze, *Tan Malaka...op.cit.*, hlm. 213. lihat juga Tan Malaka, Dari Penjara ke Penjara I, *Ibid*, hlm. 116-117. Safrizal Rambe, *Pemikiran...op.cit.*, hlm. 25

Belanda. Dengan kapal *insulinde* pada tanggal 29 Maret berangkatlah Tan Malaka dari pelabuhan Tanjung Priok menuju tempat pembuangannya, tanggal 1 April kapal tersebut singgah di Padang, tetapi Tan Malaka tidak diperkenankan turun. Orang tuanya juga tidak menemui Tan Malaka ketika itu, hanya beberapa orang saja yang dapat menerobos untuk sekedar mengucapkan selamat jalan.

Tan Malaka turun di Perancis dan tinggal beberapa saat di Paris kemudian langsung bertolak ke Rotterdam, tepat tanggal 1 Mei Tan Malaka tiba disana dan berjumpa dengan Dr. Van Ravenstijn (CPH Partai Komunis Holland). Dr. Van Ravenstijn menasehatkan Tan Malaka untuk hadir dalam perayaan 1 Mei di Amsterdam yang diselenggarakan oleh Rapat bersama komunis syndikalis. Dalam rapat tersebut Tan Malaka diberi kesempatan oleh D.J. Wijnkoop (ketua fraksi Komunis di majelis rendah) untuk berbicara. Sambutan atas pembicaraan Tan Malaka pada rapat tersebut menarik hati para anggota CPH (Fraksi komunis) dan menyarankan agar Tan Malaka dapat menjadi calon anggota parlemen dalam pemilihan berikutnya.⁸⁸

Dalam pemilihan anggota parlemen Tan Malaka mendapatkan posisi nomor urut ke-tiga, tetapi karena usia Tan Malaka ketika itu belum mencapai 30 tahun (usia 30 adalah syarat menjadi anggota) maka Tan Malaka terganjal. Sebelum pemungutan suara usai dilakukan Tan Malaka telah berada di Berlin. Di sini Tan Malaka

⁸⁸Tercatat bahwa Tan Malaka adalah orang Indonesia pertama yang pernah melakukan pencalonan menjadi anggota parlemen di Belanda. Lihat Poeze, *TanMalaka...op.cit.*, hlm. 265. lihat juga Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara I...op.cit.*, hlm. 147

menyempatkan diri menulis buku “*Tunduk Kepada Kekuasaan Tetapi Tidak Tunduk Kepada Kebenaran*”. Dari Berlin Tan Malaka menuju Moskow guna menghadiri kongres komunis sedunia (Komintren) IV. Kongres Komintren ke-4 yang berlangsung tanggal 5 September sampai 5 Desember itu berjalan sangat demokratis. Pada sidang ke 7 tanggal 12 November Tan Malaka mendapatkan kesempatan berpidato dalam bahasa Jerman yang isinya tentang gerakan pemboikotan tanpa alasan yang jelas. Yang paling menarik adalah gagasan Tan Malaka mengenai Pan-Islamisme dengan mencontohkan kejadian pertentangan antara Sarekat Islam dan PKI. Tan Malaka melihat Pan-Islamisme sebagai sebuah pergerakan 250 juta kaum muslim yang berusaha lepas dari jajahan imperialisme. Dengan mengajukan beberapa data-data dan sejarah pergerakan Islam di beberapa tempat akhirnya dalam pidatonya Tan Malaka sampai pada kesimpulan :

“...Pan-Islamisme sekarang berarti perjuangan kemerdekaan nasional, sedangkan agama Islam merupakan segala sesuatu bagi kaum muslim, bukan hanya agamanya saja, tetapi juga negaranya, ekonominya, maknanya, dan segala sesuatu lainnya – dan dengan demikian Pan-Islamisme berarti bersatunya segala bangsa muslim, perjuangan kemerdekaan, tidak hanya untuk bangsa Arab, tetapi juga untuk bangsa Hindustan, Jawa dan semua bangsa muslim yang tertindas. Persatuan itu secara praktis sekarang dinamakan perjuangan kemerdekaan bukan hanya terhadap

kapitalisme Belanda, tetapi juga terhadap kapitalisme Inggris, Prancis dan Italia, terhadap kapitalisme di seluruh dunia. Itulah makna Pan-Islamisme sekarang...⁸⁹

Secara umum kongres Komintren ke-4 membahas cara mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan buruh pada semua lapisan penting sekitar pelabuhan sekeliling lautan teduh. Dengan demikian mempermudah hubungan antara satu negara dan negara lain yang berbasis komunis di Timur. Sebagai langkah menuju cita-cita tersebut kongres memutuskan membentuk Biro Serikat Sekerja Timur Merah (Red Eastern Labour Union) yang bertempat di Canton dan sebagai ketuanya ditunjuklah Tan Malaka sekaligus mengurus majalah “*The Dawn*” (fajar) sebagai media dari biro tersebut.⁹⁰

Tan Malaka mengalami beberapa kesulitan dalam menulis laporan hasil konferensi Profintren untuk Asia, disamping bahasa Inggris yang tidak begitu dia kuasai Tan Malaka juga dihadapkan dengan perangkat alat cetak yang tidak cukup untuk menulis huruf latin dan bahasa inggris. Ditengah-tengah kesulitan menerbitkan majalah *The Dawn* kesehatan Tan Malaka mulai memburuk, sudah dua bulan lebih dia berada di Canton laporan sedikitpun belum dibuat. Dalam proses pembuatan laporan ini sempat terhenti karena sakit Tan Malaka semakin parah, meski pada akhirnya dapat diselesaikan Tan Malaka segera mengambil kesimpulan untuk beristirahat di Filipina.

⁸⁹ Poeze, *Ibid*, hlm. 316

⁹⁰ Safrizal Rambe, *Pemikiran...op.cit.*, hlm. 29

Sementara keadaan politik yang terjadi di Hindia sedang mengalami goncangan, Gubernur Jenderal Dirk Fock semakin memperlihatkan sikap antipati terhadap pergerakan-pergerakan perjuangan. Yang sangat dikhawatirkan oleh pemerintah kolonial saat itu adalah pergerakan PKI yang kian frontal menyuarakan pembangkangan dan propaganda anti imperialisme. Sejak bulan Agustus 1924 PKI merasa perlu melakukan pemberontakan dengan turun ke jalan-jalan dan melakukan pemboikotan. Dalam hal ini sebenarnya terjadi konflik intern PKI, sebagian orang tidak menyetujui pemberontakan dilakukan karena menyadari alat-alat dan jumlah massa yang belum memadai.⁹¹

Dalam rapat PKI di Prambanan yang diadakan pada bulan Desember 1925, Komite Sentral PKI menyerukan pemberontakan melawan Belanda harus segera dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pergerakan mula-mula akan dilakukan di Sumatera pada bulan Juli 1926, tetapi karena rencana pemberontakan segera diketahui pemerintah Belanda dan adanya perselisihan antara pemimpin dan cabang-cabang PKI maka rencana pemberontakan ditunda.⁹²

⁹¹ Safrizal Rambe, *Ibid*, hlm. 30

⁹² Kritik paling tajam mengenai rencana pemberontakan datang dari Tan Malaka yang ketika itu berada di Manila, menurutnya pemberontakan baru dapat dilakukan setelah adanya Aksi Massa yang terorganisir. Surat Tan Malaka yang berisi pendapat menentang putusan Prambanan tidak sampai pada Komite Sentral PKI, tetapi propaganda yang dilancarkan Tan Malaka membawa pengaruh terutama bagi anggota dan cabang-cabang PKI di Sumatra Barat dan Bandung. Di Sumatra Barat PKI terpecah menjadi dua kubu, pertama seksi Padang patuh dan setia pada organisasi Partai Jawa dan kedua seksi Padang Panjang yang sangat dipengaruhi oleh Tan Malaka. Lihat Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi*, terj. Drs. Azmi, Massa Aksi, Ph.D dan Drs, Zulfahmi, Dipl. I.I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 19

Meski tidak memiliki paspor Tan Malaka berhasil menerobos wilayah Filipina dengan mengaku sebagai musikus dengan nama Elias Fuentes. Tan Malaka dengan kapal *Empress of Rusia* tiba di Manila tanggal 20 Juli 1925. di Manila Tan Malaka segera menemui Apolinario G. de Los Santos, rektor Universitas Manila dan kakak Mariano Santos. Tan Malaka diterima dengan baik karena dia membawa surat dari Mariano Santos. Dari perkenalan dengan Los Santos inilah Tan Malaka dapat bergaul dengan bebas bersama orang-orang serikat buruh Filipina. Menurut Poeze, Partai komunis di Filipina baru ada pada tahun 1930, maka besar kemungkinan Tan Malaka ikut andil dalam pembentukan partai komunis di sana.⁹³

Di Manila Tan Malaka sempat menerbitkan kembali karyanya *Naar De Republiek-Indonesia*, yang di buat semasa di Canton dan dicetak pertama kali bulan April 1925.⁹⁴ Tan Malaka juga menulis karya lain, *Semangat Moeda* yang diterbitkan tahun 1926 di Manila dengan bantuan Francisco Verona, redaktur harian majalah *El-Debate*.⁹⁵

⁹³ Harry A. Poeze, *Tan Malaka, Strijder Voor Indonesie's Vrijheid Levensloop van 1897 tot 1945*, terj. *Pergulatan Menuju Republik 1925-45*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. 4

⁹⁴ Mengenai terbitan buku *Naar de Republiek-Indonesia* ini Poeze memberikan keterangan cetakan kedua tertulis di Tokyo, seperti yang tertulis dalam buku Safrizal Rambe (hlm 31), tetapi menurut Poeze kota Tokyo, sebagaimana yang tertulis dalam buku cetakan kedua itu sebenarnya menunjuk kota Manila, tujuannya adalah mengelabui tokoh-tokoh polisi. Dan cetakan dalam bahasa Indonesia merujuk pada cetakan Manila tersebut. *Ibid*, hlm. 4-5

⁹⁵ Semasa di Filipina Tan Malaka bekerja sebagai koresponden harian majalah *El Debate*, menurut Helen Jarvis, sebagaimana dikutip Safrizal Rambe, melalui perkenalannya dengan Verona-lah Tan Malaka dapat bekerja dan menerbitkan brosur *Naar De Republiek Indonesia* dan *Semangat Moeda*. Safrizal Rambe, *Pemikiran...op.cit.*, hlm. 32. lihat juga, Helen Jarvis, *TanMalakaPejuang...op.cit.*, hlm. 17

Bulan Februari 1926, Alimin datang ke Manila untuk meminta restu Tan Malaka mengenai keputusan Prambanan. Tan Malaka mengajukan beberapa keberatan dan menyarankan pemberontakan harus ditunda, menunggu organisasi massa teratur di bawah satu komando. Dalam pembicaraan itu Alimin menyetujui semua pendapat Tan Malaka, dan ketika Alimin hendak pergi ke Singapura menemui pemimpin-pemimpin PKI yang berada di sana Tan Malaka menitipkan surat yang berisi alasan-alasan mengenai keberatan Tan Malaka terhadap keputusan Prambanan. Disamping itu Tan Malaka juga telah mempersiapkan “tesis-tesis” untuk dikirimkan ke Moskow.

Tetapi selama sebulan penuh tidak ada kabar dari Alimin maka akhirnya Tan Malaka pergi sendiri ke Singapura untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Kemungkinan Tan Malaka tiba di Singapura tanggal 6 Juni 1926, Setibanya disana Tan Malaka tidak bertemu dengan Alimin yang sudah pergi bersama Muso ke Uni Soviet. Dari keterangan Subakat dan Sugono, Ketua Serikat Buruh Kereta Api (VSTP) yang masih berada di Singapura Tan Malaka baru menyadari bahwa Alimin tidak menyampaikan suratnya kepada teman-teman PKI. Sedangkan Subakat dan Sugono setelah mendengar uraian Tan Malaka mengenai keberatan Tan Malaka atas pemberontakan yang akan dilakukan PKI dengan mudah menerima pendapat Tan Malaka dan segera merubah haluan pergerakan.

Pada saat – saat genting inilah Tan Malaka segera menulis buku *Massa Aksi* yang berisikan tuntunan pergerakan dan kritik-kritik terhadap rencana pemberontakan

PKI. Pemberontakan PKI ketika itu belum memadai dan hanya akan membawa dampak kerugian belaka. Bagi Tan Malaka yang terpenting saat ini adalah mengkoordinir massa dengan memberikan pendidikan cara melakukan revolusi. Organisasi-organisasi yang ada juga harus sesuai dengan keadaan rakyat sehingga antara organisasi dan massa rakyat tidak terdapat *gap*, jika yang terjadi sebaliknya, dalam bahasa Tan Malaka, *putch*,⁹⁶ maka impian untuk melakukan revolusi adalah utopia.

Sementara di lain pihak, Alimin dan Muso telah berada di Moskow, tetapi usulan mereka untuk melakukan pemberontakan dan pengajuan dana ditolak oleh Komintren. Komintren memiliki anggapan yang sama dengan Tan Malaka, bahwa PKI berada di bawah “petualang-petualang *putch*”⁹⁷ akan tetapi Alimin dan Muso tetap tidak menghiraukan putusan Komintren, mereka tetap akan melancarkan program yang telah disepakati sebelumnya.

Akhirnya, meski secara sporadis pemberontakan tetap dijalankan. Di Jakarta dan Banten, Jawa Barat terjadi pada tanggal 12-13 November 1926 dan di Sumatra

⁹⁶“Putch” itu suatu aksi segerombolan kecil yang bergerak diam-diam dan tak berhubungan dengan rakyat banyak. Gerombolan itu biasanya membuat rancangan menurut kemauan dan kecakapan sendiri dengan tidak memperdulikan perasaan dan kesanggupan massa. Ia sekonyong-konyong keluar dari guanya dengan tidak memperhitungkan lebih dulu, apakah saat untuk ber-massa aksi sudah matang atau belum. Dia menyangka, bahwa semua lamunannya tentang massa benar sama sekali. Dia lupa atau tidak mau tahu bahwa massa hanya dengan

⁹⁷ Lihat Helen Jarvis, *Tan Malaka Pejuang...op.cit.*, hlm. 21. Ada kemungkinan surat Tan Malaka yang berisi pandangan-pandangan keberatan atas pemberontakan Prambanan kepada Komintren telah sampai dan ikut menjadi bahan pertimbangan pihak Komintren mengambil keputusan terhadap Alimin dan Muso. Apalagi status Tan Malaka sebagai ketua agen partai komunis untuk Asia masih diakui.

Barat pada tanggal 1 Januari 1927⁹⁸. Dengan gagalnya pemberontakan PKI tersebut pihak pemerintah Hindia Belanda mendapatkan alasan kuat untuk menutup dan membubarkan PKI. Tan Malaka sendiri akhirnya mulai menyadari bahwa usahanya mencegah pemberontakan itu gagal, ironisnya, bagi golongan oposisi, Tan Malaka dianggap sebagai dalang gagalnya pemberontakan 1926 dan dijuluki sebagai *Trotsky*⁹⁹

Setelah mengalami kegagalan dalam memperjuangkan pemikirannya terhadap PKI, Tan Malaka seperti melihat sinyalemen lain dari pergerakan komunisme internasional dan PKI di Indonesia. Komintern yang semula menjadi kiblat pergerakan Komunis internasional menjadi sentralistik. Putusan yang di keluarkan selalu bersifat top-down, tanpa melihat akar sosio-politik dan budaya lokal dimana sistem komunis itu akan diterapkan. Setelah mengumpulkan data mengenai kerusakan yang dialami PKI, ketika itu Tan Malaka telah berada di Bangkok, dia tiba

⁹⁸Agitasi yang dilancarkan oleh PKI dan Sarikat Rakyat (onderbouw PKI) terus berlangsung sehingga pemberontakan yang tidak solid diantar semua cabang itu terjadi. Akibatnya pemberontakan di kedua tempat itu dengan mudah ditindas oleh pemerintah Hindia Belanda. Dari data – data yang ada penangkapan oleh Pemerintah Hindia Belanda terhadap anggota PKI sejumlah 13.000 orang. Dengan rincian sbb: yang dihukum sebanyak 4.500 orang, yang dibuang ke Digul (Irian Barat) 1.300 orang. Bersamaan dengan itu pula pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan keputusan PKI sebagai perkumpulan dilarang. Lihat Mohammad Sidky Daeng Materu, *Sejarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hlm. 2425. lihat juga Drs. Susanto Tirtoprodjo S.H, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, Pembangunan Jakarta, Yogyakarta, 1996, hlm. 60

⁹⁹ Istilah *Trotskyisme* merujuk pada nama tokoh Leon Davidovich Trotsky (nama aslinya Lev Davidovich Bronstein). Julukan yang sedikit mengejek ini sengaja dimunculkan oleh Stalin untuk menunjuk orang-orang yang dianggap membelot dari Comintern seperti halnya Trotsky. Lihat dalam catatan kaki no 47 buku Safrizal Rambe, *Pemikiran...op.cit.*, hlm. 76-80 lihat Helen Jarvis, *Ibid*, hlm. 25

sekitar akhir Desember 1926, bersama dua orang temannya (Jamaluddin Tamim dan Subakat) mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI) pada tanggal 1 Juni 1927.¹⁰⁰

PARI yang didirikan di Bangkok selanjutnya mengalami perkembangan dalam sifat dan jangkauannya. Setelah Tan Malaka berada di Indonesia, pada bulan Agustus 1945 Tan Malaka menulis buku berjudul *PARI manifesto Jakarta*. Buku ini dibuat Tan Malaka untuk merevisi keinginan-keinginan PARI Bangkok, sekaligus menunjukkan pada teman-temannya yang masih bersembunyi bahwa PARI masih eksis. Selama 18 tahun PARI mengalami pasang surut, hal ini disebabkan keadaan Tan Malaka yang selalu berpindah-pindah karena diburu para polisi negara imperialis. Selama masa stagnan itu Tan Malaka menyadari bahwa keadaan dunia telah berubah, sehingga PARI yang semula hanya berskala nasional menjadi lebih luas, internasional.

Anggaran dasar PARI yang dibuat oleh Tan Malaka dalam bahasa Belanda dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Subakat tidak ditemukan arsip aslinya. Menurut Jarvis salinan asli Manifesto PARI Bangkok yang ditemukan dan

¹⁰⁰ Dalam catatan Helen Jarvis, pembentukan Partai Republik Indonesia (PARI) pada tanggal 1 Juni 1927, *Ibid*, hlm. 25. Sedangkan Tan Malaka dalam autobiografinya menulis bulan Juli 1927, *Dari Penjara ke Penjara I, Op.Cit*, hlm. 249. Lihat juga dalam *PARIManifesto Jakarta 1945*, Yayasan Massa, Jakarta, 1986, hlm. 9. Bandingkan dengan yang di tulis Poeze dengan mengutip buku karya Tamim, *Sejarah PKI*, PARI berdiri tanggal 2 Juni 1927 di taman istana Prachatipak, di Candi Budha Emas, Bangkok. Sehari sebelumnya telah dibuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PARI (AD/ART). Poeze, *Tan Malaka...II, op.cit.*, hlm 98. Pada tahun 1945 Tan Malaka mengeluarkan buku dengan judul "PARI Manifesto Jakarta", isi buku ini menyinggung tentang kelanjutan PARI Bangkok 1927. PARI yang semula merupakan singkatan dari "Partai Republik Indonesia" menjadi mengandung arti makna yang lebih luas yaitu "Proletaris ASLIA Republik Internasional".

yang ada hanyalah ikhtisar revisi Manifesto Mei 1929. Dari anggaran dasar tersebut disebutkan tujuan PARI sbb:

“Untuk mencapai kemerdekaan penuh dan sempurna selekas mungkin dan setelah itu membentuk federasi Republik Indonesia atas dasar-dasar yang sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik negeri ini dengan adat istiadat dan sifat penduduknya dan yang selanjutnya dirancang untuk memajukan kesejahteraan lahir dan batin rakyat Indonesia.”¹⁰¹

Sedangkan tujuan PARI yang diformulasikan Tan Malaka bulan Agustus 1945 dalam Manifesto Jakarta tidaklah ada perubahannya, hanya saja sifat dan jangkauannya yang lebih luas:

“Akhirnya tetapi tiada kurang pentingnya nama itu sesuai dengan suasana dan keadaan baru. Berhubungan dengan ini maka PARI mengandung arti yang lebih dalam, ialah: PROLETARIS ASLIA-REPUBLIK INTERNASIONAL. Jadi watak PARI tetap Proletaris seperti sediakala, dan arahnya tetap pula internasional seperti dahulu, tetapi daerahnya sudah bertambah luas. Daerahnya sekarang, ialah daerah yang cocok dengan pemeriksaan ahli yang bersandar atas ilmu bumi dan ilmu bangsa (ethnology science of races), serta akhirnya cocok pula dengan pentingnya perekonomian.”¹⁰²

Mengenai Manifesto PARI Bangkok, Jarvis memberikan asumsi, sifat PARI Bangkok adalah nasionalis dan tidak memberikan dukungan secara eksplisit kepada

¹⁰¹ Helen Jarvis, *Ibid*, hlm. 26-27

¹⁰² Tan Malaka, *PARI Manifesto Jakarta*, *Ibid*, hlm. 9-10

sosialisme dan komunismemungkin sekali Jarvis tidak membaca karya Tan Malaka, *PARI Manifesto Jakarta*, yang menegaskan bahwa tujuan PARI tidak berubah, masih bersifat internasional. Hanya saja, memang dukungan terhadap Moskow telah diputuskan oleh Tan Malaka, karena Moskow menjadi otoriter dan hanya sesuai dengan keadaan Rusia dibawah kekuasaan Stalin.

Setelah mendirikan PARI di Bangkok Tan Malaka kembali ke Filipina untuk memulihkan kesehatannya. Awal agustus Tan Malaka tiba di Manila dengan nama samaran Hasan Ghozali (setahun yang lalu dengan nama samaran Elias Fuentes). Segera Tan Malaka menemui temannya, Dr. Mariano Santos dan Appolianiro de Los Santos. Mereka berdua yang memberikan pelayanan pada Tan Malaka selama di Manila, dan juga bantuan jaminan terhadap diri Tan Malaka ketika ditangkap polisi rahasia Amerika malam tanggal 12 Agustus 1927.

Dari hasil putusan pengadilan Tan Malaka harus di deportasi ke negri asalnya, tetapi dengan nasihat teman-temannya, Dr. Jose Abad Santos, Pengacara nasionalis veteran, jika Tan Malaka di kembalikan ke Indonesia maka berarti menyerahkannya pada musuh, dan apabila Tan Malaka dibiarkan tinggal di Filipina, tuduhan mengenai pemalsuan passport akan diajukan padanya, dan implikasinya terhadap orang-orang dibelakang Tan Malaka yang selama ini melindungi akan mendapatkan hukuman pula. Karena itu Tan Malaka disarankan untuk pergi dari Filipina secara diam-diam.¹⁰³

¹⁰³Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara I...op.cit*, hlm. 265

Keesokan harinya dengan kapal Suzana milik Filipina Tan Malaka berangkat menuju Amoy, Tiongkok. Setelah seminggu di Amoy Tan Malaka di ajak seorang Filipina, Ku-ja (Ki-Koq) menuju desanya, Sionching. Di desa ini Tan Malaka banyak mendapatkan pengetahuan tentang masyarakat desa Tiongkok hingga akhirnya sekitar tahun 1929 Tan Malaka pergi menuju Shanghai.¹⁰⁴

September 1932 Tan Malaka terpaksa meninggalkan Shanghai karena serangan Jepang ketika itu terhadap kota Shanghai. Dengan nama samaran Ong Soong Le, permulaan bulan Oktober 1932 Tan Malaka tiba di Hongkong. Semula Tan Malaka berencana melanjutkan perjalanan ke India tetapi sebelum rencana itu dilaksanakan dia tertangkap di Hongkong. Selama kurang lebih dua setengah bulan Tan Malaka meringkuk di dalam penjara yang akhirnya dideportasi kembali ke Shanghai. Pada pelariannya yang ke dua di kota Amoy inilah Tan Malaka sempat mendirikan sekolah *Foreign Languages School* dengan jasa teman lamanya Ka-it. Tanggal 31 Agustus 1937 Tan Malaka kembali meninggalkan Shanghai, hal ini diakibatkan serangan ekspansi serangan Jepang semakin meluas menuju selatan.¹⁰⁵ Perlu pula diketahui, dalam perjalanannya dari Amoy menuju Rangoon, di dekat pesisir Tanaserrim, Birma, Tan Malaka melemparkan dua buku catatan penting mengenai pengalamannya selama di beberapa negeri pembuangannya ke laut. Perjalanan menelusuri semenanjung Malaya menuju Singapura, di sini Tan Malaka

¹⁰⁴*Ibid*, 284. lihat juga Helen Jarvis, *Tan Malaka Pejuang...op.cit.*, hlm. 35

sempat mengajar bahasa Inggris di sebuah sekolah dasar dan kemudian di sekolah menengah.

Pada tahun 1942, pesawat tempur Jepang, sekitar 125 buah, menyerang Singapura dan dengan tidak mendapatkan perlawanan yang berarti Jepang mampu menaklukkan Singapura (Inggris) dengan mudah. Setelah tentara Inggris menyerah pada Jepang, pada tanggal 13 Februari 1942 dan keadaan sudah mulai membaik Tan Malaka segera merencanakan untuk kembali ke tanah air.

Pada bulan April 1942 Tan Malaka dengan mengendarai kereta api pergi menuju Penang, dengan maksud menyeberang melalui selat Malaka menuju Belawan, Medan. Akhirnya bersama empat orang temannya pada pertengahan bulan Mei Tan Malaka, melalui Penang menaiki kapal kecil menyeberangi selat Malaka. Dari Selat Malak menuju Medan, Padang, Palembang, Lampung, dan akhirnya tiba di Jakarta pada bulan Juli 1942.

Dengan memakai nama samaran Ramli Hussein, Tan Malaka beberapa hari singgah di Padang, melalui Solok, Sijunjung, Jambi dan tiga hari di Palembang. Dari Lampung Tan Malaka berangkat menuju Pulau Jawa menaiki kapal "Sri Renjet". Menurut keterangannya dalam Dari Penjara ke Penjara II, beretepatan dengan keberangkatannya menuju Jawa, dari sebuah surat kabar, Ir. Soekarno berangkat dari pembuangannya di Palembang menuju Jakarta. Karena berbagai pertimbangan atas keamanan dirinya, akhirnya di Jakarta Tan Malaka memilih bertempat tinggal di Rawa Jati, dekat pabrik sepatu Kali Bata. Di sini Tan Malaka bermukim kurang lebih

selama satu tahun lamanya, dan di tempat ini pulalah dia menuliskan karya *magnum opus*nya, MADILOG dan ASLIA.¹⁰⁶

Setelah banyak mengetahui tentang keadaan kaum buruh dan tani di sekitar Jawa, melalui nasihat Dr. Purbocaroko, pengurus perpustakaan gedung Arca, Tan Malaka pergi mencari pekerjaan ke Bayah, Banten. Ketika itu di Bayah terdapat sebuah tambang batu bara, tempat ribuan romusha bekerja dibawah kekuasaan Jepang.¹⁰⁷ Di sinilah Tan Malaka melihat secara langsung kejamnya tentara Jepang menginjak-injak nilai-nilai kemanusiaan di negrinya sendiri. Suatu ketika Ir. Soekarno dan Moh. Hatta mengunjungi Bayah, dan untuk pertama kali pula Tan Malaka dapat berdialog langsung dengan Soekarno yang selama ini di anggap pemimpin revolusi Indonesia. Hasil dari pembicaraan singkat di muka umum itu Tan Malaka sangat kecewa dengan putusan Soekarno yang menginginkan kerjasama dengan Jepang.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Keterangan mengenai buku “ASLIA Bergabung” sangat sulit ditemukan, hanya dalam beberapa karya Tan Malaka yang lain sedikit menyinggung tentang ASLIA (lihat MADILOG dan Manifesto Jakarta). Menurut Tan Malaka sendiri dalam *Dari Penjara ke Penjara II*, ASLIA tidak selesai dia tulis, diperkuat oleh penelitian Poeze mengenai buku ASLIA ini memang tidak selesai ditulis Tan Malaka. Lihat Safrizal Rambe, *Pemikiran...op.cit.*, hlm. 67

¹⁰⁷ Poeze...II, *Loc.cit*, hlm. 299. Menurut Tan Malaka, nama perusahaan yang mengurus tambang tersebut adalah “Bayah Kozan”, perusahaan ini milik seorang kapitalis Jepang, Sumitomo, seluruh modal perusahaan ditanggung oleh keluarga Sumitomo tetapi hasilnya diatur sesuai dengan keperluan tentara Jepang. Lihat Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara II...op.cit.*, hlm. 324

¹⁰⁸ Dalam kunjungannya ke Bayah Soekarno usai berpidato memberikan waktu kepada para pekerja romusha untuk bertanya, ketika itu Tan Malaka (Ilyas Husein) mengajukan keberatan atas isi pidato Soekarno yang mengutamakan kerjasama dengan Jepang setelah itu baru merebut kemerdekaan. Tan Malaka berpendapat sebaliknya, yang harus diutamakan adalah kemerdekaan bagi Indonesia dan tidak ada kompromi dengan penjajah manapun. Ada kemungkinan Hatta masih mengenal Tan Malaka ketika dia berbicara dengan Soekarno, karena Tan Malaka dan Hatta pernah bertemu di Netherland tahun 1922. Lihat, *Ibid*, hlm. 356-359, 161

Selama di Bayah Tan Malaka tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk banyak belajar mengenai keadaan masyarakat Indonesia, baik segi perekonomian, sosial, pendidikan dan politik. Tan Malaka juga sempat melakukan aksi propaganda pada penduduk desa dan pekerja romusha di Bayah, usahanya itu tidaklah sia-sia, meskipun tidak bersifat massif, tetapi cukup menjadi perhatian para pemimpin ketika itu, keributan dan penentangan terhadap kebijakan Jepang terjadi.

Pada bulan Agustus Tan Malaka pergi ke Jakarta sebagai utusan Badan Pembantu PETA Bayah untuk menemui tokoh pemuda di Jakarta, perjalanan sebagai utusan ini merupakan perjalanan untuk kali kedua. Tepat tanggal 15 Agustus 1945, pukul 4 di Jalan Padang, No 3, Tan Malaka tiba di kediaman Sukarni. Setelah beberapa saat berbincang dengan Sukarni dan Chaerul Saleh, Tan Malaka dipersilahkan untuk istirahat di rumahnya, dan semenjak itu pula hubungan Tan Malaka dan Sukarni sempat terputus sampai di ikrarkannya proklamasi 17 Agustus 1945. Tan Malaka sangat menyesali keadaan tersebut karena dia tidak terlibat langsung dalam momentum paling bersejarah Negara Republik Indonesia yang selama ini dia perjuangkan.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Di sekitar proklamasi 17 Agustus 1945 Tan Malaka menceritakan kejadian pada malam 16 Agustus 1945: “ atas nama pemuda Jakarta, Sjahrir mendesak Soekarno Hatta, supaya menentukan “sikap yang tegas” terhadap Jepang sesudah pemerintahan Jepang menyerah (14 Agustus 1945). Tetapi Soekarno dan Hatta tak setuju dengan maksud mengadakan Massa Aksi terhadap Jepang. Maka oleh rapat antara Sjahrir dan para pemuda diputuskan (tanggal 15 Agustus 1945 jam 22.00) : (“ menyingkirkan Soekarno Hatta sebagai penghalang Aksi Rakyat dan Pemuda. Sukarni ditunjuk untuk menyelenggarakan penyingkiran itu dan para pemuda yang lainlain diharuskan mempersiapkan PROKLAMASI”). Lihat Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara III*, Teplok Press, Jakarta, 2000, hlm. 145-146

Setelah proklamasi, tepatnya seminggu setelah hari kemerdekaan (25 Agustus 1945), Tan Malaka datang ke rumah Ahmad Soebardjo di Cikini, dan di sini pulalah untuk pertama kalinya Tan Malaka membuka rahasia dirinya, siapa dia sebenarnya. Mr. Soebardjo semula merasa kaget dengan teman lamanya ini, (perhubungannya dengan Tan Malaka sangat dekat ketika di Belanda tahun 1919 dan 1922) dan menyangka bahwa Tan Malaka telah mati.

Tan Malaka mengatakan Ahmad Subardjo-lah orang pertama yang mengucapkan nama aslinya semenjak kembalinya dia ke tanah air 10 Juni 1942. dan dari Mr. Soebardjo pula Tan Malaka dapat berkenalan dengan tokoh-tokoh perjuangan seperti, Iwa Kusuma Sumantri, Sutan Syahrir, Mr. Gatot, Dr. Buntarn dan Sayuti Malik, permulaan september oleh Sayuti Malik, Tan Malaka dipertemukan dengan Presiden Soekarno. Pada bulan yang sama melalui Mr. Sobardjo Tan Malaka dipertemukan dengan Moh. Hatta di rumahnya.¹¹⁰

Pada tanggal 15 September 1945 Tan Malaka mencoba mengusulkan kepada teman-temannya suatu pergerakan demonstrasi uji kekuatan (*krachtproef*) yang tujuannya memisahkan dan mengetahui kekuatan kawan dan lawan. Mendengar usulan tersebut Mr. Gatot, Mr. Soebardjo, dan Mr. Iwa Kusuma Sumantri dengan segera menyetujuinya dan menjadikan usul demonstrasi tersebut sebagai pembahasan dalam sidang kementerian. Pada awalnya usul mengadakan demonstrasi itu di setujui, tetapi karena mendapat somasi dari Jepang untuk tidak melakukan demonstrasi

¹¹⁰*Ibid*, hlm. 161

tersebut maka Soekarno dan Hatta ikut tidak menyetujuinya¹¹¹ Sebagaimana yang ditulis Tan Malaka mengenai usulan demonstrasi itu, suasana sidang ketika itu menjadi kacau. Terdapat dua kubu yang saling bertentangan, kelompok yang pro terhadap demonstrasi antara lain: Mr. Gatot, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Mr. Subardjo, Abikusno, Dewantara, dll, sedangkan kelompok yang kontra antara lain: Soekarno-Hatta, Prof. Dr. Soepomo, dll. Menurut Tan Malaka akibat dari pertentangan itu Soekarno dan Moh.Hatta meletakkan jabatannya sebagai Presiden dan wakil presiden tetapi keesokan harinya Komite Nasional Indonesia (KNI) mengangkat kembali Presidensil kabinet Soekarno-Hatta.

Pada bulan yang sama, September 1945 kali kedua pertemuan Tan Malaka dan Soekarno, Soekarno memberikan surat wasiat politik (*Testament Politik*) kepada Tan Malaka yang isinya mengatakan apabila Soekarno tertangkap oleh tentara sekutu maka pimpinan revolusi akan diserahkan kepada Tan Malaka.¹¹² Pada perkembangan

¹¹¹ *Ibid*, hlm, 163

¹¹² Sebagaimana yang di kutip Safrizal Rambe, pertemuan antara Tan Malaka dan Soekarno selama bulan September berlangsung dua kali, pertemuan itu diperantarai oleh dr. Soeharto di rumahnya secara rahasia. Tan Malaka yang semula mengaku sebagai Abdul Radjak dari Kalimantan, akhirnya di hadapan Soekarno dia mengaku bahwa dia adalah Tan Malaka. Pembicaraan antara keduanya dimulai dengan pertanyaan Soekarno mengenai watak imperialisme Belanda yang pernah di tulis Tan Malaka dalam buku Massa Aksi. Tan Malaka menjelaskan semua pertanyaan Soekarno disertai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan mengusulkan pula agar pusat pemerintahan dipindahkan ke pedalaman sebagai langkah bertahan apabila datang serangan mendadak dari sekutu. Mendengar uraian Tan Malaka tersebut nampaknya Soekarno sangat yakin bahwa dia adalah Tan Malaka yang asli, dan Soekarno tanpa ragu menunjuk pada Tan Malaka mengatakan: “kalau suatu saat saya tidak lagi bebas bertindak, maka kepemimpinan revolusi saya serahkan kepada anda”. Pertemuan kedua terjadi di rumah Dr. Muawardi, disaksikan oleh Sayuti Malik, Soekarno kembali menyatakan keinginannya tersebut. Kemudian mengenai hal tersebut Tan Malaka bercerita pada Soebardjo, dan atas usul Soebardjo tanggal 30 September 1945, disaksikan Iwa Kusuma Sumantri, dan Gatot, Soekarno menyusun

selanjutnya beredar pula testament politik yang hanya menyebutkan seorang nama saja yaitu Tan Malaka. Hatta menganggap dokumen testament politik itu dipalsukan oleh Chaerul Shaleh, dan menurut Sayuti Malik dokumen aslinya berada di tangan Aidit, dan ketika oleh Aidit diperlihatkan kepada Soekarno, Soekarno langsung merobekrobeknya.¹¹³

Sehari setelah penandatanganan testament politik tersebut Tan Malaka segera berangkat meninggalkan kota Jakarta dengan maksud mengorganisir kekuatan pemuda di Jawa. Kota yang dituju adalah Bogor, setelah berbincangbincang mengenai keadaan politik dan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya, Tan Malaka bertolak ke Banten (Serang). Di Serang Tan Malaka ditemui beberapa tokoh pemuda dan memintanya untuk memimpin sebuah partai sosialis yang segera akan dibentuk di Yogya. Mendengar usulan tersebut Tan Malaka menolaknya dengan mengemukakan berbagai alasan dan alasan ini pula yang di sampaikan pada saat pendirian partai sosialis di Yogya permulaan bulan September :

“terhadap maksud tamu hendak mendirikan partai, maka saya kemukakan penganggapan saya, bahwa saatnya belum sampai, karena keadaan yang akan kita hadapi belum lagi terang! (entah perang entah damai. Dalam masa perang

testament politik untuk Tan Malaka secara tertulis. Selanjutnya Soekarno menemui Hatta untuk dapat pula turut serta menandatangani testament tersebut, semula Hatta merasa keberatan, tetapi setelah diyakinkan oleh Soekarno, Hatta menyetujuinya dengan catatan menambah tiga orang lagi yaitu: Sjahrir mewakili golongan sedang, Wongsonegoro mewakili golongan feodal, dan Dr. Sukiman mewakili Islam, sedangkan Tan Malaka sendiri berada di posisi kiri sekali. Lihat Safrizal Rambe, *Pemikiran...op.cit.*, hlm. 42-44

¹¹³Lihat <http://www.xs4all.n1/2badjasur/kreasi/no2/daritestamen02.htm> Untuk keterangan lebih luas lihat Safrizal Rambe, *Ibid*, hlm. 42-48

tidaklah baik kalau mendirikan pelbagai partai) tetapi yang sudah terang bagi saya ialah apabila suatu partai diizinkan berdiri, maka besok harinya pastilah berbagai-bagai partai akan timbul, seperti jamur di musim hujan. Segala partai dari pelbagai golongan dan corak itu akan amat susah dikendalikan menghadapi musuh seandainya republik diserang musuh. Sementara suasana politik itu belum lagi terang, maka baiklah diperkuat saja pemerintah yang ada dengan para pemimpin revolusioner yang masih ada di luar pemerintahan!.”¹¹⁴

Dari Yogyakarta, melalui berita radio Tan Malaka mendengar adanya pertempuran yang sedang terjadi di Surabaya, dan menurut berita suara itu peperangan dipimpin langsung oleh Tan Malaka. Dari Yogyakarta Tan Malaka segera berangkat menuju Surabaya untuk ambil bagian dalam pemberontakan melawan agresi Belanda. Di hotel Mojokerto Tan Malaka sempat ditangkap polisi dan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan kecil dan kotor, tetapi tidak lama kemudian tempat itu didatangi sekelompok Pemuda Republik Indonesia (PRI) untuk mengambil Tan Malaka.

Sementara di lain pihak pada tanggal 1 November 1945 pemerintahan Sjahrir, didukung oleh Hatta, mengeluarkan maklumat mengakui hak milik asing di Indonesia. Lebih jauh Hatta melangkah, pada tanggal 3 November 1945, menginstruksikan mengadakan pembentukan partai-partai politik.¹¹⁵ Kecamatan paling

¹¹⁴ Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara III...op.cit.*, hlm. 178

¹¹⁵ Mungkin sekali Hatta menginstruksikan pembentukan partai-partai politik pada tanggal 3 November 1945 karena melihat antusiasme golongan-golongan yang ada ketika itu untuk mendirikan partai, sehingga tanpa berfikir panjang melihat keadaan situasi politik luar negeri serta dampaknya bagi

frontal datang dari Tan Malaka, dia segera mengadakan hubungan dengan tokoh-tokoh pejuang untuk mengadakan perlawanan terhadap kebijakan Sjahrir dan Hatta. Kebijakan lain pemerintahan Sjahrir yang dianggap keliru oleh kelompok Tan Malaka cs mengenai perundingan yang akan ditempuh pemerintah dengan Belanda. Maka pada tanggal 3-4-5 Januari 1946 diadakanlah Kongres Persatuan Perjuangan di Purwokerto yang dihadiri oleh 132 organisasi (Partai, Tentara, Laskar dan Badan). Pada kesempatan kongres ini Tan Malaka mengajukan “Minimum Program” yang berisi 7 pasal. Sepuluh hari kemudian pada tanggal 15-16 Januari 1946 diadakan kongres kedua Persatuan Perjuangan di Solo yang dihadiri oleh 141 organisasi.¹¹⁶

Desakan PP terhadap pemerintahan Sjahrir yang akan melakukan diplomasi dengan Belanda (Van Mook) pada tanggal 10 Februari 1946 mendapat dukungan semakin kuat dari berbagai partai politik dan rakyat. Tan Malaka dan PP-nya tetap pada pendirian semula, yaitu merebut kemerdekaan 100% tanpa ada kompromi dengan negara imperialis manapun. Perseteruan antara PP dan Kabinet Sjahrir I memuncak pada Rapat Komite Komite Nasional Pusat (KNPI) tanggal 28 Februari

Indonesia, dia umumkan maklumat pendirian partai tersebut. Sebelum tanggal dikeluarkannya maklumat mendirikan partai itu, PKI berdiri kembali tanggal 21 Oktober 1945 dan juga keinginan sebagian tokoh pemuda (Sutan Sjahrir, Kusniani, Djohan Sjahruzah, dll.) yang mengunjungi Tan Malaka di Banten, hendak mendirikan partai sosialis di Yogya. Lihat Wawan Tunggul Alam, *Pertentangan Sukarno vs Hatta*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 243. lihat juga Tan Malaka, *Ibid*, hlm. 177-178.

¹¹⁶ Sebelum diadakan kongres kedua, beberapa petinggi negara, Soekarno, Sjahrir dan Hatta serta para menteri di beri undangan, tetapi hanya beberapa orang saja yang hadir, menurut catatan Tan Malaka yang hadir ketika itu adalah Mr. Soebardjo (mantan menteri luar negeri), Mr. Gatot (mantan Jaksa Agung), Panglima Besar Jenderal Sudirman, sedangkan SP Sultan Jogja dan SP Sultan Susuhunan Solo hanya mengirimkan wakil. Lihat Tan Malaka, *Ibid*, hlm. 187-188

1946, pada rapat tersebut Sjahrir nampaknya melakukan siasat politiknya dengan cara mengundurkan diri. Pada masa kekosongan ini Tan Malaka diberi kesempatan mendirikan kabinet baru yang sesuai dengan 7 pasal program PP tetapi segera ditolak oleh Soekarno karena dianggap terlalu radikal.¹¹⁷ Soekarno ketika itu dalam dilema besar, satu sisi dia adalah pendiri PNI yang berada di belakang PP, di sisi lain dia mengkhawatirkan dirinya *vis a vis* dengan Sjahrir-Hatta dan Belanda (sekutu).

Sebagai jalan tengah, setelah pengangkatan kembali perdana menteri Sjahrir dalam sidang KNPI tanggal 1 Maret 1946 oleh Soekarno-Hatta, maka usaha rekonsiliasi antara kedua kubu yang sedang berseteru. Langkah yang diambil oleh kabinet Sjahrir II adalah memasukkan sebagian program PP, namun menurut Tan Malaka, Yamin, Ahmad Subardjo, dan Iwa Kusuma Sumantri pengutipan sebagian minimum program hanya akan membuat program itu kabur.¹¹⁸ Dengan tidak begitu menghiraukan tuntutan PP Sjahrir berniat tetap melakukan perundingan dengan Van Mook, perundingan ini berlangsung tanggal 13 Maret 1946. Usulan mengenai

¹¹⁷Tan Malaka menganjurkan kemerdekaan 100% berarti kemerdekaan dalam segala bidang. Pada titik tertentu Soekarno menyetujui program PP tersebut, tetapi Tan Malaka nampak begitu radikal terutama dalam bidang ekonomi dengan cara merampas segala perkebunan dan industri milik Barat di Indonesia. Tindakan ini menurut Soekarno akan memunculkan eksekusi negatif, sekutu akan kembali menyerang Indonesia yang telah mengikrarkan kemerdekaan. Lihat Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan...op.cit.*, hlm. 170

¹¹⁸Franz Magnis-Suseno, “*Tan Malaka, Menuju Indonesia Yang Sosialis*”, Basis, nomor 01-02, Januari – Februari 2001, hlm. 6

kemerdekaan 100% dikemukakan oleh Sjahrir tetapi ditolak oleh Van Mook karena Belanda berkeinginan mendirikan negara serikat.¹¹⁹

Dari perundingan yang dilakukan Sjahrir dan Van Mook melahirkan dua perundingan yaitu: Perundingan Linggarjati (November 1946), dan perjanjian Renville (Desember 1947). Seluruh isi perundingan disepakati oleh Soekarno-Hatta sambil memperkuat pertahanan dalam negeri.¹²⁰ Sementara Tan Malaka dan teman-temannya tetap konsisten dengan program PP melakukan agitasi mengusir sekutu. Karena dianggap menghambat program pemerintah maka atas perintah Menteri Pertahanan, Amir Sjarifuddin dan Menteri Dalam Negeri, Dr. Soedarsono dengan persetujuan Soekarno pada tanggal 17 Maret 1946 Tan Malaka ditangkap di Madiun ketika hendak mengunjungi kongres PP ke-4.¹²¹

Penangkapan Tan Malaka, yang kemudian terkenal dengan “peristiwa 3 Juli” disusul dengan aksi penangkapan perdana menteri Sjahrir 28 Juni 1946,¹²² Diduga

¹¹⁹ Menurut Wawan Tunggal Alam penolakan Van Mook terhadap usul merdeka 100% dan hendak mendirikan negara serikat di Indonesia berakhir pada dibentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS). Dari perundingan antara Sjahrir dan Van Mook ini pula-lah melahirkan Perundingan Linggarjati pada tanggal 15 November 1946 yang ditandatangani oleh Sjahrir dan Wilhelm Schermerhorn. Hasil dari perundingan tersebut antara lain pemerintah RI yang secara *de facto* diakui Belanda hanya tinggal Sumatra dan Jawa; Pembentukan Negara Indonesia Serikat; Pembentukan Uni Indonesia – Belanda yang dikepalai oleh ratu Belanda; Pengambilan semua hak bangsa asing di daerah RI ke pada pemilik aslinya; termasuk pula penarikan pasukan Belanda di daerah Republik. Lihat Menurut Wawan Tunggal Alam, *Pertentangan...op.cit.*, hlm. 245

¹²⁰ Dr. Roeslan Abdulgani. dkk, *Soedirman-Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan*, Restu Agung, Jakarta, 2004, hlm. 37

¹²¹ Selain Tan Malaka sederetan nama-nama lain yang ikut ditangkap adalah: Muhammad Yamin, Chaerul Saleh, Abikusno Tjokrosujoso, Sukarni, Djamaluddin Tamim dan Subardjo. Lihat Audrey Kahin, *Dari pemberontakan...op.cit.*, hlm. 170

¹²² Wawan Tunggal Alam, *Pertentangan...op.cit.*, hlm. 242

kuat penculikan tersebut dilakukan oleh seorang perwira militer bernama Abdul Kadir Yusuf atas sepengetahuan Jenderal Sudarsono.¹²³Oleh para oposan Tan Malaka, penangkapan terhadap Sjahrir didalangi oleh Tan Malaka cs. Padahal ketika penangkapan Sjahrir terjadi Tan Malaka berada di penjara.Selama 30 bulan Tan Malaka mendekam dalam penjara tanpa pernah diadili.¹²⁴

Di sisi lain, setelah disepakati perjanjian Linggarjati yang berakibat hanya diakui secara *de facto* pulau Jawa dan Sumatra bagi Indonesia oleh Belanda. Tekanan dari dalam tubuh partai Sjahrir mulai berdatangan, ironisnya tekanan tersebut datang dari Amir Sjarifudin yang semula mendukung perundingan dengan Belanda.Adanya “sayap kiri” dalam tubuh partai sosialis itu berakibat retaknya hubungan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin.Sjahriri kemudian membentuk Partai Sosialis Indonesia dan Amir Sjarifuddin mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR).¹²⁵Langkah berikutnya tekanan Amir Sjarifuddin terlihat pada saat penolakannya terhadap perjanjian Renville, 17 Januari 1948, dan setelah bergabung dengan Muso yang baru kembali dari Rusia dan mengkampanyekan “*Jalan Baru*

¹²³ Franz Magnis Suseno, *Tan Malaka, Menuju Indonesia...op.cit.*, hlm. 6

¹²⁴ Dalam masa tahanan inilah Tan Malaka menulis 3 buku yang masing-masing diberi judul: “Rencana Ekonomi”, “Thesis” dan “GERPOLEK (Gerilya Politik Ekonomi)”. Lihat Helen Jarvis, *Perjuangan...op.cit.*, hlm. 42

¹²⁵ Wawan Tunggal Alam, *Pertentangan...op.cit.*, hlm. 248

Muso”, Amir Sjarifudin bersama Muso melakukan pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.¹²⁶

Melihat keadaan yang semakin kacau Soekarno segera melakukan langkah politik dengan cara mendirikan “*sayap kiri tandingan*”. Ketika itu Soekarno berpendapat: “cara terbaik untuk memerangi orang komunis yaitu dengan cara menggerakkan orang komunis murtad.”¹²⁷ Maka sebagian besar tawanan 3 Juli dibebaskan pada tanggal 17 Agustus 1948 dan pada tanggal 16 September 1948 menyusul Tan Malaka dilepaskan.¹²⁸

Setelah pemberontakan PKI Madiun ditumpas oleh pemerintah dan Madiun dapat dikuasai, pada tanggal 19 Desember 1948 kembali agresi Belanda kedua dilancarkan, pada peristiwa itu Presiden, Wakil Presiden dan Perdana Menteri ditahan, pemerintahan darurat dipegang oleh Syarifudin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi. Sebelumnya, tanggal 7 November 1948, bertepatan dengan hari ulang tahun Revolusi Rusia Tan Malaka bersama dengan 80.000 anggota yang hadir mendirikan Partai Murba. Peleburan tiga partai ini (Partai Buruh Merdeka, Partai Rakyat dan Partai Rakyat Jelata) didirikan dengan tujuan menjadi perpanjangan tangan keinginan rakyat mempertahankan kemerdekaan Indonesia 100%.

¹²⁶ Wawan Tunggul Alam, *Ibid*, hlm. 242. lihat juga Safrizal Rambe, *Pemikiran...op.cit.*, hlm. 50

¹²⁷ Wawan Tunggul Alam, *Ibid*, hlm. 258

¹²⁸ Lihat Helen Jarvis, *Perjuangan...op.cit.*, hlm. 45-46. lihat juga Safrizal Rambe, *Pemikiran...op.cit.*, hlm. 59.

Ketika negara dalam keadaan darurat, Tan Malaka yang ketika itu sedang mengkoordinir kekuatan massa murba di Jatim sempat berpidato melalui radio Kediri pada tanggal 21 desember 1948. Reaksi atas pidato Tan Malaka tersebut datang dari pihak oposisi dengan menuduh Tan Malaka sebagai usaha kudeta, sementara bagi yang pro Tan Malaka pidato itu menambah simpati rakyat terhadapnya. Dalam keadaan negara semakin genting, Rustam Effendi menawarkan Tan Malaka memproklamirkan mendirikan Republik Sosialis Indonesia dan Tan Malaka sebagai presidennya, tetapi Tan Malaka menolaknya dengan alasan dia tetap pada prinsip semula, menekankan persatuan Indonesia meskipun harus menempuh jalan perjuangan bersenjata.¹²⁹

Akhirnya pada tanggal 19 Februari 1949 ketika sedang memimpin pasukan gerilya di pinggir sungai Brantas, desa Pethok, Kediri Tan Malaka ditangkap dan dibunuh oleh tentara reguler “Macan Merah” Brigade S dibawah pimpinan Letkol Surachmad.¹³⁰

B. KARYA-KARYA TAN MALAKA

Mengenai karya-karya Tan Malaka, Menurut Mestika Zed, setidaknya terdapat 27 buah tulisan berupa buku dan brosur disamping ratusan tulisannya yang dimuat pada surat kabar Hindia.¹³¹ Namun dalam penyelidikan penulis, karya Tan

¹²⁹ Safrizal Rambe, *Pemikiran...op,cit.*, hlm. 53

¹³⁰ Safrizal Rambe, *Ibid*, hlm. 53. Mengenai tanggal dan bulan kematian Tan Malaka terdapat kontroversi diantara beberapa peneliti sejarah. Dalam tulisan ini mengikuti apa yang ditulis Safrizal Rambe sesuai dengan hasil penyelidikan Partai Murba.

¹³¹ Mestika Zed, *dkk, Mencari Dan Menemukan Kembali Tan Malaka...op,cit.*, hlm. 31. kemungkinan berdasarkan buku dan brosur yang telah diterbitkan yayasan massa.

Malaka diketahui sebanyak 30 buah berupa buku dan brosur, dan hanya 19 buah darinya yang didapat penulis.

1. **Sovyet atau Parlemen** Ditulis tahun 1921 di Semarang
2. **Sarekat Islam (SI) Semarang dan Onderwijs** Ditulis tahun 1921 di Semarang
3. **Dasar Pendidikan** Ditulis tahun 1921
4. **Tunduk Pada Kekuasaan Tetapi Tidak Tunduk Pada Kebenaran** Ditulis di Berlin tahun 1922
5. **Goetji Wasiat Kaum Militer** Ditulis di Saigon tahun 1924
6. **Indonesiai ejo mesto na proboezjdajoesjtsjemsjavostoke** Ditulis di Moskow tahun 1924
7. **Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia)** Ditulis di Canton April 1925
8. **Semangat Moeda** Ditulis di Manila tahun 1926
9. **Lokal dan Nasional Aksi di Indonesia** Ditulis tahun 1926
10. **Massa Actie** Ditulis di Singapura tahun 1926
11. **Manifesto Pari (Manifesto Bangkok)** Ditulis di Bangkok tahun 1927
12. **PARI dan Internasional** Ditulis tahun 1927
13. **PARI dan PKI** Ditulis tahun 1927
14. **PARI dan Nasionalisten** Ditulis tahun 1927
15. **MADILOG (Materialisme- Dialektika-Logika)** Ditulis di Jakarta tanggal 15 Juli 1942 – 30 Maret 1943

- 16. Asia Bergabung (Gabungan ASLIA)** Ditulis tahun 1943
- 17. Politik** Ditulis di Surabaya tanggal 24 November 1945
- 18. Rentjana Ekonomi** Ditulis di Surabaya tanggal 28 November 1948
- 19. Moeslihat** Ditulis di Surabaya tanggal 2 Desember 1948
- 20. Manifesto PARI (Manifesto Jakarta)** Ditulis di Jakarta tahun 1945
- 21. Thesis** Ditulis di Lawu tahun 1946
- 22. Pidato Purwokerto (Situasi Politik Luar dan Dalam Negeri)** Ditulis tahun 1946
- 23. Pidato Solo** Ditulis tahun 1946
- 24. Dari Penjara Ke Penjara** Ditulis di penjara Ponorogo tahun 1946-1947
- 25. Uraian Mendadak** Ditulis di Yogyakarta tanggal 7 November 1948
- 26. Koehendel di Kaliurang (Perdagangan Sapi di Kaliurang)** Ditulis tanggal 16 April 1948
- 27. Surat Kepada Partai Rakyat** Ditulis di Penjara Magelang tanggal 31 Juli 1948
- 28. Proklamasi 17-8-1945, Isi dan Pelaksanaannya** Ditulis tanggal 16 Desember 1948
- 29. GERPOLEK (Gerilya Politik Ekonomi)** Ditulis di Penjara Madiun tanggal 17 Mei 1948
- 30. Pidato Kediri** Ditulis tahun 1948

BAB IV

FILSAFAT POLITIK TAN MALAKA

Tidak mudah memang untuk mengidentifikasi ide atau gagasan Tan Malaka dalam satu *mainstream*, karena sifatnya yang begitu kompleks dan seringkali secara spontan melakukan interpretasi dan modifikasi terhadap ajaran-ajaran yang dia terima. Semisal saja mengenai ajaran-ajaran Karl Marx dan Engels, mungkin hanya sedikit saja yang mengingkari bahwa MarxEngels adalah atheis, Tan Malaka dengan menelaah lebih jauh mengenai masyarakat Indonesia yang sejak semula telah mempercayai suatu keyakinan terhadap “agama”, mengelaborasi ajaran-ajaran Marx-Engels untuk dapat diterima di Indonesia dengan tanpa melepaskan keyakinan terhadap agama.

Dalam buku *Dari Penjara ke Penjara*, Tan Malaka menulis satu bagian tentang “Pandangan Hidup”, mungkin tulisan itu cukup membantu untuk memahami epistemologi ide-ide Tan Malaka, tetapi dalam karya lain yang sangat representatif untuk dapat memahami filsafat Tan Malaka, jika tidak ingin mengatakan komprehensif, adalah MADIALOG. Dalam MADIALOG Tan Malaka menguraikan tentang cara berfikir yang didasari atas “benda” (materi/matter), dia dengan jelas menolak pandangan-pandangan yang memiliki landasan idealisme apapun nama dan bentuknya. Memang, jika dipahami dalam frame filosofis, pandangan – pandangan Tan Malaka seringkali mendapat ganjalan yang cukup signifikan.

Franz Magnis Suseno dalam beberapa tulisannya mengenai Tan Malaka, mengkritik bahwa terdapat “kekacauan” filosofis dalam pandangan Tan Malaka ketika membagi dua kutub yang saling berseberangan yaitu materialisme dan idealisme. Jelas sekali dalam kajian filsafat, materialisme dan idealisme tidak dapat ditemukan dalam satu posisi, epistemologi, ontologi ataupun aksiologi. Materialisme termasuk bagian dalam bahasan tentang dasar realitas (ontologi) sedangkan idealisme merupakan bagian kajian mengenai dasar-dasar pengetahuan (epistemologi).¹³² Kesalahan yang dilakukan Tan Malaka itu sungguh menyulitkan pemahaman terhadap dirinya, mungkin karena itu pula banyak sebagian dari peneliti merasa sukar dimana harus memosisikan Tan Malaka, ditambah lagi pengalaman-pengalaman masa lalunya (agama, budaya, pendidikan) yang terkadang, bahkan sangat dominan, ikut mempengaruhi gagasan-gagasan Tan Malaka.

Buku MADILOG yang dibuat Tan Malaka, disamping sebagai panduan berfikir kaum proletar Indonesia juga sebagai media untuk memahami cara pikir Tan Malaka sendiri.

”MADILOG saya maksudkan terutama sebagai cara berfikir. Bukanlah suatu *weltanschauung* atau pandangan dunia; walaupun hubungan antara cara berfikir dan pandangan dunia atau filsafat adalah seperti tangga dengan rumah. Rapat

¹³² Dalam bukunya, Hasan Nasbi agak tendensius, mungkin agak ceroboh, dengan berasumsi, :“ bahwa Mark, Engels dan Tan Malaka harus dilihat dari perkembangan filsafat masa itu, dan memosisikan mereka dalam filsafat revolusi dan filsafat pergerakan.” Yang lebih mencolok ketika Hasan Nasbi mengatakan sebenarnya Tan Malaka menyadari akan “kekeliruan” itu hanya saja sengaja disederhanakan demi tujuan praktis sebuah pergerakan. Lihat dalam catatan kaki Hasan Nasbi, *Loc, cit*, hlm. 71. lihat Franz Magnis Suseno: “Madilog-nya Tan Malaka”, *Basis*, Nomor 03-04, April 2001, hlm. 53. lihat juga Franz Magnis Suseno, *Dalam Bayangan Lenin...op.cit.*, hlm. 23-24

sekali. Dari cara orang berfikir, kita dapat duga filsafatnya dan dari filsafatnya kita dapat tahu dengan cara dan metode apa dia sampai ke filsafat itu.”¹³³

Tan Malaka mengakui dengan besar hati bahwa MADILOG (Materilaisme-Dilaktika-Logika) dia adopsi dari dunia Barat. Pengetahuan yang diperolehnya dari pembacaan terhadap buku – buku kaum komunis, Leon Trotsky, Lenin, Engels dan Marx, dll. Beberapa bagian dia sisipkan pembahasan mengenai agama dan science. Tetapi Tan Malaka tidak mengadopsi ajaran-ajaran Marxist secara literleks, banyak modifikasi yang diberikan Tan Malaka, hal ini dilakukan karena Tan Malaka melihat beberapa perbedaan mencolok antara negara satu dan yang lainnya. Sehingga menurutnya ajaran Marx bukanlah dogma yang begitu saja harus diterima (taken for granted).

Memahami Tan Malaka dalam koridor Marxist tentu beralasan cukup, melihat beberapa tulisannya, baik implisit maupun eksplisit, menegaskan bahwa dia adalah Marxist. Tetapi mengeneralisir Tan Malaka dalam kapasitas *blue print* Marxist-Leninist mungkin perlu ditinjau ulang. Orientasi Tan Malaka dalam pergerakan perjuangan adalah memerdekakan bangsanya dari belenggu penjajah imperialis, cara yang ditempuh adalah revolusi, revolusi yang digerakkan oleh kaum murba. Sedangkan tujuannya membentuk negara dengan sistem sosialis-komunis. Tan Malaka melihat kesuksesan Rusia dibawah pimpinan Lenin (revolusi Oktober 1917) adalah bukti nyata kekuatan kaum proletar. Tetapi Tan Malaka menyadari betapapun

¹³³ Tan Malaka, *MADILOG...op.cit.*, hlm. 21

suksesnya kaum proletar pada revolusi Oktober bukan berarti seluruh gerakan (taktikstrategi) yang dijalankan di Rusia dapat diterima begitu saja untuk diterapkan di Indonesia. Tinjauan teoritis Marxist menyatakan, revolusi Proletariat hanya dapat dilakukan apabila keadaan ekonomi negara berada dalam kungkungan kaum borjuasi, (ini berarti adanya pertentangan kelas) dan sistem perekonomiannya mestilah didasari atas kekuatan –kekuatan produksi (hanya terjadi dalam masyarakat industri modern bukan manufaktur/agraris).

Di Indonesia kondisinya berbalik, masyarakat Indonesia, menurut Tan Malaka, adalah masyarakat yang perekonomiannya berjalan tidak seimbang, dengan kata lain sistem kapitalis Indonesia adalah cangkokan Barat.

“Kapitalisme di Indonesia satu cangkokan dari Eropa yang di dalam beberapa hal tak sama dengan kapitalisme yang tumbuh dan dibesarkan dalam negerinya sendiri, yakni Eropa dan Amerika Utara. Kapitalisme yang masih muda,... hal ini berakibat, produksi dan pemusatannya belum mencapai tingkatan yang semestinya. Kira-kira seperempat abad belakangan baru dimulai Industrialisasi di Indonesia.”¹³⁴

¹³⁴ Uraian Tan Malaka mengenai keadaan perekonomian di Indonesia memiliki signifikansi terhadap langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Tan Malaka melihat keadaan ekonomi di Indonesia belum dapat dikategorikan sebagai “kapitalisme matang”. Sebagai contoh Tan Malaka menguraikan bagaimana kerja industri yang dipusatkan di pulau Jawa dan beberapa tempat di Sumatra, dan pemusatan di pulau Jawa ini mengakibatkan Industri di Indonesia akan tetap menjadi industri pertanian, sebab hasil bumi seperti logam, batu bara, emas, minyak tanah, arang, nikel, dll yang menjadi tulang punggung ekonomi industri banyak terdapat di Sumatra. Ditambah lagi cara kerja produksi bumiputra diadopsi dari negeri asing (Belanda, Inggris, Amerika [Eropa]) dan bukan dari kerja evolusi ekonomi sendiri. lihat Tan Malaka, *AksiMassa...op.cit.*, 2000, hlm. 45-50

A. MADIALOG *vis a vis* Logika Mistika

Melihat kenyataan kondisi masyarakat Indonesia yang masih dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan revolusi maka Tan Malaka mengidentifikasi penyebab utama kejumudan yang dialami masyarakat Indonesia itu dengan pertama melihat *weltanschauung* (pandangan hidup) bangsa dan landasan tempat kepercayaan itu berpijak (filsafat). Kesimpulan yang diperoleh Tan Malaka adalah bangsa Indonesia masih dalam kungkungan “logika gaib”. Logika yang tidak memiliki alasan kuat untuk diuji kesahihannya. Disini pulalah letak signifikansi MADIALOG (Materialisme-Dialektika-Logika) karya Tan Malaka yang berusaha merombak “cara berfikir” masyarakat Indonesia.

Contoh yang sering digunakan Tan Malaka ketika membahas logika mistika adalah ucapan dewa Ra.¹³⁵Dewa Ra dalam melakukan penciptaan hanya dengan mengucapkan *Ptah*, maka timbullah berbagai macam kreasi. Tan Malaka membenturkan kepercayaan ini dengan filsafat materialisme, menurutnya:

“Firman Ra itulah yang menggambarkan jawaban yang paling jitu dan paling konsekuen, jujur dasar, atas pertanyaan yang maha penting dalam filsafat...tetapi

¹³⁵ Dewa Ra adalah dewa yang paling tinggi diantara dewa lain dalam kepercayaan mesir kuno. Dalam mitos Babilonia belum mengenal teori *creation ex nihilo*, maka dengan sendirinya keberadaan dewa-dewa dan manusia berasal dari bahan yang telah ada secara alamiah, suci dan abadi. Selanjutnya masyarakat Babilonia mencoba menggambarkan zat suci tersebut dengan mengatakan zat primordial-suci itu mirip dengan tanah berpaya di Mesopotamia yang dengan mudah melakukan kerusakan terhadap hasil kreasi manusia. Selanjutnya dari tanah berpaya tersebut melahirkan tiga dewa; Apsu (diidentifikasi dengan air sungai yang manis), beristri bernama Tiamat (laut asin) dan Mummu (sumber kekacauan). Secara emanasi ketiga dewa tersebut melahirkan dewa-dewa lain secara berpasangan. Keturunan mereka saling berselisih hingga dan saling bunuh, dari keturunan dewa Ea – lah nantinya melahirkan dewa Marduk (dewa matahari) lihat Karen Amstrong, *Sejarah Tuhan*, terj. Zaimul Am, Mizan, Bandung, 2001, hlm. 32-34

ilmu pasti...ialah berdasarkan filsafat yang sebaliknya. Di sini rohani yang berupa kodrat, *Kracht*, *Force*, tiadalah barang yang dianggap terpisah, yang berdiri sendiri...di sini daya, kodrat itu terkandung oleh *matter*, oleh benda. Di mana ada benda disana baru ada daya.”¹³⁶

Jika diamati, keberatan-keberatan yang diajukan Tan Malaka mengenai kehebatan dewa Ra selalu dalam perspektif filsafat materialisme yang melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan empirik. Tidak jarang dia kemukakan *the law of evolution*-nya Darwin untuk memperkuat argumentasinya menentang kepercayaan kuno itu. Uraian Tan Malaka dalam rangkaian dekonstruksi logika mistika, yang dia asumsikan sebagai cara pikir orang Asia khususnya Indonesia, nampaknya mengikuti logika kaum Marxist. Hal demikian sangat jelas dalam uraiannya mengenai filsafat, dengan mengikuti Engels, filsafat harus dibagi menjadi dua kutub yang saling bertentangan; materialisme dan idealisme.¹³⁷

Dalam Bab logika, Tan Malaka hanya menguraikan kembali hukum-hukum logika yang sudah ada¹³⁸, tidak banyak yang dia sumbangkan dalam bahasan ini, dia

¹³⁶ Tan Malaka, *Madilog*, *Loc.cit*, hlm. 30

¹³⁷ Tan Malaka, *Madilog...op.cit.*, hlm. 42

¹³⁸ Nampaknya Tan Malaka begitu menguasai kajian logika dengan menganjurkan pembaca MADIALOG membaca buku-buku logika yang mungkin pernah dia baca, seperti: *A System of Logic, Rainative-Inductive* karya John Stuart Mill; *The Principles of Science: A Treatise of Logic and Scientific Method* karya Jevons (W.Stanley); *Logische Untersudschungen* karya Irendelenburg; *Die Prinzipien der Logik* karya Wondelband; *De Weg der Wetenschap, Een Handboek der Logica* karya Opzoomer; *Eet Wezen der kennis, een lessboek der Logica* karya Opzoomer. lihat Tan Malaka, *Madilog*, *loc.cit*, hlm. 178-179. Sehingga wajar sesekali Franz Magnis memuji MADIALOG “tidak hanya menjelaskan hakikat *ilmu pengetahuan* dan *logika*, melainkan memberikan uraian terinci, diatas puluhan halaman, persis seperti dalam buku pelajaran logika.” Lihat Franz Magnis Suseno, *Dalam Bayangan Lenin...op.cit.*, hlm. 213

menekankan bahwa logika bagaimanapun urgennya tetaplah bersifat matematis dan kaku, maka untuk mengatasi kekurangan dalam logika, terutama dalam bidang sosial-politik yang selalu berubah, dibutuhkan suatu perangkat tambahan yaitu dialektika. Sekali lagi Tan Malaka memperlihatkan kecenderungannya pada filsafat materialisme. Dialektika yang dia puja-puja adalah dialektika materialisme yang diformulasikan Marx dan Engels. Meskipun Hegel yang menemukan hukum dialektika, tetapi ada perbedaan yang mencolok antara Hegel dan Marx dalam menyikapi persoalan dialektika. Hegel menyandarkan dialektika itu pada tafsiran dan teori idealisme sedangkan Marx dan Engels mendasarinya pada materialisme. Mengikuti analisis Plekanov, Tan Malaka menggambarkan pertentangan antara keduanya dengan menulis: “dalam sistem Hegel, maka *demiurge, creator* atau pembikin yang nyata (*reality*), ialah *absolute idea*. Buat kami, ide mutlak itu cuma satu pemisahan (*abstraction*) dari gerak.”¹³⁹ Sedangkan di tangan Marx dan Engels, “dialektika yang berbasis ide itu dikembalikan ke tanah dan dialektika semacam ini menjadi senjata revolusi semata-mata.”¹⁴⁰

Uraian Tan Malaka mengenai cara berfikir khas MADILOG selalu berada dalam sketsa filsafat materialisme, tujuannya tidak lain membuka kungkungan logika mistika yang selama ini menyelimuti bangsa Indonesia. Tan Malaka meyakini dengan sangat bahwa hanya dengan meninggalkan irrasionalitas dan mempergunakan ilmu pengetahuan (*science*) bangsa Indonesia dapat keluar dari belenggu penjajahan.

¹³⁹ Tan Malaka, *Pandangan Hidup*, Lumpen, Jakarta, 2000, hlm. 57

¹⁴⁰ Tan Malaka, *Ibid*, hlm. 57

Tetapi dalam MADIALOG Tan Malaka juga menegaskan antara kemerdekaan berfikir dan kemerdekaan bangsa tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. “Kemerdekaan sains itu sehidup semati dengan kemerdekaan negara. Begitu juga kemerdekaan sains bagi satu kelas, sehidup dan semati dengan kemerdekaan kelas itu.”¹⁴¹

Dalam uraian yang panjang tentang filsafat materialisme serta cabang-cabangnya terdapat satu hal yang nampak janggal dalam MADIALOG, yaitu ketika menyisipkan satu bagian tentang kepercayaan. Nampaknya dalam hal ini Tan Malaka belum dapat begitu saja melepaskan keyakinannya terhadap agama yang dia anut sejak kecil. Bermula dari pembahasan mengenai agama asli Indonesia hingga sampai pada kepercayaan Asia Barat (bahasa yang digunakan Tan Malaka untuk menyebut tiga agama samawi: Yahudi, Nasrani dan Islam). Tan Malaka mengakui bahwa masalah kepercayaan bukanlah kajian dalam MADIALOG namun dia tetap beralasan dengan mengatakan :

“Madilog tak bisa berlaku langsung atas kepercayaan...sebagian dari pengetahuan satu kepercayaan bisa jadi sekali cocok dengan logika atau dialektika, tetapi segala dasar buktinya (premisnya) tak takluk pada pengalaman dan tak bisa dipraktekkan. Seperti sudah saya bilang lebih dulu, benar tidaknya suatu kepercayaan terserah pada otak, perasaan, kemauan, atau singkatnya pada jiwa masing-masing. Madilog tidak bisa berlaku langsung atas kepercayaan, karena kepercayaan itu kekurangan alat untuk melangkah, yaitu *matter*. Tapi dengan jalan memutar, atau tak langsung, Madilog bisa menerangkan

¹⁴¹ Tan Malaka, *Madilog, Op.cit*, hlm. 55

kepercayaan itu dengan bersikap sebagai obor listrik yang berdiri di luar, tidak memasuki barang itu selutuhnya.”

Penjelasan Tan Malaka menyangkut kepercayaan dalam MADIALOG seperti sedang melakukan perkawinan silang antara dua posisi yang berseberangan. Ketika mengkaji masalah ilmu pengetahuan, logika dan dialektika Tan Malaka seringkali menggunakan kalimat-kalimat fulgar yang bernada sinis. Tetapi di lain pihak Tan Malaka nampak mengagungkan agamanya, Islam, sebagai agama monoteisme paripurna.¹⁴² Bagaimana mungkin dalam satu kajian mengenai ilmu pengetahuan modern yang mengagungkan materialisme secara bersamaan menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan yang sungguh-sungguh bermuara pada wilayah *faith* (immateri)?

B. Tan Malaka dan Revolusi

“revolusi bukanlah suatu pendapatan otak yang luar biasa, bukan hasil persediaan yang jempolan dan bukan lahir atas perintah seorang manusia yang luar biasa. Kecakapan dan sifat luar biasa dari seseorang membangun revolusi, mempercepat atau memimpinnya menuju ke kemenangan, tetapi ia tidak dapat menciptakan dengan otaknya sendiri. Satu revolusi ialah yang disebabkan oleh pergaulan hidup, satu hakekat tertentu dari perbuatan – perbuatan masyarakat.

¹⁴² Tan Malaka ketika membahas agama Islam terlihat sangat tendensius dan romantisme, dia terpaksa mengenang kembali masa kecilnya dengan asuhan kedua orang tua yang taat kepada aturan agama Islam. sudah semestinya Tan Malaka tidak memasukkan bagian ini dalam Madilog, cukuplah dia terangkan “pandangan hidup” dalam autobioğrafinya bahwa pada kesimpulannya “agama tinggal tetap sesuatu kepercayaan bagi masing-masing orang”. Lihat Tan Malaka, *Pandangan Hidup...op.cit.*, hlm. 28 atau Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara III...op.cit.*, hlm. 32. tetapi kemungkinan lain yang mungkin saja dipikirkan Tan Malaka ketika itu adalah Tan Malaka berusaha menegaskan cara berfikir madilog dapat didielektikkan dengan kepercayaan manapun sebagaimana dia tulis sendiri.

Atau disebut dengan perkataan dinamis, dia adalah akibat yang tertentu dan tak dapat disingkirkan dari timbulnya pertentangan kelas yang makin hari makin bertambah tajam. Ketajaman pertentangan yang menimbulkan pertempuran ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, politik dan psikologis.”¹⁴³

1. Revolusi Sosial

Bermula dari pandangan sejarah masa lalu, Tan Malaka melihat bahwa ketidak- setaraan sosial dalam masyarakat terjadi karena adanya keinginan sebagian kecil orang mencaplok sebagian yang lainnya. Budaya stratifikasi sosial ini nampaknya merupakan budaya warisan (*transmission*) Hindu yang kemudian berurat berakar pada masyarakat Indonesia. Tan Malaka melihat dalam masyarakat asli Indonesia sebenarnya tidak terdapat pertentangan antara kelompok satu dengan yang lainnya. Dalam *Pandangan Hidup* Tan Malaka memberikan contoh sistem masyarakat Indonesia asli semisal orang Kubu (Sumatra Selatan), Semang (Malaya), Dayak (Kalimantan) dan orang Irian di Papua.¹⁴⁴ Pada masyarakat asli Indonesia segala sesuatu diurus bersama dan dimiliki bersama untuk kelangsungan hidup. Sumber – sumber alam tidak dikuasai oleh sekelompok orang tetapi sebaliknya dan bahkan alam dimitoskan sebagai kekuatan suci tempat mereka menyandarkan hidup.

¹⁴³ Tan Malaka, *Aksi Massa...op.cit.*, hlm. 1

¹⁴⁴ Tan Malaka, *Pandangan Hidup...op.cit.*, hlm. 2. Contoh paling nyata masyarakat asli Indonesia yang sekarang masih ada mungkin sekali terdapat di beberapa suku pedalaman Indonesia, suku kubu di pedalaman Jambi dan suku Dayak di Kalimantan hingga saat ini masih dapat disaksikan keberadaannya. Bahkan di Kalimantan terdapat agama Kaharingan yang begitu mendewakan alam (panteisme). Mereka semua tidak pernah merasa memiliki alam sebagai otoritas satu golongan, kalaupun terjadi konflik biasanya diselesaikan secara adat

Dalam perkembangannya, masyarakat Indonesia yang semula masyarakat Komunisme asli mengalami perubahan seiring masuknya agama dan budaya asing. Hindu dengan sistem kastanya meninggalkan bekas yang cukup signifikan terhadap sistem kemasyarakatan Indonesia, terutama di Jawa, Tan Malaka mengamati adanya perbedaan *tutur* dalam masyarakat Jawa merupakan bentuk transmisi budaya Hindu (India) yang diadopsi begitu saja. Melalui media wayang Hindu (India) secara persuasif menyusupkan ajaran-ajaran agama, bahasa dan budayanya ke Indonesia. Dengan bahasa *kromo* kasta Sudra harus berkomunikasi dengan kasta di atasnya (Brahmanan, Ksatria dan waisa) yang menggunakan bahasa ngoko.¹⁴⁵

Dengan adanya pembagian kelas menurut ajaran Hindu (India) Tan Malaka mengasumsikan, selanjutnya menjadi prasyarat perkembangan masyarakat menuju jenjang zaman perbudakan, feodalisme dan akhirnya sampai pada masa kapitalisme.¹⁴⁶ Ketika kekuasaan sistem kapitalisme terjadi, disinilah puncak segala pertentangan kelas terlaksana secara sempurna. Kelas penguasa mengintimidasi kaum lemah dan seluruh interaksi sosial tidak lagi didasari atas kemanusiaan dan persamaan melainkan atas dasar kekuatan ekonomi dan status sosial. Dengan

¹⁴⁵ Lihat Tan Malaka, *Madilog...op.cit.*, hlm. 158. Perbedaan kelas dalam masyarakat Indonesia, (khususnya Jawa) pada perkembangan selanjutnya, sesuai dengan penelitian Clifford Geertz, menjadi Santri, Abangan dan Priyayi. Meskipun banyak bantahan mengenai pembagian kelas versi Geertz ini tetap saja dalam beberapa tempat sering dianggap masih relevan.

¹⁴⁶ Uraian Tan Malaka mengenai perkembangan sejarah sejalan dengan analisis kaum Marxist. Nampaknya Tan Malaka agak sedikit memaksakan analisis Marx terhadap perkembangan sejarah manusia dengan “materialisme historis-nya” lihat Tan Malaka, *Pandangan Hidup...op.cit.*, hlm. 75-81. Karena dalam pengamatan Marx dalam *Das Kapital*, masyarakat Indonesia hanya dipresentasikan oleh masyarakat Jawa, itupun melalui buku karya Raffles. *A History of Java*. Tan Malaka semestinya menyadari uraiannya mengenai masyarakat pedalaman Indonesia yang tidak seluruhnya terjebak pada sistem kapitalisme.

demikian maka menurut Tan Malaka langkah yang harus diambil adalah melakukan revolusi sosial. perbedaan status, budaya bahasa dan warna kulit tidak menjadikan alasan untuk mendiskriminasi satu golongan karena secara alamiah manusia ditakdirkan “sama”.

2. Revolusi Ekonomi

Pengisapan sumber-sumber ekonomi di Indonesia berjalan cukup lama, sumber daya alam dan manusia diperas untuk kepentingan negaranegara penjajah. Dalam pengamatan Tan Malaka, pemerasan dan penindasan tidak disebabkan oleh faktor watak manusianya melainkan atas kedudukan dan cara menjalankan kapitalnya.¹⁴⁷ Sebagai contoh Tan Malaka menunjuk pada Portugis dan Spanyol ketika memasuki Asia. Kedua negara tersebut menurut Tan Malaka tidak dapat melepaskan kondisi negara asalnya yang masih bersifat feodal. Pergerakan ekonomi masih dijalankan secara manual karena industri mesin belum tersedia. Berbeda dengan Belanda yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 1600, di negara Belanda sebagian besar feodalisme telah terdesak oleh kaum borjuasi. Sehingga negeri Belanda yang ketika itu dalam kondisi perekonomian kapitalis muda menjajah Indonesia dengan cara yang sama dengan keadaan ekonomi mereka, dan mereka, menurut Tan Malaka tidak dapat menjadi negara industri karena Belanda tidak memiliki bahan baku industri besar seperti; kapas, batu bara dan besi.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Tan Malaka, *Aksi Massa...op.cit.*, hlm. 29

¹⁴⁸ Tan Malaka, *Aksi Massa, Ibid*, hlm. 41

Di Indonesia keadaannya sangat pasif, industri bumi putera tidak mampu bersaing dengan negara penjajah. Perusahaan minyak dan kebun-kebun terpenting hampir semuanya dikuasai oleh Inggris. Hal ini disebabkan kurangnya kapital dan industri bagi Belanda, maka Tan Malaka memprediksikan suatu saat untuk menyaingi Inggris negara Belanda akan menggandeng Amerika dengan kapital di tanam di Indonesia.¹⁴⁹

Perkembangan dibidang perekonomian lambat laun semakin membesar, semula para borjuasi membentuk kumpulan-kumpulan dagang untuk memperluas wilayah jajahan. Kemudian dalam perkembangannya membuat kompeni yang lebih luas wilayah jajahan dan bidang kerjanya. Tan Malaka menjelaskan perkembangan tersebut, “di zaman kapitalisme modern, tidak berbentuk kongsi atau perkumpulan melainkan sudah naik menjadi kompeni kemudian sindikasi. Dari sindikat yang kurang terpusat dan teratur naik ke atas menjadi *trust*. Dari *trust* ke *combined-trust* atau gabungan beberapa *trust* di dalam maupun di luar negeri.¹⁵⁰ Kondisi monopoli perdagangan yang dikuasai oleh penjajah pada satu tahap mengalami *clash* (benturan) hal demikian terjadi karena kurangnya koordinasi diantara mereka sendiri, sehingga secara intern pertentangan itu akan mencuat ke permukaan dengan persaingan harga yang tak terkendali. Tan Malaka menyebutnya, dengan mengutip dua aturan ekonomi

¹⁴⁹ Tan Malaka, *Aksi Massa, Ibid*, hlm. 53

¹⁵⁰ Tan Malaka, *Madilog, Op.cit.* hlm. 170

kapitalis, sebagai produksi liar (*anarchy in the production*) dan persaingan (*concurrency*).¹⁵¹

Tan Malaka mengetahui cara kerja sistem kapitalis yang secara intern pasti terjadi konflik, maka Tan Malaka lebih mementingkan menanamkan kesadaran rakyat Indonesia yang masih berada dalam “kegelapan” pengetahuan modern. Sumber daya manusia Indonesia ketika itu (tahun 1926) yang tahu baca tulis hanya sekitar 5-6% saja dari penduduk Indonesia yang berjumlah 55 Juta. Maka tidak mungkin rakyat Indonesia menciptakan tenaga – tenaga teknis yang diperlukan untuk menyaingi produksi Barat dalam waktu singkat.¹⁵²

Secara teoritis pertentangan dua kelas antara Borjuasi dan Proletar dapat terjadi di dunia kapitalis modern. Sedangkan Indonesia yang dalam kondisi masyarakat agraris, walaupun kapitalis tergolong kapitalis muda, tidak mungkin dapat menyegerakan revolusi proletar seperti Rusia. Maka Tan Malaka beranggapan, mengingat keadaan negara masih belum terbentuk, yang pertama harus dilakukan adalah perebutan kekuasaan secara total dan menyeluruh, atau dengan bahasa Tan Malaka, merdeka 100%. Baru kemudian menyusul persamaan distribusi dan kesempatan kerja pada seluruh masyarakat tanpa mengenal kelas. Tetapi Tan Malaka mengingatkan dalam melakukan perjuangan kemerdekaan analisa tetap didasari atas analisis materialisme dialektis yang selalu mengawasi perkembangan perekonomian

¹⁵¹ Tan Malaka, *Madilog, Ibid*, hlm. 171

¹⁵² Tan Malaka, *Menuju Republik Indonesia*, Komunitas Bambu dan Yayasan Massa, Jakarta, 2000, hlm. 14

dunia. “dalam taupan gelombang politik ekonomi dunia itulah kita dipaksa oleh keadaan mengemudikan kapal negara kita yang berdasarkan politik ekonomi pula.”¹⁵³

Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang masih belum stabil gagasan Tan Malaka mengenai sistem perekonomian komunistis nampak tetap konsisten sejak Indonesia belum merdeka sampai Indonesia merdeka. Tan Malaka tetap menolak kerjasama dengan negara penjajah dalam bidang ekonomi. Perekonomian Indonesia harus diatur dan di urus sendiri dan untuk mencapainya tidak ada jalan lain kecuali adanya kemerdekaan di bidang politik. “Bagaimanakah suatu teori ekonomi bisa dijalankan kalau yang menjalankan itu sama sekali tiada mempunyai kekuasaan politik?”¹⁵⁴

“kaum murba harus menunda rencana ekonomi sejati dan besarbesaran sampai revolusi ini selesai dengan kemenangan kaum murba. Namun selama revolusi ini berlangsung memang kaum murba harus tetap menjalankan rencana ekonomi. Rencana itu tak lain adalah ‘rencana ekonomi-perang’. Dalam ‘perang ekonomi melawan Belanda itu semua sikap dan tindakan ekonomi yang harus dilakukan ialah: (1). Mengambil sikap dan tindakan dalam ekonomi (yaitu dalam produksi distribusi dan lain-lain) untuk merugikan perekonomian Belanda. (2) mengambil sikap dan tindakan dalam ekonomi yang bersifat menguntungkan rakyat yang sedang melakukan revolusi.”¹⁵⁵

¹⁵³ Tan Malaka, *Thesis*, Yayasan Massa, Jakarta, 1987, hlm. 4

¹⁵⁴ Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara II...op.cit.*, hlm. 376

¹⁵⁵ Tan Malaka, *GERPOLEK*, Jendela, Yogyakarta, 2000, hlm. 113

3. Revolusi Politik

Semua negara di manapun di dunia ini telah bersepakat bahwa kemerdekaan adalah suatu hak. Kemerdekaan mengatur diri sendiri dalam segala bidang yang menyangkut semua aktifitas pemerintahan dan rakyatnya adalah syarat utama menegakkan suatu negara yang demokratis. Tan Malaka mengakui, “keadaan politik Indonesia belum pernah menjadi *a common good*, kepunyaan umum rakyat”¹⁵⁶ bermula dari zaman feodal, pemerintahan dipegang oleh sekelompok kecil orang saja dan semua kebijakan berada di tangan mereka bukan rakyat. Dalam kaitannya dengan usaha memerdekakan bangsanya dari belenggu penjajah inilah pada tahun 1924 Tan Malaka menulis buku *Naar de Republiek Indonesia*. Dalam buku ini Tan Malaka menguraikan program nasional yang harus segera dilaksanakan terutama oleh PKI karena partai revolusioner yang berbasis komunis di Indonesia hanya PKI ketika itu. Berikut program-program di bidang politik:

- Kemerdekaan Indonesia dengan segera dan tak terbatas - Membentuk republik federasi dari pelbagai pulau-pulau Indonesia
- Segera memanggil rapat nasional dan yang mewakili semua rakyat dan agama di Indonesia - Segera memberikan hak politik sepenuhnya kepada penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.¹⁵⁷

Program kerja yang dirancang Tan Malaka berkaitan dengan politik ditujukan hanya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dari negara imperialis. Jika perebutan

¹⁵⁶ Tan Malaka, *Aksi Massa...op.cit.*, hlm. 93

¹⁵⁷ Tan Malaka, *Menuju Republik Indonesia...op.cit.*, hlm. 24

kekuasaan telah terlaksana maka tindakan selanjutnya adalah mengembangkan sendi-sendi pokok perekonomian. Dua hal inilah menurut Tan Malaka yang menjadi *sin quanon* tumbuh tumbangnya suatu negara. Untuk mencapai kemerdekaan perangkat analisis Tan Malaka selalu merujuk pada ajaran-ajaran Marx, seperti dia katakan sendiri: “kita akui penuh bahwa aliran yang kita pakai ialah aliran Marx yang berdasarkan pertentangan dalam hal sosial, politik, ekonomi.”¹⁵⁸

Tan Malaka tidak pernah ragu dengan kekuatan yang dimiliki oleh rakyat murba Indonesia untuk melakukan revolusi, dengan catatan massa aksi dibawah organisasi partai yang teratur dan berdisiplin. Aksi-aksi yang dilakukan meskipun harus dengan peperangan bersenjata jangan sampai terjebak pada *putch*. Senjata yang dimiliki rakyat Indonesia sangat sederhana tetapi apabila dilakukan secara massif dan teratur bersama seluruh lapisan rakyat maka kemerdekaan bukanlah suatu utopia.

Yang menarik adalah ketika Tan Malaka menjelaskan jalannya revolusi Indonesia masih bersifat *trial and error* (coba-coba).¹⁵⁹ Tan Malaka mengamati revolusi Prancis dan Rusia tidaklah sama dengan revolusi yang akan dilakukan di Indonesia. Menurutnya yang sama adalah cara berfikirnya yaitu materialisme dialektis. “*Marxism is not dogma but a guide to action.*”¹⁶⁰ Tetapi dalam sebuah

¹⁵⁸ Tan Malaka, *Thesis...op.cit.*, hlm. 4

¹⁵⁹ Tan Malaka mengamati belum ada acuan yang tepat untuk Indonesia melakukan revolusi, maka bagi Tan Malaka revolusi Indonesia adalah sebuah revolusi coba-coba, dalam arti revolusi yang sama sekali baru dan belum pernah terjadi di negara-negara lain. Lihat Tan Malaka, *Thesis, Ibid*, hlm. 4

¹⁶⁰ Menurut Tan Malaka ajaran Marx yang diterapkan di Rusia memang suatu pedoman jalannya revolusi, karena Rusia adalah negara pertama yang berhasil menerapkan ajaran-ajaran Marx dalam bentuk pergerakan. Tetapi realitanya situasi dan kondisi perangkat menuju revolusi antara Rusia

revolusi Tan Malaka tetap mendasari pada sikap, sifat, tindakan dan kesimpulan yang Marxistis yaitu: cara penjelasan yang materialistis, tafsiran yang materialistis dan semangat revolusioner.¹⁶¹

Bagi Tan Malaka revolusi Indonesia sudah di depan mata tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan revolusi. Tan Malaka mengamati kekuatan rakyat semakin kuat. Bermula dari analisisnya terhadap jumlah pejuang, kemudian wilayah, keuangan, kesusilaan dan organisasi (sosial) keuntungan sangat jelas ada di pihak Indonesia, kekurangan rakyat Indonesia hanya pada persenjataan. Akan tetapi jika perjuangan dilakukan dengan sabar dan ulet maka kemerdekaan dari penjajah bukan mustahil dicapai.¹⁶² Tan Malaka nampaknya sangat menyadari dalam melakukan revolusi yang dilakukan oleh tiap-tiap golongan rakyat Indonesia mesti dibutuhkan pendidikan politik dan koordinasi. Karena tiap-tiap golongan membawa kepentingan masing-masing, hal ini dapat menyebabkan perpecahan dari dalam dan menghambat revolusi. Maka menurut Tan Malaka pergerakan revolusi harus berada di bawah pimpinan orang yang

dan Indonesia sangat berbeda, maka Tan Malaka memformulasikan pokok ajaran Marxist yang tetap sama di setiap tempat adalah (1) cara (metode) menyelesaikan dan memahami soal masyarakat (*social problem*) ialah dengan cara dialektika (hukum pertentangan). (2) tafsiran, paham dan teori tentang kejadian (*phenomena*) dalam masyarakat itu didasarkan atas teori materialisme (kebendaan). (3). Semangat pemeriksaan dan penjelasan soal masyarakat dan tindakan yang didasarkan kepada kesimpulan itu haruslah semangat kemajuan revolusioner. Lihat Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara III...op.cit.*, hlm. 110-111

¹⁶¹ Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara III, Ibid*, hlm. 111

¹⁶² Tan Malaka, *Gerpolek...op.cit.*, hlm. 72-73

mengerti, cerdas, berpandangan jauh serta memahami keadaan kaum murba dan tiap-tiap tingkatan pergerakan yang akan dilakukan.¹⁶³

Pergerakan yang dilakukan rakyat murba dalam kapasitasnya tetap merujuk pada kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Semua kekuatan rakyat berada di bawah satu payung yaitu kemerdekaan Indonesia 100%. Tanpa diplomasi dengan negara manapun. Konsep-konsep politik Tan Malaka nampak tidak mengalami banyak perubahan. Dia tetap mempercayai akurasi analisis Marxist untuk melakukan revolusi dan menuju kemerdekaan.

4. Revolusi Pendidikan

Tidak banyak yang dapat dipelajari mengenai gagasan Tan Malaka tentang pendidikan. Hanya satu brosur kecil yang dia tulis pada tahun 1921 di Semarang dengan judul *SI Semarang dan Onderwijs* yang menerangkan tentang konsep pendidikan rakyat Indonesia. Rencananya dia akan menulis sebuah buku mengenai pendidikan kaum murba Indonesia, seperti yang dia tulis sendiri: “tentulah akan lebih suka lagi, kalau mempunyai satu buku, yang lebih jelas menerangkan keadaan serta hal ikhwalnya sekolah itu.”¹⁶⁴ Tetapi belum sempat rencananya itu direalisasikan dia tertangkap polisi Hindia Belanda.

Tidak mengherankan kiranya apabila Tan Malaka mengurus bidang pendidikan di sekolah-sekolah rakyat karena *basic* pendidikannya memang mengarah pada pendidikan dan pengajaran. Tan Malaka menyadari pendidikan yang ada di

¹⁶³ Tan Malaka, *PARI Manifesto Jakarta 1945*, Yayasan Massa, Jakarta, 1986, hlm. 41

¹⁶⁴ Tan Malaka, *SI Semarang dan Onderwijs*, Yayasan Massa, Jakarta, tt, hlm. 1

bawah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda sangat sedikit dan hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan para penjajah. Pendidikan yang diterima Tan Malaka sendiri adalah pendidikan dengan sistem yang dibuat oleh pemerintah Hindia dan sekembalinya dari Belanda untuk pertama kalinya Tan Malaka sempat mengajar anak-anak Belanda di sekolah rendah.

Disaat itulah Tan Malaka bertemu dengan Prof. Snouck Hurgronje dan diberi nasihat akan pentingnya kesamaan perasaan, jiwa dan bahasa dalam dunia pendidikan. “Semenjak itu saya sangsi akan arahnya didikan saya. Saya malu untuk mendapatkan hak jadi guru mengajar anak Belanda yang tidak sebahasa, sebangsa dengan saya, dan tak akan saya jumpakan jiwanya dengan bahasa ibunya.”¹⁶⁵

Tan Malaka menyadari betapa penting sebuah pendidikan bagi masyarakat Indonesia yang sedang berjuang melawan penjajah Belanda. dia mengasumsikan satu faktor dominan yang menyebabkan bangsa Indonesia sekian lama dalam kungkungan penjajah adalah karena kurangnya pengetahuan. Sementara sekolah-sekolah yang ada belum lagi memadai untuk mendidik anak – anak Indonesia kelas bawah (murba). Sekolah-sekolah Belanda, menurut Tan Malaka, adalah sekolah-sekolah yang sengaja dirancang untuk kepentingan penguasaan kapital. Pendidikan yang berdasarkan dan untuk kaum modal harus di lawan dengan pendidikan berdasarkan dan untuk rakyat.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Tan Malaka, *Dari Penjara ke Penjara...op.cit.*, hlm. 35

¹⁶⁶ Tan Malaka, *SI Semarang dan Onderwijs...op.cit.*, hlm. ii

“yakni kalau kita bandingkan dengan *geest* di sekolah-sekolah partikulier ataupun H.I.S. Gouvernement. Nyata buat kita yang anakanak suka bekerja keras untuk mencari kepandaian, yang perlu kelak buat keperluan hidup (seperti membaca, menulis, berhitung, bahasa, dsb) pada dunia kemodalan, yang tiada mempunyai kasihan satu sama lain, pada dunia yang memberi rezeki dan keselamatan cuma pada yang kuat dan pintar saja.”¹⁶⁷

Dalam ringkasan program – program “sekolah rakyat”, Tan Malaka menuliskan tiga buah target pokok yang akan dicapai: - Memberi senjata cukup, buat pencari penghidupan dalam dunia kemodalan (berhitung, menulis, ilmu bumi, bahasa Belanda, Jawa, Melayu, dsb.)

- Memberi haknya murid-murid, yakni kesukaan hidup, dengan jalan pergaulan (vereenniging)

- Menunjukkan kewajibannya kelak, terhadap pada berjuta-juta kaum kromo¹⁶⁸

Nampak sekali strategi Tan Malaka untuk menghambat lajunya pendidikan gaya Imperialis Belanda dengan memasukkan pendidikan bahasa Belanda. “sebab kelak perlawanannya ialah kaum modal, yang memakai bahasa Belanda, maka perlu sekali kita ajarkan bahasa itu.”¹⁶⁹ Dalam brosur *Massa Aksi*, Tan Malaka menuliskan program-program revolusi bidang pendidikan untuk bangsa Indonesia yang akan dilaksanakan oleh kaum murba :

¹⁶⁷ Tan Malaka, *SI Semarang dan Onderwijs, Ibid*, hlm.

¹⁶⁸ Tan Malaka, *SI Semarang dan Onderwijs, Ibid*, hlm. 5-6

¹⁶⁹ Tan Malaka, *SI Semarang dan Onderwijs, Ibid*, hlm. 9

- Pengajaran diwajibkan dan diberikan percuma diberikan kepada kanak-kanak tiap-tiap warga negara Indonesia sampai berumur 17 tahun dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang terutama.
- Meruntuhkan sistem pengajaran yang sekarang , dan mengadakan sistem baru, yang berdasarkan langsung atas kebutuhan industri yang ada atau yang bakal diadakan.
- Memperbaiki dan memperbanyak sekolah pertukangan, pertanian dan dagang dan memperbaiki serta memperbanyak sekolah teknik tinggi dan sekolah untuk pengurus tata usaha.¹⁷⁰

Program – program revolusi pendidikan yang dicita-citakan Tan

Malaka berorientasi pada pendidikan kaum murba dibawah asuhan para intelektual murbaisme. Semangat mencerdaskan bangsa itu tidak lain merupakan sebuah usaha memerdekakan bangsa Indonesia dan menjadikannya masyarakat ber peradaban maju.

C. Agama dan Budaya Sumber Etika Politik

Bermula dari penjelasan mengenai jiwa, Tan Malaka mengikhtisarkan sebuah kerangka teori mengenai batasan baik dan buruk (etika). Bagi Tan Malaka jiwa itu bagian dari alam, ketika manusia mati maka jiwanya tidak lenyap atau mengalami reinkarnasi atau juga harus menghadapi pertanggungjawaban dihadapan Tuhan. Mengenai jiwa ini sebelum memberikan argumentasi terhadap pandangannya Tan Malaka mengajukan beberapa pertanyaan: “tetapi di mana dan kapankah tuan

¹⁷⁰ Tan Malaka, *Aksi Massa, Loc.cit*, hlm. 184

berjumpa dengan jiwa yang terpisah dari benda, yang tidak menerima sifat kebendaannya?”¹⁷¹

Tan Malaka menambahkan bahwa jiwa merupakan suatu perkembangan selama jutaan tahun yang dibawa oleh benda dan mengikuti hukum logika dan dialektika sehingga menjadi manusia.¹⁷² Tan Malaka juga mencoba memasuki wilayah psikologi untuk memperkuat argumentasinya, menurutnya ada tiga pola yang menentukan jiwa: akal, perasaan dan kemauan. Tiga pola tersebut dilihat oleh Tan Malaka dengan memindahkannya dalam dunia praksis dan ditinjau dari teori Cara Perubahan Bersama (*Comitant Variation*), perubahan sebab disertai akibat. Sementara “tuhan” dimaknai sama dengan kekuatan dan kodrat alam, maka kesimpulan yang diperoleh adalah jiwa itu tidak terpisah dengan alam, berdiri sendiri sebagai anugerah sempurna yang diterima oleh manusia.¹⁷³ Lantas kemanakah perginya jiwa setelah manusia mati? Tan Malaka memberikan penjelasan layaknya *scientist*, dia bersandar pada teori evolusi Darwin. Jiwa adalah melekat pada benda (tubuh) dan ketika tubuh manusia mati (tidak bergerak), dia (tubuh) akan bertukar bentuk, tak sekecil atompun bagian dari tubuh kita ini hilang di alam ini,¹⁷⁴ tubuh

¹⁷¹ Tan Malaka, *Madilog...op.cit.*, hlm. 421

¹⁷² Nuansa filsafat materialisme sangat nampak pada cara pikir Tan Malaka, sehingga pada jenjang tertentu Tan Malaka harus memposisikan manusia sebagai “benda”. Artinya manusia adalah benda sedangkan jiwa melekat pada benda. Tetapi harus dicermati juga bahwa Tan Malaka membagi benda dalam dua golongan: benda mati dan hidup, dan keduanya saling kait mengait. Tan Malaka, *Madilog, Ibid*, hlm. 422.

¹⁷³ Tan Malaka, *Madilog, Ibid*, hlm. 425

¹⁷⁴ Tan Malaka, *Madilog, Ibid*, hlm. 425

akan berubah kualitas dan kuantitas berbaur dengan alam dan menjadi melekat pada materi lain dan akan memiliki jiwa kembali begitu seterusnya.

Penjelasan Tan Malaka tentang jiwa tersebut mungkin hanya batu loncatan menuju penjelasan selanjutnya yaitu tentang keimanan dan moral. Tan Malaka melihat bagaimana berlakunya sikap dan tindakan masyarakat beragama terhadap perbuatan baik dan buruk. Kesan yang diperoleh Tan Malaka tentang masyarakat Indonesia, mungkin terperangkap pada kesenangan pribadi saja (egosentris) tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat. Tan Malaka mencontohkan tiga agama besar (Islam, Yahudi dan Nasrani) yang memberikan pengharapan-pengharapan di hari pembalasan yang kekal abadi.

Bagi Tan Malaka perkara baik buruk tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat. Baik dan buruk harus dipahami dalam koridor sosial – historis, parameternya adalah masyarakat itu sendiri.¹⁷⁵Tan Malaka mengambil contoh masyarakat Rusia setelah revolusi Oktober,” pengertian buruk baik dan iman itu oleh

¹⁷⁵ Sekali lagi kita dapat melihat dengan jelas analogi Tan Malaka mengarah pada analisis Marxist terhadap agama dan moralitas. Marx mengkritik agama meminjam analisis Feuerbach yang mengidentikkan agama selalu terpaku pada teosentris. Hingga akhirnya Marx sampai pada kesimpulan “agama adalah candu masyarakat”. Tesis Marx mengenai agama ini hendaknya dipahami dalam frame materialisme historis. Dalam hukum perkembangan sejarah, Marx membagi struktur masyarakat menjadi sub-struktur (*basic*) dan supra struktur. Sub-struktur adalah ekonomi dan supra struktur adalah apa-apa yang menjadi perilaku dan cara berfikir masyarakat dalam segala bidangnya. Seluruh bangunan atas (supra struktur) tersebut sangat dipengaruhi oleh substruktur, maka dengan sendirinya, menurut Marx, cara berfikir masyarakat, agama, pendidikan, nilai, norma, dsb dipengaruhi oleh kelas-kelas pemegang kekuatan ekonomi. Dalam dunia kapitalis kekuatan ekonomi dikuasai oleh para borjuasi, dan untuk merebutnya dibutuhkan revolusi kaum proletar. Semangat revolusi kekuasaan sumber ekonomi tidak akan tercapai apabila masyarakat berada dalam kungkungan logika agama yang teosentris, mengawang, dan transenden. Agama semacam inilah yang dikutuk oleh Marx sebagai candu.

partai yang memimpin rakyat disana tidak lagi didasarkan atas hukuman dan ganjaran Tuhan di akhirat.”¹⁷⁶ Pandangan Tan Malaka terhadap moralitas dan keimanan memang sungguh mengejutkan banyak pihak, dalam hal ini pula mungkin banyak kesalahan penilaian orang terhadap Tan Malaka, seolah – olah Tan Malaka sedang menelanjangi agama yang selama ini diyakini sebagai yang suci dan *transcendent*. Ucapan lain Tan Malaka yang memperkuat asumsi bahwa Tan Malaka adalah anti agama (ateis) ketika terjadi konflik dalam tubuh Sarekat Islam, seorang pernah bertanya pada Tan Malaka, apakah Komunisme percaya pada Tuhan? Tan Malaka menjawab dengan bahasa Belanda: ”*Als ik voor God sta, ben ik Moslim, maar als ik voor de mensen sta, ben ik geenn moelim, omdat heeft gezegd date er onder de mensen vele duivels zijn*” (jika saya berdiri dihadapan Tuhan, saya adalah seorang muslim, tetapi jika saya berhadapan di depan manusia, saya bukan muslim sebab bukankah Tuhan pernah mengatakan bahwa diantara manusia itu banyak setannya).¹⁷⁷

Mengenai pandangan Tan Malaka terhadap agama ini nampaknya begitu rumit (*complicated*) dan sulit untuk diterima oleh sebagian besar orang. Maka untuk sedikit membantu memahami karakter berfikir Tan Malaka perlu pula disinggung mengenai adat istiadat Tan Malaka, yaitu Minangkabau. Alasan meninjau adat istiadat Minangkabau ikut mempengaruhi jiwa sosialis-komunis Tan Malaka bukan tak beralasan, sejarah mencatat Sjahrir, Hatta dan Moh. Yamin yang juga berasal dari

¹⁷⁶ Tan Malaka, *Madilog, Ibid*, hlm. 431

¹⁷⁷ Mestika Zed. dkk, *Mencari dan Menemukan Kembali...op.cit.*, hlm. 29. ungkapan ini pernah juga dikatakan Tan Malaka dalam pidato sidang Komintren ke-7 di Moskow. Lihat Harry Poeze... I, *op.cit.*, hlm. 315

Minangkabau memilih sosialis sebagai haluan politik mereka. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dan falsafah adat Minangkabau selaras dengan elemen dinamis Barat modern.¹⁷⁸

Adat dan masyarakat Minangkabau melihat konflik sebagai suatu yang penting demi progresifitas masyarakat. Gagasan ini terkait erat dengan hukum “dialektika” yang menekankan adanya “pertentangan” kualitas dan kuantitas menuju arah lebih baik secara kontinyu. Jika hukum dialektika itu berupa tesis-anti tesis = sintesis (menjadi tesis kembali) maka adat Minangkabau (alam) ditempatkan pada tesis, antitesis nya adalah budaya, adat, pengetahuan dari luar (mengambil bentuk dalam “rantau”)¹⁷⁹ dan sebagai sintesisnya adalah kekayaan perspektif baru untuk diambil dan membuang yang tidak sesuai dengan alamnya.¹⁸⁰

Tan Malaka bukan pengecualian dalam hal ini, dia adalah putra asli Minangkabau yang sangat memegang teguh adatnya. Dalam beberapa tulisannya tidak jarang dia menyisipkan syair-syair Minangkabau sebagai acuan teorinya, dan

¹⁷⁸ Mestika Zed. dkk, *Mencari dan Menemukan Kembali Tan Malaka, Ibid*, hlm. 29

¹⁷⁹ Mengutip Taufik Abdullah, Poeze menulis: “Orang Minangkabau menganggap tiga daerah yang disebut *luhak* sebagai inti dari negerinya, yaitu: Tanah Dara, Agama, dan Lima Puluh Koto...daerah diluar ketiga daerah tersebut disebut rantau.” Dalam masyarakat Minangkabau terdapat suatu kesatuan politik yang independen yaitu *nagari*. Sebuah *nagari* diketuai oleh seorang penghulu dengan satuan terkecilnya adalah ibu dan anak-anaknya. Lihat Harry Poeze, *TanMalaka...I.op.cit.*, hlm. 3-4

¹⁸⁰ Rudolf Mrazek, *Semesta Tan Malaka, Loc.cit*, hlm.7-8. falsafah Minangkabau ini dengan “alam” dan “rantau”-nya mengingatkan kita pada John. S. Dune yang menggagas teori *passing over* (melintas) dari satu budaya ke budaya lain, satu cara hidup ke cara hidup lain, satu agama ke agama lain, dan selanjutnya diikuti dengan proses *coming back* (kembali) yang dilakukan secara kreatif dan simpatik untuk diterapkan pada budaya, agama dan cara hidup sendiri. Lihat Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed), *Passing Over*, Gramedia Pustaka Utama dan Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 2001, hlm. xiv

Tan Malaka begitu bangga dengan tradisi Minangkabau yang sejalan dengan ideologi komunis. Sepertinya adat Minangkabau pula yang membuatnya tidak ragu-ragu membongkar logika mistika yang menyelimuti bangsa Indonesia. Budaya kritik dalam adat Minangkabau bukan sesuatu yang *tabu* bahkan sangat diharapkan. Maka sangat wajar kalau Tan Malaka secara frontal memberikan gambarannya tentang apa saja yang dia terima dari “dunia rantau”. Karena bagi Tan Malaka apa-apa yang diperoleh dari “rantau” harus ditrasformasikan kepada “alam Minangkabau” dan itu bukan suatu pembangkangan tradisi melainkan sebuah kewajiban moral dalam kapasitas Tan Malaka sebagai pemuda pemegang adat.

Gambaran mengenai pengaruh adat dan agama dalam membentuk cara pikir dan falsafah Tan Malaka ini dapat memberikan benang merah dalam melihat ide dan gagasan Tan Malaka. Kembali pada pembahasan etika, khususnya etika politik,¹⁸¹ dasar-dasar moralitas Tan Malaka berbentuk perpaduan unsur-unsur budaya dan agama yang berakumulasi pada masyarakat. Hasil dari percampuran silang tersebut menghasilkan sebuah paradigma baru untuk sebuah tujuan yaitu kemerdekaan bangsa. Moralitas dan keimanan dapat berubah – ubah sesuai keadaan masyarakat

¹⁸¹ Penjelasan mengenai etika sangat kompleks dan *debatable*, agar tidak bias maka pemaknaan etika pada tulisan ini, mengikuti Franz Magnis Suseno, pertama-tama etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan khusus. Etika umum berbicara mengenai prinsip-prinsip dasar mengenai tindakan manusia sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam pelbagai lingkup kehidupannya. Etika ini dapat dibagi lagi menjadi individual dan sosial. Lihat Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 12-13. tetapi yang perlu dipahami disini adalah bahwa kajian tentang etika mendapatkan sebuah refleksi filosofis dalam bentuk relativisme dan absolutisme (universal), dan hingga kini para filosof belum dapat memberikan keputusan mengenai keduanya. Pertanyaan dapat disederhanakan menjadi: apakah etika bersifat relative (konstruksi) ataukah absolute (universal). Lihat Mohammad A. Shomali, *Relativisme Etika*, terj. Zaimul Am, Serambi, Jakarta, 2005, hlm. 25

yang terus berubah. Tan Malaka mengingatkan: “jangan dilupakan, bahwa perkara vital yang menentukan teguh dan lemahnya iman adalah masyarakat kita sendiri.”¹⁸²

¹⁸² Tan Malaka, *Madilog...op.cit.*, hlm. 432

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa filsafat politik Tan Malaka lebih mengarah kepada Madilognya yang sangat representatif yang menguraikan tentang revolusi sosial, revolusi ekonomi, revolusi politik, revolusi pendidikan yang telah penulis uraikan dalam pembahasan sebelumnya.

Dalam urusan revolusi Tan Malaka menganggap bahwa revolusi bukanlah suatu pendapatan otak yang luar biasa, bukan hasil persediaan yang jempolan dan bukan lahir atas perintah manusia yang luar biasa. Kecakapan dan sifat luar biasa dari seseorang membangun revolusi, mempercepat atau memimpinya menuju kemenangan, tetapi ia tidak dapat menciptakan dengan otaknya sendiri. Satu revolusi ialah yang disebabkan olehpergaulan hidup, satu hakekat tertentu dari perbuatan-perbuatan masyarakat.

Tan Malaka memiliki pemahaman yang berbeda terhadap perkembangan revolusi, dan dia membaginya dalam beberapa revolusi seperti revolusi sosial, revolusi ekonomi, revolusi politik dan revolusi pendidikan. Dalam revolusi sosial, Tan Malaka melihat bahwa ketidak-setaraan sosial dalam masyarakat terjadi karena adanya keinginan sebagian kecil orang mencaplok sebagian yang lainnya. Tan Malaka melihat dalam masyarakat asli Indonesia sebenarnya tidak terdapat

pertentangan antara kelompok satu dengan yang lainnya, maka menurut Tan Malaka langkah yang harus diambil adalah melakukan revolusi sosial. Perbedaan status, budaya bahasa dan warna kulit tidak menjadikan alasan untuk mendiskriminasi satu golongan karena secara alamiah manusia ditakdirkan sama.

Dalam revolusi ekonomi, Tan Malaka menggagas sistem kemunistis yaitu menolak kerjasama dengan negara penjajah dalam bidang ekonomi, menurutnya perekonomian Indonesia harus diatur dan di urus sendiri dan untuk mencapainya tidak ada jalan lain kecuali adanya kemerdekaan di bidang politik. Dalam revolusi politik Tan Malaka berpendapat bahwa semua negara di manapun di dunia ini telah bersepakat bahwa kemerdekaan adalah suatu hak. Kemerdekaan mengatur diri sendiri dalam segala bidang yang menyangkut semua aktifitas pemerintahan dan rakyatnya adalah syarat utama menegakkan suatu negara yang demokratis.

Dalam Revolusi pendidikan, Tan Malaka menuliskan tiga buah target pokok yang akan dicapai, pertama memberi senjata cukup, buat pencari penghidupan dalam dunia kemodalan (berhitung, menulis, ilmu bumi, bahasa Belanda, Jawa, Melayu), kedua memberi haknya murid-murid, yakni kesukaan hidup, dengan jalan pergaulan (vereenniging), ketiga menunjukkan kewajibannya kelak, terhadap pada berjuta-juta kaum kromo.

Dalam etika politik dasar-dasar moralitas Tan Malaka berbentuk perpaduan unsur-unsur budaya dan agama yang berakumulasi pada masyarakat. Hasil dari percampuran silang tersebut menghasilkan sebuah paradigma baru untuk sebuah

tujuan yaitu kemerdekaan bangsa. Moralitas dan keimanan dapat berubah – ubah sesuai keadaan masyarakat yang terus berubah. Tan Malaka mengingatkan: “jangan dilupakan, bahwa perkara vital yang menentukan teguh dan lemahnya iman adalah masyarakat kita sendiri.”

B. SARAN

Dalam memahami pemikiran-pemikiran Tan Malaka haruslah melihat dari dua sisi yang berbeda, karena disatu sisi pemikiran Tan Malaka dapat melihat lebih jauh permasalahan yang ada dan dapat memberikan solusi dari sebuah masalah, dan disatu sisi pemikiran Tan Malaka juga dapat bersebrangan dengan pemikir-pemikir politik yang ada bahkan cenderung berlawanan dengan pemikir-pemikir yang ada sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Mesir Darl Al-Arabi 1968)
- Abdurrahman Taj. *Al-Syasaah Al-Jinayah Fi As-Syar'iyah* (Mishl Maktabah Dar Al-Arab 1965)
- Achmad Maulana. *Kamus Ilmiah populer* (Yogyakarta: Absolut Press 2004)
- Ahmad Baidowi dan Iman Baihaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009)
- Affan Gaffar. *Beberapa Aspek Pembangunan Politik*. (Jakarta: CP Rajwali 1983)
- Ahmad Suhelmi. *Dari Kanan Islam Hinnga Kiri Islam Biografi dan Pemikiran Politik*. (Jakarta: Darul Falah 2001)
- Pemikiran Politik Islam Barat Kajian Sejarah Perkembangan Negara, Masyarakat Dan Kekuasaan* (Jakarta: Gramedia 2001)
- Ali Syariati. *Tugas Cendikiawan Muslim*. (Jakarta: Rajawali 1982)
- Alim Roswanto. *Oksidentalisme : Mempertimbangkan Hasan Hanafi Dalam Postkolonialisme, Sikap Kita Terhadap Imperialisme* (Yogyakarta: Jendela 2001)
- Anwar Haryono. *Perjalanan Politik Bangsa Menoleh Kebelakang Menatap Masa Depan*. (Jakarta: Gema Insani Pres 1997)
- Anton Baker Dan Ahmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. (Yogyakarta: Kanisium 1990)
- Anton Bleck. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Kini*. Alih Bahasa Abdullah Ali Dan Mariana Arietyawati. (Jakarta: Serambi 2006)
- Asrafy Jaya Bakri. *Konsep Maqasidursyari'ah Menurut Asyatibi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996)
- Burhanuddin Daya. *Gerakan Pembaharuan Pembaharu Pemikiran Islam Kasus Sumatera Thawalib*. (Yogyakarta: IKAP 1995)

- Deliar Noer. *Partai Islam Dipentas Nasional Kisah Dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-11965* (Bandung: Mizam 2000)
-*Islam Dan Politik*. (Jakarta: Yayasan Risalah 2003)
- Eko Prasetyo. *Islam Kiri Menuju Refolusi Sosial*. (Yogyakarta: INSIST 2003)
- H. Sirajuddin. *Politik Ketatanegaraan Islam. Studi Pemikiran Hasyimi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007)
- Harry A. Foeze, “*Verjuised En Vergeten; Tan Malaka, De Linkse Beweging En De Indonesisce Revolutie*, Jilid 2 Alih Bahasa Hersi Setawan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2009)
- Helen Jervis. *Tan Malaka, Pejuang Revolusioner Atau Manusia Murtad?*” Alih Bahasa Wasid Suarto. (Jakarta: Yayasan Masa 1987)
- Ihsanuddin. *Tan Malaka Dan Revolusi Proletar*. (Yogyakarta: Pesist Book 2010)
- Imam Al-Ghazali. *Pembebas Dari Kesesatan*. Alih Bahasa Sya'id Amir Ali. (Jakarta: Ilham Islam 1986)
- Imam Munawir. *Posisi Islam Ditengah Pertarungan Ideologi Dan Keyakinan*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1986)
- J Suyuti Pulungan. *Prinsip-Prinsip Pemerintah Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996)
- Kaelan. *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Paradigma 2010)
- *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. (Yogyakarta: Paradigma 2010)
- *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. (Yogyakarta: Paradigma 2005)